

Declare Adalah Jurnal Ilmiah yang dikelola secara mandiri dan partisipatif oleh mahasiswa program studi Hubungan internasional bersama Laboratorium HI Universitas Bosowa Makassar. Jurnal Declare terbit berkala tiga kali setahun pada bulan Mei Januari, dan September. Jurnal Declare membuka kesempatan kepada peneliti dan penstudi Hubungan Internasional untuk berpartisipasi guna mendorong pengembangan pengetahuan Studi Hubungan Internasional lebih luas. Kirimkan naskah artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai visi Jurnal kepada redaksi jurnal declare di alamat email jurnaldeclare@gmail.com

Diterbitkan oleh :
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa

Sekretariat : Jln. Urip Sumohardjo km4.

Gedung 1 lantai 1 Universitas Bosowa
Telepon : (+62) 811-4449-443
Email : jurnaldeclare@gmail.com



JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Volume 2, Issue 1, Januari - April 2017



ISSN : 23385332

Declare

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Volume 2, Issue 1, Januari - April 2017

ANALISIS MOTIF PENYERANGAN RUDAL BALISTIK KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN (PERIODE 2010-2015)

ANALISIS BENTUK - BENTUK PELANGGARAN PERJANJIAN MINSK DALAM KONFLIK RUSIA - UKRAINA

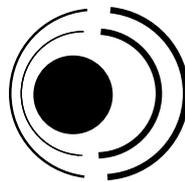
PENGARUH SOFT POWER RUSIA TERHADAP UKRAINA DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA

ISU HAM DALAM ERA KEPEMIMPINAN SBY-JOKOWI STUDI KASUS : EKSEKUSI MATI "DUO BALI NINE"

PERKEMBANGAN DRAMA KOREA DI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI KOREA SELATAN

UPAYA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENGEMBANGKAN E-DIPLOMASI SEBAGAI SARANA PROMOSI PARIWISATA

D *Declare* VOL. 2, Issue 1, Januari - April 2017
Jurnal Hubungan Internasional
Universitas Bosowa Makassar



DECLARE
The Epistemic Space

Diterbitkan oleh:
Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Bosowa Makassar

Pedoman Penulisan Jurnal Declare

1. Artikel yang ditulis untuk Declare merupakan hasil pemikiran dan hasil penelitian dalam lingkup Ilmu Hubungan Internasional. Tulisan bukan hasil plagiasi dan belum pernah diterbitkan di media atau penerbitan lain (termasuk media online).
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 10 pts, spasi 1, ukuran kertas A4, dengan panjang artikel 4000-6000 kata / 15-20 halaman, tidak termasuk abstrak dan daftar pustaka). Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word. File tulisan dikirim sebagai attachment ke alamat **jurnaldeclare@gmail.com** beserta *curriculum vitae* penulis.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul pada masing-masing bagian artikel. Bagian pendahuluan disajikan tanpa judul bagian.
4. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 200 kata) yang berisi tujuan, metode dan hasil penelitian (ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; metode; hasil; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub bagian); penutup atau kesimpulan; daftar pustaka (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Judul artikel tidak melebihi 16 kata dan ditulis dengan huruf besar di tengah-tengah.
6. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Bagi naskah yang ditulis oleh sebuah tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat email untuk memudahkan komunikasi.
7. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.
8. Menggunakan catatan perut untuk kutipan dengan format: ([Nama Belakang], [Tahun] : [Halaman (Jika ada)]). Contoh (Hasan, 2016:06)
9. Penyusunan daftar pustaka menggunakan APA (American Psychological Association) style dengan alamat website: <http://www.apastyle.org>
10. Tata cara penyajian kutipan, tabel dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Universitas Negeri Malang, 2000) atau mencontoh tata cara yang digunakan dalam artikel yang telah dimuat. Artikel berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris menggunakan ragam baku.
11. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewer) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kompetensinya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan dan penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik (email).

Jurnal Hubungan Internasional

Declare

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Makassar
Volume 2, Issue 1, Januari - April 2017

Editorial Team

Tim Redaksi :

Finahliyah Hasan, S.IP., MA
Andi Norman
Sitti Nurbaya Ali
Wa Ode Kodrat Rahmatika
Muh.Ardha Salim

Reviewer :

Arief Wicaksono, S.Ip., MA
Zulkhair Burhan, S.IP., MA
Finahliyah Hasan, S.IP., MA
Beche Bt Mamma, S.Ip., MA
Fivi Elvira Basri, S.Ip., MA
Rosnani, S.Ip., MA
Asy'ari Mukrim, S.Ip., MA

Pengantar Redaksi

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim,,segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, sang pencipta alam semesta. atas berkat dan rahmatnyalah sehingga Journal Declare ini dapat selesai. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad SAW, yang telah menjadi pembimbing terbaik dalam setiap langkah. Journal Declare merupakan journal ilmiah yang di terbitkan oleh jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. journal Declare ini disusun oleh Mahasiswa dan Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar. Journal ini menerbitkan dua edisi setiap tahunnya. Declare memuat tulisan yang murni dari mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar dengan menggunakan penelitian secara ilmiah serta mengulas lebih mendalam permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat dijadikan permasalahan bukan hanya berdampak lokal namun berdampak Global dengan menggunakan perspektif serta analisis khas mahasiswa Hubungan Internasional. Dalam edisi kali ini Declare berfokus pada isu Ekonomi Pariwisata, HAM, serta Budaya lokal yang menarik untuk dibaca dalam membuka wawasan lokal berdampak Global.

Akhir kata, tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Journal ini, namun terlepas dari hal tersebut Journal Declare ini diharapkan dapat memberi banyak wawasan kepada seluruh pembaca akan seluk beluk permasalahan Dunia sehingga membuka lebih jauh wawasan diri tentang hal yang sedang terjadi.

Tim Redaksi

Daftar isi

Panduan Penulisan ~ i

Editorial Team ~ ii

Editorial Declare ~iii

Daftar isi ~ iv

Analisis Motif penyerangan Rudal Balistik Korea Utara Terhadap Korea Selatan(Periode 2010-2015)

Olinda L. Laimeheriwa ~1

Arief Wicaksono, S.Ip.,MA

Rosnani, S.Ip.,MA

Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perjanjian Minsk Dalam Konflik Rusia-Ukraina ~ 22

Eliyah Pra Utami HS

Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

Arief Wicaksono, S.Ip.,MA

Pengaruh Soft Power Rusia terhadap Ukraina Dalam Konflik Rusia-Ukraina ~ 35

Yulita Yusuf

Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA

Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

Isu Ham Dalam Era Kepemimpinan SBY-Jokowi Studi Kasus: Eksekusi Mati "Duo Bali Nine" ~ 50

Astira Sitaba

Beche Bt. Mamma, S.Ip.,MA

Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

Perkembangan Drama Korea Di Amerika Serikat Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Korea Selatan ~ 67

Farid Sautama Hasyim

Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA

Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

Upaya Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengembangkan E-Diplomasi Sebagai Sarana Promosi Pariwisata ~ 86

Irma Puiya

Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA

Rosnani, S.Ip.,MA

ANALISIS MOTIF PENYERANGAN RUDAL BALISTIK KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN (PERIODE 2010-2015)

Olinda L. Laimeheriwa

Arief Wicaksono, S.Ip.,MA

Rosnani, S.Ip.,MA

ABSTRACT

This research aims to find out things or the motive behind the attack by North Korean missiles to south korea and determine the response of related phenomena north korea and south korea to bring also look for another actor behind the tensions on the Korean peninsula. This type of research will describe the author as well as a descriptive analysis, which describes the conflict between the two countries that have long happened yet again heating up over the period 2010-2015 and the motive behind a series of attacks according to research by the author. It is known that the fundamental ideological differences and their allies state intervention became one of the factors of conflict. Where the party south korea under the influence of the United States adopts a liberal-capitalist and north Korea under the influence of the Soviet Union adopts the socialist-communist so I raised back in the history of proxy wars that occur within a period of 3 years (June 25, 1950 - July 27, 1953 and linked with a new period listed. And the policy of developing nuclear and missile tests in North Korea is believed to be acts of provocation that can damage both the country's relations. so the authors would like to translate it through the chronology or the attack.

Keywords :Proxy War, North Korea, South Korea, Ideology, Motive ssault, Balistic Missile, Nuclear

PENDAHULUAN

Korea Utara adalah negara yang menyatakan diri secara sepihak sebagai negara *Juche* (percaya dan bergantung pada kekuatan sendiri). Jika kembali mengangkat sejarah *Proxy War* atau perang di mandatkan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun (25 Juni 1950 - 27 Juli 1953) bisa kita menyimak bagaimana kedua belah pihak mengerahkan kekuatan militernya dan mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak 4 juta jiwa yang terdiri dari anggota militer dan masyarakat sipil saat itu. Pasca perang Korea Selatan dan Korea Utara ini juga bukan menjadi penentu akan berakhirnya pertikaian atau kesepakatan untuk berdamai. Diketahui bahwa perbedaan ideologi yang mendasar dan intervensi negara sekutu kala itu, rupanya menjadi salah satu faktor munculnya konflik.

Dimana pihak Korea Selatan berada dibawah pengaruh Amerika Serikat mengembangkan paham liberal-kapitalis, sedangkan Korea Utara dibawah pengaruh Uni Soviet mengembangkan paham sosialis-komunis. Sehingga kedua Negara ini sangat bertolak belakang atau tidak sepemikiran satu sama lain. Korea Utara yang merupakan negara komunis ini di kenal sangat otoriter oleh rezim turun-temurun dari masa kepemimpinan yang sangat berpengaruh besar yaitu rezim Kim Il-Sung (1912- 1994) sebagai "Presiden Abadi". Dan berlanjut pada berakhirnya rezim Kim Jong Il (1941-2011) Pemujaan kepribadian terhadap kedua pemimpin sebelumnya dilakukan secara terorganisir sampai pada rezim Kim Jong-Un yang kini menjabat sebagai pemimpin Negara dan ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Pergantian rezim disini, terus berujung pada penyerangan rudal dan uji coba nuklir sehingga menuai kecaman bahkan sangat kontroversial di kancha dunia. Diketahui program rudal di Korea Utara sendiri telah terlaksana di awal tahun 1969 dimana Uni Soviet memberikan rudal darat pertama kalinya dengan kemampuan mencapai sasaran 60 km, sedang pengembangannya di perkirakan tahun 1976 tepatnya menjelang perang Timur Tengah (Yom Kippur) pada 1973.

¹ Adelia Hasibuan, *Perang Korea Selatan Dan Korea Utara*. Universitas Airlangga. 2011.

² Prasajo, *Transformasi Kompleks*. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik .Universitas Indonesia. 2009.

³ Radis Bastian, *Tumbal- Tumbal Sang Diktaktor Korea Utara*. PT.Agromedia Pustaka. Jakarta, 2014 hal.27.

Olinda L. Laimheheriwa

Hingga saat ini program nuklir dan rudal balistik Korea Utara terus meningkat sesuai dengan kategori, kemampuan dan tipe rudal/ misil masing-masing. Adapun jenis-jenis rudal diantaranya ialah Scud-B jangkauan (300 km), Scud-C (500 km), Rodong (1300 km) yang telah di alokasikan sedang Taepodong-1 (2500 km) yang menjadi peluncuran uji coba, dan Taepodong -2 (6,700≥) yang sedang dalam proses pengembangan. Dengan demikian rudal balistik Korea Utara diperkirakan memiliki kemampuan untuk menghantam benua Amerika. Dan hal ini tentu menjadi ancaman bagi masyarakat internasional. Meski sebenarnya pelunakan hubungan kedua negara sudah terlihat pada tanggal 13 - 15 Juni tahun 2000, ketika pertemuan tingkat tinggi antar Korea diadakan untuk pertama kalinya. "Sunshine Policy" mendapatkan ujian pertama pada bulan Oktober 2002 ketika AS mengumumkan Korea Utara telah memulai program rahasia senjata nuklir.

Hal tersebut menyulut ketegangan antara AS dan Korea Selatan dengan Korea Utara. Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun, dalam pidatonya tanggal 25 Februari 2003 berjanji akan membangun Korea Selatan menjadi "pusat Asia Timur Laut" untuk meningkatkan hubungan antar Korea dan memimpin Korea Selatan menuju era perdamaian dan kemakmuran (Tanpa nama (Online), 2013). Diawali pada 26 Maret 2010 diawali dengan tenggelamnya kapal perang Korea Selatan berlanjut pada 24 November. Di tahun yang sama Korea Utara melakukan serangan alteleri ke pulau "Yeon-Pyeong" yang merupakan markas besar Korea Selatan yang membombardir puluhan rumah, menewaskan seorang tentara dan melukai 13 warga. Korea Utara melakukan serangan militer dengan menggunakan artileri ke Pulau Yeonpyeong di karenakan Korea Selatan melakukan kerjasama latihan militer gabungan (*Ulchi Freedom Guardian*) dengan Amerika Serikat merupakan bagian dari strategi untuk menyerangnya. Aksi latihan militer gabungan yang dilakukan Korea Selatan beserta Amerika Serikat diadakan di kawasan Laut Kuning (Pulau Yeongpyeong) tepat di perbatasan garis batas utara (*Northern Limit Line*) yang disebut juga garis paralel 38 laut kuning yang mana menurut Korea Utara kawasan tersebut masih dalam sengketa kepemilikan. Tak lama kemudian di susul pada 10 Agustus 2011 kembali meluncurkan altileri yang merupakan pertanda berakhirnya rezim Kim Jong-Il karena tutup usia.

Namun alih-alih berdamai konflik ini tak juga berakhir hingga naiknya Kim Jong-Un sebagai pemimpin Korea Utara yang baru justru membuat hubungan persaudaraan semakin merenggang dan menjalin permusuhan dimana-mana. Sempat melontarkan akan melakukan perdamaian pada 1 Januari 2013 dengan Korea Selatan selang sebulan kemudian tepatnya pada bulan Februari Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir yang ketiga yang lebih besar dari tahun 2009. Dan pada bulan April, Korea Utara mengatakan bahwa akan memulai fasilitas nuklir utamanya di Yongbyon baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada Jumat 29 Mei 2013 menyatakan telah memerintahkan persiapan serangan peluru kendali (rudal) scud- B ke pangkalan militer AS dan membantah spekulasi bahwa rudal tersebut bisa menjadi KN-08 berjarak jangkau 3000 km (1.800 mil) di negara potensial (AS, Jepang, Korea Selatan). Korea Utara di bawah pimpinan baru Kim Jong Un bakal terus melakukan tindakan provokasinya jikalau terus mendapat tekanan dari dunia luar khususnya singgungan itu diberikan pada negara Adikuasa (Amerika Serikat) yang turut mengintervensi konflik di semenanjung. Hal ini tentu menjadi perhatian dunia, selain di karenakan menyangkut instabilitas di kawasan Asia Pasifik tetapi juga memicu ketegangan bagi para negara Super Power. Amerika Serikat menilai langkah Korea Utara semakin agresif dan perlu di tindak lanjuti mengingat bukan hanya Korea.

BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pada analisis motif ataupun strategi penyerangan rudal balistik atau uji coba nuklir, serta menjelaskan pula secara khusus bagaimana kondisi terkini dari hubungan kedua belah pihak yang bertikai yakni Korea Utara dan Korea Selatan dibawah intervensi pihak lain (Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB).

⁵ Isu Nuklir Korea Utara diakses dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_04b.htm, Buku Putih Departemen Pertahanan 2006. Pada tanggal 9 September 2015. Pukul 20:35 WITA

⁶ Yeonpyeong Island: A history, Diakses dari: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/8155486/Yeonpyeong-Island-A-history>⁷

Analisis Motif Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara Terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)

Agar pembahasan ini lebih efektif disini penulis memberikan limitasi periode kronologi penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan pada tahun 2010 hingga 2015. Dimana ketegangan di semenanjung korea kembali mencuat di akhir masa kepemimpinan Kim Jong Il dan awal masuknya rezim Kim Jong Un yang sangat kontroversial dan mengingat topik ini juga sudah menyangkut isu keamanan internasional. Penulis merumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : Apa motif yang melatarbelakangi Korea Utara melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan? Dan mengapa Korea Utara bersih keras untuk terus mengembangkan program nuklir dan persenjataan militernya ditengah ketegangan?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui hal-hal atau motif yang melatarbelakangi penyerangan rudal oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan.
- b. Untuk mengetahui respon dunia terkait fenomena Korea Utara dan Korea Selatan dan juga mengetahui apakah ada aktor lain di balik ketegangan di semenanjung Korea.

KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Membuka wawasan terhadap penstudi Hubungan Internasional untuk lebih mengetahui dan menaruh perhatian pada sebuah fenomena atau isu menyangkut stabilitas suatu negara, sistem internasional bahkan tentang isu keamanan di berbagai belahan dunia.
- b. Memberikan informasi terkait judul di atas agar bisa di jadikan tolak ukur atau sebuah referensi oleh generasi yang akan datang.
- c. Menambahpembendaharaan referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar.
- d. Memberikan pemikiran terkait fenomena penyerangan rudal balistik Korea Utara terhadap Korea Selatan.

METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis jabarkan serta analisis bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan tentang konflik antara Korea Utara –Korea Selatan yang telah lama terjadi namun kembali memanas sepanjang periode 2010-2015 dan motif yang melatarbelakangi aksi-aksi penyerangan sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data tertulis sebagai sumber primer dan sekunder. Sumber sekunder akan diperoleh melalui berbagai sumber literatur yang terkait dengan kajian ini penelitian ini. Seperti buku-buku, artikel, jurnal, skripsi hasil penelitian, surat-surat kabar yang berkaitan dengan kajian *Korean war*, *National Interest*, *Security Dilemma* dan *Balance of Power*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data akan dikumpulkan melalui studi pustaka. Teknik Studi Pustaka adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip termasuk juga buku- buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Data yang akan dianalisis akan bersumber pada referensi yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku, bacaan dan internet.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan mengkorelasikan sumber data-data yang diperoleh dengan unit analisis mealui konsep atau pendekatan yang penulis gunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan judul penelitian, melihat persetujuan yang ada membuat kita mampu untuk memahami bagaimana kedua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan kini bersaing meningkatkan kapabilitasnya lewat instrumen militer. Perlu kita ketahui sebelum terpecah menjadi dua bagian, dulunya Korea ialah satu kesatuan yang terletak di semenanjung Asia Timur. Menggali kembali sejarah tepatnya pada tahun 1910, wilayah semenanjung Korea pernah dikuasai Jepang hingga memasuki tahun 1945 yang juga merupakan fase akhir dari Perang Dunia II, Uni Soviet atas izin negara - negara Blok Sekutu menginvasi Manchuria (Cina Utara) dan menduduki semenanjung Korea bagian utara. Tiga minggu kemudian pasukan Amerika Serikat tiba di semenanjung Korea dan menduduki wilayah bagian selatan. Jatuhnya semenanjung Korea ketangan pasukan Uni Soviet & AS sekaligus mengakhiri kekuasaan Jepang atas wilayah Korea. Dan pada bulan Juli hingga Agustus 1945, negara – negara sekutu & Uni Soviet menggelar Konferensi Postdam untuk memutuskan nasib semenanjung Korea tanpa melibatkan perwakilan dari orang - orang Korea. Berdasarkan kesepakatan kedua negara sekutu akhirnya Korea pun di bagi menjadi dua bagian yakni : Korea Utara yang dikendalikan Uni Soviet dan Korea Selatan yang dikelola Amerika Serikat.

Dan secara resminya pada Tanggal 15 Agustus 1948 terbentuklah dua negara baru dengan nama Republik Korea (selatan) dengan ideologi liberal di bawah pimpinan Syngman Rhee dilanjutkan pada 9 September Republik Demokratik Rakyat Korea (Utara) dengan ideologi komunis berada di bawah pimpinan Kim Il Sung. Perang Korea dari 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dibebaskan dari Jepang pada tahun 1945 selama hari-hari terakhir Perang Dunia II, Korea dibagi oleh Sekutu dengan Amerika Serikat menduduki wilayah di selatan Paralel ke-38 dan Uni Soviet tanah ke utara. Belakangan tahun itu diputuskan bahwa negara akan bertemu kembali dan dibuat independen setelah periode lima tahun. Ini kemudian disingkat dan pemilu di Utara dan Korea Selatan yang diadakan pada tahun 1948. Sementara Komunis di bawah Kim Il-sung (kanan) mengambil alih kekuasaan di utara, selatan menjadi demokratis.

Didukung oleh sponsor masing-masing, kedua pemerintah ingin menyatukan kembali semenanjung di bawah ideologi tertentu mereka.⁷ Setelah beberapa pertempuran perbatasan, Korea Utara menginvasi selatan pada 25 Juni 1950, rupanya hal itu menjadi awal mulainya konflik yang terus berkepanjangan hingga sekarang ini. Perang ini sering disebut sebagai *proxy war* antara Amerika Serikat dan sekutunya dari Blok Barat dengan Komunis Republik Rakyat China dan Uni Soviet dari Blok Timur. Korsel yang di backup oleh Amerika dan sekutunya termasuk negara-negara Britania dan Jepang berusaha menguasai Semenanjung Korea untuk melawan kekuatan Uni Soviet dan China yang secara terang-terangan membela Korea Utara dengan mengirimkan pasukan dan persenjataan pada perang tersebut. Semenanjung Korea merupakan semenanjung yang membatasi kedua Korea ini. Korea Utara menjadi condong ke Utara karena geopolitiknya dan pengaruh Uni Soviet yang saat itu tengah gencar melakukan tindakan apapun termasuk perang melawan Amerika dan sekutunya. Bagi siapa yang dapat menguasai Semenanjung ini, maka ia akan dapat mudah melebarkan "sayap-sayap" hegemoni dan ideologinya. Pertikaian yang terjadi bukan murni inisiatif dari Korea Utara dan Korea Selatan sendiri tetapi memang pada kenyataan memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimana pada awalnya masih dijajah oleh Jepang lalu kemudian dikendalikan oleh pengaruh ideologi besar dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jelasnya bukan karena kekuatan dan kesadaran kedua negara untuk berselisih melainkan atas dasar himbuan atau perang yang di mandatkan kala itu. Tentu kedua sekutu ini memiliki kepentingan tersendiri dan cara untuk mencapainya ialah dengan cara menghegemoni dan menginvasi kedua kubuh.

⁷North Korean leader Kim Jong Un salutes during a visit to the Ministry of the People's Armed Forces on the occasion of the new year. Diakses dari : <http://jakartagreater.com/korea-utara-peringatan-korea-selatan-dan-amerika-serikat/>. Pada Tanggal 21 Juni 2016. Pukul 22:30 WITA.

⁸On The News, Diakses dari : http://www.kompasiana.com/nurulloh/proxy-war-duo-korea_54ff1da4a33311344450f9fe. Pada Tanggal 21 Juni 2016. Pukul 01:05 WITA.

Boleh saja sejarah konvensional mencatat bahwa Perang Korea dimulai ketika pasukan Korea Utara menyerang wilayah Korea Selatan sebelum ayam berkokok tanggal 25 Juni 1950. Namun sesungguhnya, kapan dan siapa yang pertama kali memulai serangan masih menjadi kontroversi. Perang ini juga disebut "perang yang dimandatkan" (bahasa Inggris proxy war) antara Amerika Serikat dan sekutu PBB-nya dan komunis Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet (juga anggota PBB). Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Untuk penyelesaian konflik yang terjadi di Korea Utara dan selatan yaitu China melakukan perundingan enam pihak (Six-party talks). China sebetulnya punya pengaruh besar untuk ikut mendamaikan kedua Korea karena punya hubungan yang erat dengan kedua pihak. Bahkan, China merupakan sekutu terdekat Korut. Status itu tidak dimiliki banyak negara, termasuk Amerika Serikat. China mengajak keenam negara; Korsel, Korut, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang, untuk kembali melanjutkan perundingan itu. Adapun sanksi yang diberikan kepada Korut dari PBB, bahwa tindakan Korut melanggar kewajibannya dan mengancam keamanan internasional. Ini adalah inti yang menyebabkan sanksi itu dikeluarkan.⁹

A. Kronologi Penyerangan dan Propaganda Korea Utara

Pada poin ketiga ini akan menjelaskan bagaimana kronologi kasus atau fenomena dari konflik Korea ini. Berlatarbelakangi Proxy War membuat kedua negara ini mengalami perpecahan dan menjadi berbeda paham atau ideologi. Hal ini kemudian menjadi tak sejalan. Dengan keyakinan yang berbeda membuat kedua negara bersaudara ini menjadi sangat bersaing. Korea Selatan dengan tingkat perekonomian yang maju membuat negara nya menjadi sedikit lebih makmur dan sejahtera dibanding Korea Utara. Korea Utara menjadi negara yang miskin dikarenakan hasil pendapatan negaranya hanya di pusatkan dalam bidang militer yang membuat ketidakseimbangan dengan kebutuhan akan pangan bagi masyarakatnya.

Tidak hanya itu dalam bidang kebudayaan pun Korea Selatan sangat maju oleh budaya K-Pop nya dan dikenal mendunia, sehingga banyak wisatawan baik domestik dan mancanegara yang berkunjung. Banyaknya investor asing yang masuk ke Korea Selatan untuk melakukan kerjasama pun tak hitung-hitung. Hal ini membuat meningkatnya pendapatan negara Korea Selatan dan jarang akan krisis. Daya tarik dari Korea Selatan pun sangat membooming, tak heran jika sangat banyak perusahaan-perusahaan asing atau MNC yang berdiri di Seoul yang tak lain merupakan ibu kota dari Korea Selatan. Dengan kemajuan dalam beberapa bidangnya membuat Korea Utara merasa sangat tersaingi dan terus mengalami krisis. Pada akhirnya Korea Utara pun semakin menutup diri dari negara lain. Faktor-faktor kecil seperti inilah yang membuat awal mula konflik kembali memanas ditambah dengan adanya ikut campur dari negara barat membuat Korea Utara geram dan memutuskan untuk terus memulai pertikaian. Aksi provokasi dan propaganda pun mulai dilayangkan oleh pihak Korea Utara. Istilah propaganda yang berasal dari Gereja Katolik Roma semula berarti penyebaran terbatas informasi dan kredo. Istilah itu sekarang digunakan dengan penekanan khusus pada media komunikasi massa. Meskipun demikian semua penyebarluasan ide-ide tidak bisa disebut propaganda.

Ada beberapa defenisi propaganda salah satunya ialah yang terdapat dalam buku Diplomasi S.L Roy. Menurut Terrence Qualter mendefinisikannya sebagai :

“.....usaha yang disengaja oleh beberapa individu atau kelompok melalui pemakaian instrument komunikasi dengan maksud bahwa pada situasi tertentu reaksi dari mereka yang dipengaruhi adalah seperti apa yang diinginkan oleh sang propogandis.¹⁰

Dalam kata-kata “ usaha yang disengaja” terletak kunci dari gagasan propaganda. Oleh karena itu tampaknya jelas bahwa tiap tindakan promosi hanya bisa menjadi propaganda bilamana itu menjadi bagian dari kampanye yang disengaja untuk menghasilkan aksi melalui control sikap.

⁹Makalah Perang Korea Utara dan Korea Selatan. Diunduh : <http://www.academia.edu>.

¹⁰S. L Roy, DIPLOMASI. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 1995, hal 41.

Olinda L. Laimeheriwa

Merasa tidak mendapat keadilan dan merasa sangat dikucilkan oleh negara lain membuat Korea Utara terus menjalankan aksinya lewat media massa maupun elektronik. Selain menyebar ancaman kepada negara-negara yang ingin mendiskriminasinya, pihak Korea Utara juga menyebarkan berita-berita yang tak benar yang ditujukan kepada musuh yakni Korea Selatan. Tindakan Korea Utara yang dipimpin oleh rezim Kim Jong Un ini mulai mendapat banyak kritikan bahkan perlawanan dari pihak yang juga merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan dari Korea Utara. Berikut ini kronologi penyerangan yang dilakukan Korea Utara dari tahun 2010 -2015 yang bersumber dari pemberitaan media massa/elektronik.

Tenggelamnya Kapal Cheonan

Serangan terhadap kapal perang Cheonan yang berbobot 1.200 ton terjadi pada malam hari, 26 Maret 2010. The Telegraph menyebutkan, satu tim khusus Korea Utara telah dibentuk untuk melakukan aksi bunuh diri dengan menggunakan kapal selam untuk menyerang Cheonan. Diduga penyerangan itu atas perintah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-il. Penyerangan terjadi sehari setelah penangkapan dua mata-mata Korea Utara yang berusaha membelot ke Korea Selatan. Keduanya dituduh mendalangi pembunuhan Hwang Jang-yop, pejabat top partai berkuasa yakni, Partai Pekerja Korea Utara.

Tenggelamnya Cheonan di laut Kuning pada 26 Maret 2010 disebut sebagai peristiwa paling mematikan setelah Perang Korea pada tahun 1953. Korea Selatan yang memimpin investigasi internasional menyimpulkan serangan torpedo Korea Utara sebagai penyebab tenggelamnya Cheonan. Namun, Pyongyang berkeras tidak mengakuinya. Salah satu wartawan "Shin" mengatakan, sulit mengharapkan adanya pembaruan kebijakan di Korea Utara di masa pemerintahan Kim Jong-un. Kim, tak ubah dengan ayahnya, Kim Jong-Il yang menutup pintu bagi bersatunya dua Korea.¹¹

Serangan artileri ke pulau "Yeon-Pyeong"

Insiden kedua terjadi yakni serangan artileri Korea Utara menghajar Pulau Yeonpyeong. Akibatnya, dua orang tentara Angkatan Laut (AL) dan dua warga sipil Korsel tewas. Sementara, 19 tentara AL dan warga sipil mengalami luka-luka akibat 200 artileri yang ditembakkan Korut. Serangan ke Pulau Yeonpyeong adalah konfrontasi terbuka kali pertama terhadap penduduk sipil sejak berakhirnya Perang Korea 57 tahun lalu. Walau dibantu Amerika Serikat, Korea Utara tak bisa dianggap enteng. Selain memiliki nuklir, para petinggi negeri itu, juga rakyatnya tak mudah ditundukan. Mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, menjelaskan soal ini dalam tulisannya di Washington Post, Rabu 24 November 2010. "Berurusan dengan Korut telah lama menjadi tantangan bagi AS," tulis Carter. Presiden AS ke-39 itu menilai karakter unik membentuk rezim, dan masyarakat negeri itu. Tak gampang tunduk pada asing. Dan kantor penyiaran, Yonhap memberitakan, peringatan dikeluarkan menyusul dugaan adanya artileri yang ditembakkan pihak utara. Insiden ini terjadi di hari yang sama dengan pelaksanaan latihan perang gabungan Korea Utara dan Amerika Serikat. Di pihak Korut, latihan perang-perangan ini dituding sebagai provokasi. Hubungan dua korea makin memanas akhir-akhir ini dikaitkan dengan insiden pertama yaitu tenggelamnya kapal cheonan.¹²

Serangan artileri pertanda berakhir Rezim Kim Jong Il

SEOUL - Korea Selatan (Kores) dan Korea Utara (Korut) dikabarkan kembali terlibat baku tembak. Korut dikabarkan melepaskan tembakan artileri ke arah Pulau Yeonpeong, yang kemudian dibalas oleh pihak Korsel. Kementerian Pertahanan Korsel membenarkan serangan yang terjadi hari ini. Mereka mengatakan, pihak angkatan laut mendengar suara tembakan dari pihak Korut. Serangan artileri itu jatuh di wilayah Pulau Yeonpeong di wilayah perbatasan yang dikenal Garis Batas Utara (NLL). "Kami melepaskan tiga tembakan artileri, setelah sebelumnya mereka (Korut) melepaskan tembakan ke wilayah NLL," ucap seorang juru bicara Kemenhan Korsel seperti dikutip AFP,

¹¹Tempo New Com, Diakses Dari: <https://m.tempo.co/read/news/2014/03/26/118565653/korut-dituntut-minta-maaf-dalam-tragedi-cheonan>. Pada Tanggal 25 Juni 2016. Pukul 19:06 WITA.

¹²Viva News. Diakses Dari: <http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/191001-suara-artileri-terdengar-korut-meny Serang>

Olinda L. Laimeheriwa

Rabu (10/8/2011). Seorang pejabat Korsel mengklaim salah satu tembakan artileri Korut melewati batas NLL. Tetapi tembakan itu tidak menyebabkan kerusakan berarti. Wilayah perbatasan NLL memang dipersengketakan oleh kedua negara. Kedua Korea ini kerap terlibat baku tembak berdarah antara angkatan laut kedua negara di tahun 1999, 2002 dan November 2009 lalu. Pada November 2009 lalu, pihak Korut melepaskan serangan artileri ke Pulau Yeonpeong. Empat orang warga Korsel dilaporkan tewas dalam kejadian ini. Kemungkinan besar tembakan itu dilepaskan saat Korut melakukan latihan perang.¹³

Uji Coba Rudal Scud – B ke pangkalan militer AS di Korsel

Pada Jumat 29 Mei 2013 menyatakan telah memerintahkan persiapan serangan peluru kendali (rudal) scud- B ke pangkalan militer AS dan membantah spekulasi bahwa rudal tersebut bisa menjadi KN-08 berjangkau 3000 km (1.800 mil) di negara potensial (AS, Jepang, Korea Selatan). Korea Utara ditenggarai sudah memiliki jajaran peluncur bergerak peluru kendali nuklir yang mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Saat parade militer pada 2012 di Pyongyang, peluncur peluru kendali nuklir itu memang telah diperagakan, namun diperkirakan itu model saja. Panglima Komando Amerika Utara dan NORAD, Admiral Bill Gortney, dalam kabar di US Naval Institute, dilansir hari ini, menyatakan, peluru kendali nuklir lintas benua (intercontinental ballistic nuclear missile/ICBM) itu diberi kode KN-08. Jika KN-08 betul-betul masuk jajaran operasional arsenal nuklir Korea Utara, akan sangat sulit menangkal dan menanggulangi karena karakter bergerak pijakan pembawanya. Karakter bergerak KN-08 bisa disejajarkan dengan karakter serupa S-300 buatan Rusia atau peluru kendali konvensional Scud Irak yang merepotkan Amerika Serikat saat itu.¹⁴ Satu problem yang berkaitan dengan fakta bahwa militer Amerika Serikat tidak memiliki aset tetap atas aspek intelijen, pengamatan, dan pengintaian di Korea Utara.

Uji Coba Nuklir yang ketiga

Korea Utara sebelumnya pernah melakukan uji nuklir di tahun 2006 dan 2009. Korea Utara mengklaim telah sukses menggelar uji nuklir bahwa tanah yang ketiga pada 12 Februari 2013. Pyongyang menyebut tes ini melibatkan sebuah perangkat nuklir "mini" dan dilakukan "dengan cara yang sempurna dan aman." Konfirmasi ini disampaikan kantor berita Korea Utara KCNA tiga jam setelah aktivitas gempa terdeteksi di lokasi uji nuklir Korea Utara. "Dikonfirmasikan bahwa uji nuklir dilakukan dalam tingkat tinggi dengan cara yang sempurna dan aman, menggunakan perangkat nuklir mini dan ringan dengan daya ledak yang lebih besar, tidak menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan ekologi sekitar," tulis KCNA. Badan pengawas dari sejumlah negara sebelumnya mendeteksi adanya aktivitas gempa di lokasi bawah tanah Punggye-ri sekitar pukul 11:57 waktu setempat. Sebuah gempa dangkal sebesar 4,9 skala richter tercatat oleh badan geologi AS. Dewan Keamanan PBB memperingatkan adanya "konsekuensi yang signifikan" jika Pyongyang melanjutkan uji nuklir ini. DK PBB juga akan menggelar pertemuan darurat di New York terkait insiden ini, demikian kata sejumlah perwakilan negara di PBB.¹⁵ Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam uji nuklir ini dan menyebutnya sebagai "pelanggaran buruk dan jelas" atas resolusi PBB.

Persiapan serangan peluru kendali (rudal) scud- B ke pangkalan militer Amerika Serikat

Seoul - Korea Utara menempatkan unit roketnya dalam posisi siaga pada hari Jumat. Negara ini mengarahkan rudal untuk menyerang pangkalan militer AS di Korea Selatan dan Pasifik. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan hingga tengah malam dengan para petinggi militer negara itu. Kantor berita resmi KNCA menyatakan pertemuan itu menilai bahwa "waktunya telah datang untuk menyelesaikan persoalan dengan imperialis AS dengan menanggapinya". Pada hari Kamis, AS menerbangkan dua pesawat siluman B-2 Spirit menuju Korea Selatan, demi menanggapi serangkaian ancaman Korea Utara.

¹³Fajar Nugraha, Diakses Dari : <http://news.okezone.com/read/2011/08/10/413/490400/korsel-korut-kembali-terlibat-baku-tembak>. Pada Tanggal 25 Juni 2016. Pukul 19:37 WITA.

¹⁴Korea Utara punya rudal nuklir jangkauan Amerika Serikat. Diakses Dari : <http://jakartagreater.com/korea-utara-punya-rudal-nuklir-yang-bisa-jangkauan-amerika-serikat/>. Pada Tanggal 25 Juni 2016. Pukul 20:09 WITA.

¹⁵Diakses Dari : http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130212_korea_utara_uji_nuklir. Pada Tanggal 26 Juni 2016. Pukul 17:59 WITA.

Analisis Motif Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara Terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)

Korut memiliki rudal Scud yang dapat menghantam Korea Selatan, tapi jangkauan rudal itu belum teruji. Penilaian independen dari kemampuan rudalnya itu memiliki kapasitas teoritis untuk memukul pangkalan militer AS di Jepang dan Guam. Militer AS mengatakan bahwa pesawat tempur B-2 terbang lebih dari 6.500 mil untuk menggelar serangan percobaan dalam bagian latihan perang dengan Korea Selatan. Pesawat ini menjatuhkan amunisi di Korea Selatan dan kemudian kembali lagi ke AS.¹⁶ Latihan itu menandai untuk pertama kalinya B-2 terbang pulang-pergi dari daratan AS ke Korea Selatan dan menjatuhkan amunisi, kata juru bicara Pentagon.

Korea Utara tembakan 4 Peluru Kendali jarak dekat

Korea Utara meluncurkan 4 rudal jarak pendek ke laut Timur atau yang juga dikenal sebagai laut Jepang. Rudal tersebut diluncurkan pada Kamis 27 Februari 2014.¹⁷ Menteri Pertahanan Korea Selatan enggan menjawab apakah peluncuran rudal ini pertanda serangan. Korea Utara (Korut) melepaskan tembakan rudal Scud untuk pertama kali sejak 2009. Rudal tersebut dilepaskan ke arah laut pada Kamis 27 Februari 2014 lalu. Empat proyektil dengan jarak lebih dari 200 kilometer, mendarat di sebelah timur pesisir wilayah Korut. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) Kim Min-seok mengatakan, berdasarkan kecepatan rudal tersebut diketahui sebagai rudal Scud Latihan militer bersama secara rutin memicu ketegangan antara Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Misalnya, latihan militer tahun lalu, membuat hubungan Korut dan Korsel memanas. Namun, arah penembakan tidak jelas apakah rudal ditembakkan ke arah latihan atau bukan. Sebab, para militer Korea Selatan dan AS pun tidak spesifik membeberkan dimana mereka latihan. Terkait hal ini, sebagian besar pengamat mengatakan Korea Utara memang memiliki banyak senjata militer konvensional, termasuk jarak menengah rudal balistik yang dapat membawa bahan peledak tinggi untuk ratusan mil.¹⁸

Kecurigaan uji coba nuklir Punggye-ri

Korea Utara (Korut) dituding bersiap-siap melakukan uji coba senjata nuklirnya yang keempat. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan, setelah mengamati langkah signifikan yang dilakukan Korea Utara dalam aktivitas nuklirnya. "Saat ini militer kami mendeteksi banyak kegiatan di dalam dan di sekitar lokasi uji coba nuklir Punggye-ri," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel), Kim Min-seok, dalam konferensi persnya seperti dilansir dari Asiaone, Selasa, 22 April 2014. Menurut dia, pemerintah Korsel masih mengamati aktivitas tetangganya itu, apakah memang sedang melakukan uji coba nuklirnya atau hanya berpura-pura menjalankan uji coba nuklir. Sebagai antisipasi, Kepala Staf Gabungan telah membentuk satuan tugas jika sewaktu-waktu pihak Pyongyang menjalankan program nuklir rahasianya. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dijadwalkan tiba di Korsel pada Jumat mendatang dalam kunjungannya selama dua hari. Beredar spekulasi bahwa Korut sengaja berupaya melancarkan aksi provokasi bertepatan dengan kunjungan Barack Obama tersebut. Kim menekankan bahwa program senjata nuklir Korut bisa saja diluncurkan dalam sebuah uji coba "setiap saat" atas perintah pemimpinnya di Pyongyang.¹⁹

Uji coba mesin penggerak untuk peluru kendali balistik

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un menyatakan negaranya akan segera menggelar sejumlah uji coba hulu ledak nuklir dan rudal-rudal balistik. Kim, sebagaimana dikutip kantor berita Korut, KCNA, menyebut rangkaian uji coba itu akan "meningkatkan keyakinan" khalayak terhadap kemampuan kekuatan serangan nuklir Korut. Menurut KCNA, pernyataan tersebut dilontarkan Kim ketika dia menginspeksi simulasi teknologi yang diperlukan untuk menuntun rudal balistik kembali ke atmosfer. Pada 10 Maret lalu, Korut menembakkan dua rudal balistik jarak pendek sejauh 500 kilometer.

¹⁶Tempo News. Diakses Dari :<https://m.tempo.co/read/news/2013/03/29/118470016/pesawat-siluman-as-mengudara-korut-siapkan-rudal>. Pada Tanggal 26 Juni 2016. Pukul 18:38 WITA.

¹⁷See more at: <http://lintasterkini.com/01/03/2014/untuk-pertama-kali-sejak-2009-korut-tembakkan-rudal-scud.html#sthash.idcVwvdT.dpuf>

¹⁸Liputan 6 News Com. Diakses Dari: <http://global.liputan6.com/read/2016447/korea-utara-luncurkan-4-rudal-ke-laut-jepang>. Pada Tanggal 26 Juni 2016. Pukul 19:05 WITA.

Olinda L. Laimeheriwa

Sesaat setelah peluncuran, Pyongyang mengumumkan 'pembatalan' semua proyek kerja sama antar-Korea dan bakal melikuidasi semua aset Korea Selatan di Korut. Peluncuran rudal Korut dilakukan sehari setelah Kim Jong-un mengklaim bahwa negaranya mampu membuat hulu ledak nuklir mini yang bisa dipasang ke rudal. Kementerian Pertahanan Korea Selatan skeptis dengan klaim Kim Jong-un karena, menurut mereka, Korut "belum sanggup membuat hulu ledak nuklir mini". Jika Korut benar-benar melakukan uji hulu ledak nuklir, maka itu adalah uji coba kelima setelah yang terakhir dilakukan Januari lalu. Uji coba, yang diklaim sebagai bom hidrogen tersebut, disusul oleh peluncuran satelit pada Februari.²⁰

Korut telah memobilisasi unit artileri ke dekat perbatasan menyerang 11 pengeras suara.

Beberapa jam menjelang tenggat ultimatum Korea Utara terhadap siaran propaganda Korea Selatan, militer Korut dilaporkan berada dalam kondisi siaga perang. Di sisi lain, Korsel menyatakan siap merespons. Angkatan Darat Korea Utara (KPA) menyatakan pasukan garis depan berada dalam keadaan 'bersenjata lengkap, siaga perang' sesuai dengan keinginan Kim Jong-un menjelang tenggat ultimatum pada Sabtu (22/08). "Situasi yang saat ini mencapai permulaan perang, sulit dikendalikan," kata Kementerian Luar Negeri Korut. Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, mengutip sebuah sumber militer yang menyebutkan Korut telah memobilisasi unit artileri ke dekat perbatasan. Diduga unit artileri itu disiapkan untuk menyerang 11 pengeras suara yang memutar siaran propaganda ke arah perbatasan Korut. Akan tetapi, pemerintah Korsel menyatakan akan melanjutkan siaran tersebut. "Kami siap merespons dengan kuat setiap provokasi Korea Utara," kata juru bicara kantor kepresidenan Korsel. Pemimpin Korut Kim Jong-un meminta militer Korut bersiaga perang. (EPA) Pernyataan itu sejalan dengan sikap Presiden Korsel Park Geun-hye yang mengenakan seragam militer dalam siaran langsung televisi, Jumat (21/08). Kala itu, dia menyampaikan kepada komandan militer Korsel bahwa aksi provokasi Korut 'tidak akan ditoleransi'.²¹ Sebagai aksi penggentar, empat pesawat jet F-16 milik militer Amerika Serikat dan empat pesawat jet F-15K milik Korsel mensimulasikan serangan pengeboman yang dimulai dari pesisir timur Korsel ke pangkalan militer AS di Osan, dekat Seoul. Koresponden BBC di Seoul, Korsel, Steve Evans, mengatakan posisi kedua negara tersebut lebih serius dari biasanya. Bahkan, menurut Evans, semua warga sipil di wilayah perbatasan Korsel telah diungsikan. Perselisihan kedua negara selama beberapa hari terakhir bermula tatkala Korsel mengarahkan siaran propaganda ke wilayah Korut di perbatasan.

Siaran itu berisi buletin berita, perkiraan cuaca, dan musik. Korut lalu menembakkan artileri di sepanjang perbatasan untuk memprotes siaran propaganda tersebut. Korsel kemudian balas menembakkan artileri ke wilayah Korut dekat perbatasan kedua negara. Pengeras suara yang memutar siaran propaganda diarahkan ke wilayah Korut. (Getty) Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kemudian memerintahkan pasukan di garis depan pertahanan untuk siaga perang. Korut memperingatkan bahwa akan menempuh aksi militer apabila Korea Selatan tidak menghentikan siaran propaganda di perbatasan dan membongkar fasilitas siaran dalam kurun 48 jam. Ultimatum itu akan mencapai tenggat pada Sabtu (22/08) pukul 17.00 waktu Pyongyang. Korut dan Korsel sejatinya masih dalam status berperang karena pertempuran antara keduanya pada periode 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, alih-alih kesepakatan damai.

Beberapa peristiwa penyerangan yang dilakukan berdasarkan otoritas rezim Korea Utara memang menjadi trending topic atau siaran berita mancanegara yang tersiar hampir kesuluruh benua. Dari bentang waktu 2010 hingga 2015 sudah sangat banyak aksi-aksi yang dilakukan bahkan melebihi dari kronologi yang tercantum diatas. Melihat hal ini, rupanya Korea Utara tak mengindahkan sanksi atau resolusi yang di keluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terkait non-poliferasi nuklir. Bahkan tindakan terbaru Korea Utara dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Resolusi PBB telah melarang Korea Utara atas setiap penggunaan teknologi rudal balistik dan senjata-senjata pemusnah massal lainnya.

¹⁹Tempo News. Diakses Dari :<https://m.tempo.co/read/news/2013/03/29/118470016/pesawat-siluman-as-mengudara-korut-siapkan-rudal>. Pada Tanggal 26 Juni 2016. Pukul 18:38 WITA.

²⁰See more at: <http://lintasterkini.com/01/03/2014/untuk-pertama-kali-sejak-2009-korut-tembakkan-rudal-scud.html#sthash.idcVwvdT.dpuf>

²¹Liputan 6 News Com. Diakses Dari: <http://global.liputan6.com/read/2016447/korea-utara-luncurkan-4-rudal-ke-laut-jepang>. Pada Tanggal 26 Juni 2016. Pukul 19:05 WITA.

Analisis Motif Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara Terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)

Bukan hanya persoalan limit waktu sebelum upaya peluncuran yang membuat negara lain menjadi khawatir. Bahkan Pentagon telah memperingatkan Pyongyang untuk tidak melakukan uji coba rudal. Jika Korea Utara terus melakukan aksi tak terpuji maka diyakini akan banyak negara yang bertindak untuk turut serta menghentikan aksi tersebut. Bukan persoalan bagaimana Pyongyang terus bereksperimen dengan teknologi nuklirnya hanya saja akan sangat membahayakan negara-negara yang juga secara geografis berdampingan dengan wilayah Korea Utara. Sehubungan dengan itu Korea Selatan yang menjadi musuh bubuyutan menjadi sangat rawan dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kim Jong Un yang kini menjabat sebagai pemimpin negara dan ketua komisi pertahanan. Kini keamanan di semenanjung sampai pada level yang sangat membahayakan. Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan nasib dari sekutunya yakni Korea Selatan yang terus mendapat tekanan dari Korea Utara dan berupaya untuk terus memberikan dukungan dan bantuan dalam bidang militer.

Perlu kita ketahui bahwa sampai pada saat ini Korea Utara tak kunjung menghentikan segala aksi provokasi maupun propagandanya. Dan hal ini membuat konflik terus memanas dan tak kunjung ada titik terang akan berakhirnya pertikaian ini. Banyaknya intervensi negara lain juga sangat mempengaruhi segala kebijakan yang dilakukan oleh rezim di Pyongyang. Karena bagi Korea Utara semakin mereka mendapat tekanan dari luar dan terus merasa dimarginalkan maka mereka akan terus mengembangkan program nuklirnya dan terus meningkatkan pertahanan negaranya. Bukan menjadi hal baru jika Korea Utara mendapat banyak musuh selain dari Korea Selatan, yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara negara mereka ini untuk terus melakukan pencitraan agar bisa mendapat pengakuan dari negara lain. Watak ataupun karakter otoriter yang di bawah dari era Proxy War memang masih sangat membekas dalam benak Korea Utara dan itu akan terus dilakukan sampai pada kepemimpinan selanjutnya.

Untuk saat ini kita mengenal presiden Kim Jong Un yang sangat mewarisi karakter dari pemimpin sebelum-sebelumnya. Bahkan rezimnya dikenal jauh lebih otoriter dan kejam dengan segala aturan ataupun kebijakan yang dia buat. Kini nasib di semenanjung Korea sangat memprihatinkan oleh karena banyaknya kepentingan yang bertemu. Di satu sisi Korea Utara menjadi sangat maju dalam peningkatan mutu pertahanannya tetapi di lain sisi Korea Utara menyepelkan aspek kemanusiaan. Dimana tak ada keadilan bagi masyarakatnya, akses untuk berhubungan dengan negara lain pun ditutup, tak ada jaminan kehidupan yang layak karena anggaran negara dihabiskan oleh keperluan militer dan banyaknya diskriminasi dan tindakan kekerasan yang dialami masyarakatnya.

Perang Korea pun meletus dari tahun 1950-1953 sebagai hasil yang tak dapat dihindarkan.²² Begitulah kilas balik dari sejarah awal tentang perang yang terjadi di semenanjung Korea yang kita ketahui bersama sampai detik inipun belum ada penyelesaiannya atau adanya pernyataan damai diantara keduanya. Konflik yang kembali memanas menjadi perhatian dunia dikarenakan sangat mempengaruhi keamanan internasional. Isu yang sekarang menjadi buah bibir masyarakat internasional cukup meresahkan dan membuat banyak negara harus turun tangan kembali. Banyak sejarah panjang yang terukir dalam perang saudara ini hingga sampai kini pertikaian tak kunjung meredam.

Berikut ini penulis akan membahas beberapa motif yang melatarbelakangi tindakan penyerangan oleh Korea Utara :

Terpengaruh Imperialisme dan Ideologi Uni Soviet

Seperti yang sudah di bahasakan diatas bahwa karakter atau watak Korea Utara itu di bentuk dengan sebuah doktrin keyakinan atau ideologi yang sangat mempengaruhi pola perilaku bangsa Korea Utara menjadi sangat otoriter. Negara yang cenderung menutup diri atau mengisolasi

²²Ibid, Hal. 32-33

Olinda L. Laimeheriwa

negara mereka menjadi lebih percaya dan bergantung dengan kekuatan negara mereka sendiri. Uni Soviet yang kala itu menjadi salah satu sekutu dan musuh terbesar Amerika Serikat memang sangat menolak adanya intervensi atau masuknya ideologi barat yang di duga memiliki seribu kepentingan untuk menghegemoni negara incara mereka. Saat Jepang menyerah pada Tahun 1945 membuat ambisi negara-negara super power ingin menerapkan imperealisme dan menyebarkan ideologinya. Jelas saja tiga tahun kemudian tepatnya pada september 1948 secara resmi Republik Demokratik Rakyat Korea (Utara) dengan paham komunis berada di bawah pimpinan Kim Il Sung (1912-1994).

Mulai sejak saat itu pemerintahan diktator pun mulai berjalan seiring zaman dan membuat banyak keputusan untuk menindaklanjuti keinginan Uni Soviet untuk mengusir negara yang ingin menginvasi Korea Utara yang menyebarkan paham selain komunis. Nasib Korea Utara yang kala itu sangat mempercayai dan bergantung pada Soviet dikarenakan dibebaskan dari jajahan China dan Jepang membuat mereka merasa berhutang budi. Menggantungkan harapan setelah memperoleh kebebasan justru berakhir dengan perang saudara dengan Korea Selatan yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Negara ini pun menjadi sangat keras dan terus mencoba memperkuat pertahanan negaranya. Korea Utara pun terdidik untuk lebih memperhatikan stabilitas dengan memulai program pengembangan nuklir pada tahun 1956 Korea Utara melakukan kerjasama dengan Uni Soviet dalam pelatihan program nuklir. Dengan bangga Korea Utara pun memamerkan kemajuan dalam aspek militer. Jika kita simak berdasarkan pemberitaan sepanjang tahun 2010 hingga 2015 dimana akhir rezim Kim Jong Il (1941 -2011) dan di awal pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara terus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji dengan melakukan uji coba nuklirnya yang sangat membahayakan keamanan di Semenanjung Korea dan tentu sangat beresiko tinggi bagi musuh dan juga negara-negara yang secara geografis berbatasan dengan Semenanjung Korea yang menjadi pusat pangkalan militer sekutu.

Warisan Konflik Proxy War (1950-1953)

Sudah tak bisa di pungkiri asal-muasal konflik Korea ini sampai kembali memanas karena masih memiliki dendam masa lalu yang belum terselesaikan. Perang Dingin anatara kedua negara Super Power yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi faktor utama terjadinya perpecahan kedua negara yang dulunya satu kawasan di wilayah Asia Timur. Kita tahu bahwa sampai detik ini belum ada upaya untuk melakukan perdamaian yang sesungguhnya, dari masa kepemimpinan Kim Il Sung pernah sekali menerapkan sebuah kebijakan yakni Sunshine Policy guna menyelesaikan konflik dan menyatakan damai namun rupanya sampai detik ini tak kunjung mendapat kejelasan kapan perang ini akan berakhir. Enam puluh tahun sudah perang Korea dan tidak membawa banyak perubahan sesuai yang di harapkan. Sepertinya dendam kesumat dari rezim-rezim sebelumnya membuat sebuah warisan yang sama dengan terus ingin berkonflik. Perang dimandatkan dari kedua sekutu besar Soviet dan Amerika bahkan masa kepemimpinan Kim Il Sung (Korea Utara) dan Syngman Rhee (Korea Selatan) tidak membawa terobosan baru. Justru hal ini mewarisi watak kediktatoran rezim yang sekarang ini. Kim Jong Un sebagai pemimpin negara Korea Utara dan sekaligus menjabat sebagai ketua komisi pertahanan justru mengeluarkan kebijakan untuk terus melakukan provokasinya dan menerapkan segala peraturan-peraturan kejam di negaranya bahkan sangat mengusik kentraman banyak pihak. Ini sudah merupakan isu keamanan internasional yang sangat memprihatinkan.

Kembali melihat ke sejarah perang Proxy dimana pasukan Amerika Serikat melakukan pendaratan pertama pada 15 September 1950 di Incheon sebagai respon persiapan serangan balik terhadap penduduk Incheon oleh Korea Utara. Dan sangat banyak kerugian material maupun non material. Bukan hanya kerugian dalam aspek militer seperti perlengkapan perang atau senjata-senjata pemusnah massal (artileri, rudal, roket, tank) dan lainnya. Kurang lebih 1.000.000 warga sipil Korea Selatan dan 2.000.000 warga sipil Korea Utara. Jika dilihat korban terbanyak ialah Korea Utara dan hal itu tidak diterima baik oleh negara komunis itu.

Analisis Motif Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara Terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)

Bagi mereka perang itu membawa trauma dan juga akhir dari perang yang tidak seimbang dikarenakan Amerika Serikat dan sekutunya membawa cukup banyak pasukan. Terbentuklah satu pemikiran dari pihak Korea Utara untuk selalu berada pada posisi yang menurut mereka benar dan tak kunjung membangun kembali relasi yang sempat renggang ataupun kembali bekerjasama seperti sedia kala.

Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Pyongyang

Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit internasional lain, dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional (Mochtar Mas'ood, 1994: 184). Menurut Rosenau dalam kebijakan politik luar negeri terdapat tipe keputusan yang akan diambil oleh pembuat keputusan di suatu negara. Tipe-tipe keputusan tersebut antara lain: keputusan makro (macro decisions), keputusan mikro (microdecisions), dan keputusan krisis (crisis decisions). Makro merupakan suatu garis besar umum yang dipergunakan sebagai petunjuk bagi organisasi pemerintahan yang sehari-hari bertanggung jawab mengarahkan keputusan-keputusan rutin dalam implementasi kebijakan luar negeri. Keputusan mikro dikenal sebagai keputusan administrasi dan biasanya dibuat lebih rendah dari organisasi pemerintahan, dan biasanya dikerjakan secara individu bukan oleh kepemimpinan politik. Sedangkan keputusan krisis adalah keputusan yang mirip dengan keputusan mikro, namun merupakan keputusan kecil yang melibatkan pembuatan keputusan tingkat tinggi. Keputusan ini dibuat pada situasi yang tegang ataupun mengancam, keputusan ini sangat mempengaruhi keamanan nasional dan keamanan kawasan ataupun global (T May Rudy, 2002: 118).²³

Kita tahu dengan kondisi krisis ekonomi yang sangat parah, Korea Utara juga membutuhkan kerjasama ekonomi dari selatan untuk mengatasi krisis yang terjadi. Kebijakan "self-reliance" secara perlahan mengalami degradasi akibat kebutuhan mendesak akan peningkatan tingkat perekonomian. Karena itu dilakukan beragam bentuk "aksi" untuk menciptakan suatu keseimbangan yang mereka harapkan. Pemerintah Korea utara melakukan usaha peningkatan pertukaran utara-selatan dengan menjadikan Korea selatan sebagai partner utama karena tingkat perekonomiannya dianggap lebih maju. Dalam hal ini, Korea utara menerapkan serangkaian kebijakan yang menyerupai Cina dan Korea Utara terus melakukan langkah-langkah strategis dalam usaha ini. Kebijakan ini diambil setelah para pemimpin Korea Utara melihat realitas akan ketertinggalannya di bidang ekonomi dibandingkan Negara-negara lainnya di Asia. Kondisi ini memicu suatu pembentukan regulasi baru dengan lebih terbuka daripada sebelumnya. Selain itu, isu nuklir juga menjadi fokus utama politik luar negeri Korea Utara. Berdasarkan konsep di atas bahwa kepemimpinan Kim Jong Un yang ingin membuktikan dirinya sebagai pemimpin muda yang perlu disegani. Membawa perubahan dalam internal maupun eksternal di Korea Utara melakukan reformasi dalam negeri maupun keterbukaan dalam lingkungan internasional, namun Kim Jong Un yang masih menggunakan kebijakan military first yang menjadikan nuklir sebagai alat pertahanan diri dan juga alat politik, sikap Kim Jong Un ini termasuk kedalam Corcive Power, dimana Kim Jong Un takut, jika melepaskan ideologi ayahnya yang menjadikan nuklir sebagai alat politik.

Pencitraan Presiden Kim Jong Un

Pada tanggal 17 Desember 2011, Kim Jong-il meninggal dunia. Meskipun sudah dirumorkan, masih belum jelas apakah Jong-un akan menjadi pemimpin Korea Utara setelah kematian ayahandanya, juga peran apa yang bakal diterimanya dalam pemerintahan yang baru.²⁴ Pada 25 Desember 2011, televisi Korea Utara menayangkan gambar Jang Sung-taek berseragam jenderal, yang menandakan kenaikan kekuasaannya setelah kematian Kim Jong-il. Penampilannya menunjukkan bahwa Jang berhasil meraih peran kunci dalam militer Korea Utara yang bersumpah setia kepada Jong-un. Pemujaan kepribadian terhadap Kim Jong-un ditingkatkan setelah kematian ayahnya.

²³Ariyadi. REAKSI PEMERINTAHAN CINA TERHADAP KEPEMIMPINAN KIM JONG UN DI KOREA UTARA. Universitas Mulawarman. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (1): 25-34 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

Olinda L. Laimeheriwa

Ia dielu-elukan sebagai "penerus besar bagi revolusioner Juche, pemimpin partai, angkatan bersenjata, dan pemimpin rakyat yang luar biasa," serta "kamerad terhormat yang identik dengan Panglima Tertinggi. Kim Jong-il." Ia ditunjuk sebagai ketua panitia pemakaman Kim Jong-il. Korean Central News Agency menggambarkan Jong-un sebagai "orang hebat yang terlahir di surga", ungkapan propaganda yang sebelumnya hanya diberikan kepada ayah dan kakeknya. Sedangkan Partai Buruh mengungkapkan dalam sebuah editorial: "Kami bersumpah dengan air mata darah untuk menjadikan Kim Jong-un sebagai panglima tertinggi kami, pemimpin kami. Itulah pemujaan kepribadian di awal terangkatnya Jong Un sebagai pemimpin Korea utara. Pasca naiknya rezim Kim Jong Un ia bukan hanya mewarisi watak presiden sebelumnya yakni ayahnya yang juga terkenal otoriter yang di juluki Presiden Abadi. Kemudian hal itu dimanfaatkan sebagai suatu pencitraan untuk mengawali segala tindakan provokasi dan propagandanya. Semenjak Kim Jong Un menjabat pada 2011 hingga saat ini sudah sangat banyak serangan-serangan yang dilakukan. Kita bisa kembali membuka Bab III dimana tertera berbagai kronologi tanggal penyerangan Korea Utara sepanjang periode yang di maksudkan. Bahkan masih banyak pemberitaan yang belum terliput sepenuhnya.

Kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya ada kepentingan daripada Kim Jong Un sendiri dimana ia juga ingin membuktikan bahwa rezimnya mampu untuk bersaing dalam bidang peningkatan mutu stabilitas di negaranya. Selain itu Kim Jong Un menerapkan segala peraturan maupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang di nilai tidak masuk akal. Banyaknya tindakan diskriminasi yang terjadi di Pyongyang seperti penculikan, pembantaian bahkan eksekusi semakin membuat dirinya dikenal kejam atau keji. Negara mereka pun sangat dikendalikan oleh militer sehingga hak-hak asasi manusia pun di cabut, tak ada aspirasi dari masyarakat, anggaran negara hanya dihabiskan pada keperluan militer yang sangat memakan banyak biaya dan membuat warga negaranya tak mendapat hidup yang layak alias hidup di garis kemiskinan.

Satu-satunya harga diri mereka ialah bagaimana negara mereka terus memprovokasi dan menyebarkan ancaman maupun doktrin kepada lawan atau musuh.

Menolak Resolusi PBB dan Intervensi Amerika Serikat

Korea Utara adalah salah satu negara yang mendapat sanksi tegas dari PBB. Bahkan tak tanggung DK PBB mengeluarkan beberapa resolusi terkait non- poliferasi nuklir yang tercantum dalam sebuah naskah yang menggambarkan bagaimana pada akhirnya tindakan Korea akan ditindak lanjuti. Dan yang membuat pemerintahan Pyongyang makin geram di karenakan sanksi yang akan dijatuhkan juga termasuk pelarangan ekspor batu bara, baja, emas, titanium dan mineral langka. Dalam draf resolusi tertulis, negara-negara lain tak boleh memasok bahan bakar, termasuk bahan bakar roket ke negara tersebut. Sanksi yang akan dijatuhkan juga meliputi pembatasan transaksi finansial. Korea Utara merasa sangat terkucilkan dan terisolir dengan segala sanksi yang dijatuhkan oleh pihak Amerika dan sekutunya. Sudah jelas sanksi ini, jika diterapkan, akan mengirimkan pesan yang jelas dan pantang menyerah terhadap Korut, bahwa dunia tidak dapat menerima uji coba nuklir. Akan ada konsekuensi jika hal tersebut tetap dilakukan dan kami akan bekerja tanpa henti dan kolektif untuk menghentikan program nuklir.

Tekad Amerika untuk bisa mengendalikan program nuklir Korea Utara agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dituangkan dalam sebuah resolusi. Berikut naskah yang dibuat oleh PBB terkait resolusi yang memberatkan Korea Utara.

Ambisi menjadi Negara Terkuat (Axis of Evil)

Korea Utara tetap berusaha mengembangkannya karena adanya ambisi yang harus dipenuhi, yaitu ; tidak adanya konsesi sepadan atas perjanjian pembekuan senjata nuklir karena USA dianggap

²⁴Tania Branigan (19 December 2011). "Kim Jong-il, North Korean leader, dies". The Guardian (London). Diakses 1 Juli 2016.

Analisis Motif Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara Terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)

mengingkari perjanjian yang telah disepakati, dan Korea Utara berambisi menjadi Negara nuklir yang selanjutnya akan meningkatkan prestise dan bargaining power. Oleh karena ambisi ini, Korea utara bersama Irak, dan Iran oleh USA dituduh sebagai "axis of evil" karena adanya anggapan bahwa ketiga Negara tersebut menyimpan ancaman sangat berbahaya bagi umat manusia. Kondisi ini melahirkan suatu adagium bahwa ketiga Negara ini harus diwaspadai. Untuk mengatasi cap sebagai poros setan ini, korea utara terus melakukan rangkaian upaya diplomasi sebagai usaha rehabilitasi berkaitan dengan cap yang telah "ditempelkan" dalam diri mereka. Serangkaian upaya diplomasi Korea Utara ini juga diimbangi dengan langkah strategis USA dan sekutunya, yaitu nuklir yang mereka (Korea Utara) miliki dapat dikonversikan dengan sejumlah bantuan ekonomi sebagai konsesi atas pemusnahan senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Atas situasi ini, korea utara tetap tegu pada pendiriannya, ia bersedia nerubah apabila hal ini dimulai dari tubuh USA sendiri dengan memusnahkan nuklirnya juga sertamenghendaki jaminan keamanan USA melalui perjanjian bilateral yang diharapkan menghasilkan traktat non-agresi.

Korea Utara dalam memandang reunifikasi dengan Korea Selatan juga menjadi isu sentral politik luar negeri mereka. Besarnya dorongan dari dalam masyarakat Korea Utara atas hal ini menjadikannya suatu permasalahan yang harus segera mendapatkan perhatian serius. Serangkaian usaha tersebut telah dilakukan sebagai bentuk keinginan akan stabilitas dalam negeri. Dalam hal ini terjadi ambiguitas posisi pemerintah karena kenginan reunifikasi sangat tidak diharapkan dalam tataran elit mereka, sedangkan dorongan dari dalam akan hal itu sangat kuat. Kondisi ini memunculkan suatu desakan akan regulasi baru yang memberikan peluang akan reunifikasi semenanjung Korea. Dan hal ini juga mempengaruhi tingkat konstelasi dan kontestasi politik dan militer di kedua Negara, peredaan tingkat persenjataan, penataan kembali hubungan luar negeri, dan kerjasama ekonomi menjadi fenomena yang dapat ditangkap akhir-akhir ini walaupun dengan intensitas relative kecil tetapi mempunyai makna signifikan terhadap kebijakan luar negeri Korea utara.

Dalam studi kasus Korea Utara dan senjata nuklir yang mereka modernisasi terus-menerus setiap waktu, menjelaskan bahwa Korea Utara bersikap defensive demi menjaga keamanan negara dan rakyatnya dari ekspansi militer negara lain. Status 'axis of evil' yang diberikan oleh Amerika Serikat membuat mereka sadar bahwa mereka adalah musuh besar bagi negeri Paman Sam. Pyongyang berusaha melindungi negara dari ancaman Amerika Serikat dengan memperbesar kekuatan nuklir. Mereka juga berusaha membuat negara-negara tetangga yang berkemampuan ekonomi lebih besar agar lebih segan terhadap mereka dengan senjata-senjata nuklir yang siap diluncurkan jika saja mereka mengusik Korea Utara. Kebijakan untuk bertahan ini akan terus dipertahankan oleh Korea Utara agar mereka dapat tetap bertahan hidup dalam hubungan internasional. Mereka akan tetap dalam kebijakan self defense mereka dengan membangun program nuklirnya terus menerus, hingga dunia internasional yang anarki menjadi lebih baik, atau mungkin hingga Amerika Serikat mengubah persepsi mereka bahwa Korea Utara adalah musuhnya yang perlu dilumpuhkan, serta hingga negeri-negeri di sekitarnya menyegani mereka dan bukan malah menganggap mereka negara kecil yang miskin, yang tidak mampu menghidupi rakyatnya.²⁵

Saya rasa, apa yang dilakukan oleh Korea Semata-mata agar tak merasa diremehkan oleh negara Adikuasa dan juga ingin membuktikan pada dunia bahwa mereka juga ingin mendapat kehidupan layak sebagaimana mestinya. Dan yang terpenting bagi pemerintahan di Pyongyang bagaimana negara seperti Amerika mampu untuk bertanggung jawab dan dapat dipegang janjinya. Karena mereka pernah melakukan diplomasi multilateral yakni Amerika Serikat terhadap Korut melalui Six Party Talks (Cina, Korut, Korsel, AS, Jepang, Rusia). Korut yang memiliki posisi tawar tinggi dengan status kepemilikan nuklirnya, membuat penawaran untuk membekukan program pengembangan nuklirnya dengan syarat mendapatkan bantuan internasional (ekonomi), jaminan keamanan dari AS, serta normalisasi kembali hubungan dengan AS yang sempat terhenti. sebagai salah satu negara sponsor terorisme. Korut yang setuju dengan penawaran yang diberikan, kembali

²⁵Galih Wisnu Aji. Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dalam Pengembangan Senjata Nuklir . Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. 2013

Olinda L. Laimeheriwa

merasakan kecewa, karena AS meminta penundaan perjanjian setelah dilaksanakannya pemilihan Presiden pada tahun 2008. Hingga Desember 2008, AS belum juga melakukan pembahasan kembali mengenai rencana perjanjian tersebut, yang mengakibatkan Korea Utara secara terang-terangan kembali melanjutkan program pengembangan nuklirnya.

Negara sebagai pelindung utama dari masyarakat didalamnya, harus dapat melindungi dirinya sendiri, karena negara merupakan aktor independen yang tidak dapat bergantung pada sistem internasional untuk perlindungannya. Oleh karenanya meningkatkan keamanan negara demi 'mencegah' negara lain menyerang merupakan suatu keharusan, atau yang oleh realist disebut defensive, yang bertujuan hanya untuk 'bersiap-siap' akan ketidak pastian dalam politik dunia. Sama halnya ketika Korut meningkatkan keamanan negaranya dengan program nuklir, tanpa adanya tindakan-tindakan menyerang, ini dimaksudkan untuk mencegah negara lain (AS) melakukan penyerangan terhadapnya. Namun ketika suatu negara melakukan defensive security, maka akan ada negara lain yang merasa tidak aman, dan berusaha menggagalkan peningkatan keamanan negara tersebut dengan berbagai cara, atau meningkatkan keamanan negaranya sendiri dengan tingkatan lebih tinggi.

Dari pembahasan pada Poin A dan B memberikan kita pemahaman bahwa mengapa sampai negara komunis-sosialis atau Korea Utara bersih keras dengan segala alasan untuk terus meningkatkan keamanan dengan cara fokus untuk mengembangkan program nuklirnya meski mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan sekutunya PBB. Bukan hanya semata mendapat teguran tetapi juga diberikan sebuah sanksi atau resolusi kepada pemerintah Pyongyang. Yang dimana tak segan-segan negara otoriter itu mendapat beberapa sanksi bukan hanya persoalan pemberhentian aktivitas nuklirnya melainkan juga mendapat embargo ekonomi dan lainnya. Seperti yang sudah di jelaskan pada pembahasan di atas bahkan Korea Utara juga akan di jatuhkan sanksi berupa pelarangan ekspor batu bara, baja, emas, titanium dan mineral langka. Dan dalam draf resolusi yang tertulis diatas (Gambar 4.1), negara-negara lain juga tak diperkenankan atau tak boleh memasok bahan bakar, termasuk bahan bakar roket ke negara tersebut. Sanksi yang akan dijatuhkan juga meliputi pembatasan transaksi finansial.

Tapi hal ini justru tak di indahkan oleh Korea Utara. Sudah banyak resolusi oleh DK PBB yang selama ini sudah di berikan bahkan sejak perang proxy, rezim Kim Jong Il tetapi sampai pada pemerintahan Kim Jong Un , Korea Utara semakin menggila untuk meningkatkan kapabilitas militer negaranya. Itulah yang menjadi layak untuk kita amati bagaimana peran negara sendiri untuk bisa memaksimalkan kedaulatannya. Bahkan dalam teori National Interest sudah dijelaskan bahwa : Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Korea Utara disini hanya ingin melindungi negaranya dari ancaman dan juga terbebas dari segala tekanan. Trauma akan perang proxy dan juga krisis ekonomi yang melanda membuat pemerintahannya mau tak mau harus menerapkan kebijakan yang menurutnya akan mampu untuk membebaskan mereka dari belenggu yang di hadapi di negaranya. Dengan kelebihan dalam aspek militernya diyakini mampu untuk menekan negara yang tidak sepaham dengan Korea Utara. Membangun kembali kota yang pernah hancur dan runtuh tak secepat membalikkan telapak tangan. Korea Utara harus bangkit dari keterpurukan dan ingin terbebas dari intervensi negara-negara Super Power yang dahulunya ingin menguasai negaranya. Tetapi terkait segala provokasi ataupun tindakan propaganda bahkan aksi-aksi serangan yang dilimpahkan kepada Korea Selatan adalah tindakan yang bersifat ofensif dan difensif . dimana negara memang mutlak memilih bertahan atau menyerang.

Di satu sisi Korea Utara juga khawatir dengan arogansi Amerika dalam membantu musuh nya. Dengan memanas menggelar latihan militer bersama di tengah uji coba nuklirnya, ditambah lagi harus

Analisis Motif Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara Terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)

dijatuhi beberapa sanksi. Sedang di lain sisi pencitraan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Korea Utara sebagai negara otoriter dan Juche harus di pertahankan. Maka dari itu dengan mengutamakan aspek militer bagi Korea Utara adalah hal yang memang harus dimaksimalkan demi keutuhan negaranya. Meski mengesampingkan pertumbuhan perekonomiannya tetapi Korea Utara masih memiliki ambisi untuk tidak meminta bantuan atau kerja sama kepada negara musuh dan menutup diri dan berharap akan mampu menemukan jalan keluarnya.

PENUTUP

Dari hasil penelitian tentang “Analisis Motif Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara terhadap Korea Selatan Periode 2010 – 2015”, dapat disimpulkan bahwa :

Sebelum terpecah dahulu Korea satu kesatuan yang terletak di semenanjung Asia Timur. Menggali kembali sejarah tepatnya pada tahun 1910, wilayah semenanjung Korea pernah dikuasai Jepang hingga memasuki tahun 1945 yang juga merupakan fase akhir dari Perang Dunia II, Uni Soviet atas izin negara - negara Blok Sekutu menginvasi Manchuria (Cina Utara) dan menduduki semenanjung Korea bagian utara. Tiga minggu kemudian pasukan Amerika Serikat tiba di semenanjung Korea dan menduduki wilayah bagian selatan. Jatuhnya semenanjung Korea ketangan pasukan Uni Soviet & AS sekaligus mengakhiri kekuasaan Jepang atas wilayah Korea. Pada Tanggal 15 Agustus 1948 terbentuklah dua negara baru dengan nama Republik Korea (selatan) dengan ideologi liberal di bawah pimpinan Syngman Rhee dilanjutkan pada 9 September Republik Demokratik Rakyat Korea (Utara) dengan idologi komunis berada di bawah pimpinan Kim Il Sung. Korea Utara ialah salah satu negara yang sangat percaya dan bergantung dengan kekuatan sendiri. Sebagai negara Juche Korea Utara mampu melakukan serangkaian perilaku yang menyimpang dengan ambisi dan semangat juang yang tinggi. Proxy War atau perang di mandatkan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun (25 Juni 1950 - 27 Juli 1953). Perang dimandatkan antara Amerika Serikat dan sekutunya dari Blok Barat dengan Komunis Republik Rakyat China dan Uni Soviet dari Blok Timur. Korsel yang di backup oleh Amerika dan sekutunya termasuk negara-negara Britania dan Jepang berusaha menguasai Semenanjung Korea untuk melawan kekuatan Uni Soviet dan China yang secara terang-terangan membela Korea Utara.

Amerika masuk pada 15 September 1950 di Incheon sebagai respon persiapan serangan balik terhadap kependudukan Incheon oleh Korea Utara. Kurang lebih 1.000.000 warga sipil Korea Selatan dan 2.000.000 warga sipil Korea Utara pada perang Proxy.

Demi meningkatkan keamanan pertahanan militer Korea Utara, pada tahun 1956 Korea Utara melakukan kerjasama dengan Uni Soviet dalam pelatihan program nuklir. Pada tahun 1965 ditangani pula dengan didirikannya Akademi Militer Hamhung, Dimana para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal. Kemudian Korea Utara mengembangkan produksi nuklirnya meskipun di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA).

Tahun 1969 Uni Soviet sudah memberikan rudal darat pertama kalinya dengan kemampuan mencapai sasaran 60 km, sedang pengembangannya di perkirakan tahun 1976 tepatnya menjelang perang Timur Tengah (Yom Kippur) pada 1973. Pada tahun 1984, Korea Utara melaksanakan uji coba rudal Scud-B untuk yang pertama kalinya. Hal ini membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung ke dalam Nuclear non-Proliferation Treaty (NPT) pada tanggal 12 Desember 1985. Dan Korea Utara secara resmi mengumumkan program senjata nuklirnya pada tahun 2002. Hanya berselang empat tahun kemudian tepatnya pada 9 Oktober 2006 mereka melakukan uji bom nuklir pertama dengan bom ukuran kurang dari satu kiloton, menurut Federasi ilmuwan Amerika. Pada tanggal 17 Desember 2011, Kim Jong-il meninggal dunia. Dan dilanjutkan Kim Jong Un di tahun yang sama.

Olinda L. Laimeheriwa

Kebijakan “self-reliance” secara perlahan mengalami degradasi akibat kebutuhan mendesak akan peningkatan tingkat perekonomian. Semenanjung memiliki geopolitik, ekonomi, dan militer dengan indikasi lima kekuatan militer terbesar (utamanya darat) yakni China, Rusia, Amerika, Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) sendiri, dan lintas neraca perdagangan terbesar bagi China, Jepang, Korea, Taiwan dan Singapura, serta lima negara kapabel nuklir terbesar yakni Rusia, China, Jepang, Amerika Serikat dan Korea Utara. Lengkap sudah sebutan sebagai sebagai zona terpanas didunia dan kata kuncinya cuma satu, yakni stabilitas Semenanjung.

Komandan staf gabungan Korsel-AS dan Markas Gabungan Angkatan Bersenjata Korsel kembali latihan gabungan pada 17 Agustus - 28 Agustus 2015. Latihan gabungan itu diikuti oleh 30.000 prajurit AS dan 50.000 prajurit Korsel. Bahkan latihan tersebut di pantau agen Komisi Pengawas Negara Netral (Neutral Nations Supervisory Commission) dari Swiss dan Swedia yang mengawasi pelaksanaan dan pematuhan perjanjian gencatan senjata Semenanjung Korea. Korea Utara berambisi menjadi Negara nuklir yang selanjutnya akan meningkatkan prestise dan bargaining power. Oleh karena ambisi ini, Korea utara bersama Irak, dan Iran oleh USA djuduluki sebagai “axis of evil” karena adanya anggapan bahwa ketiga Negara tersebut menyimpan ancaman sangat berbahaya bagi umat manusia. Dalam Penelitian ini ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan diantaranya :

Untuk bisa menemukan inti permasalahan dari konflik atau perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara pertama kita harus mengupas kembali pada sejarah awal pertikaian, dalam hal ini sejarah Proxy War.

Motif penyerangan bisa pembaca diketahui dengan mengurutkan kronologi-kronologi penyerangan terlebih dahulu yang dilakukan Korea Utara dalam bentang periode yang tercantum (2010-2015). Perlu kita ketahui Korea Utara meningkatkan kapabilitas militer guna untuk melindungi diri dan memperkuat pertahanan negara. Yang harus dipahami Korea Utara memusatkan perhatian pada Aspek Militer ialah salah satu cara agar tak mendapat tekanan dari negara Super Power dan mendapat pengakuan oleh negara lain. Sehingga Korea Utara mengambil sifat ofensif dan defensif.

Negara juga dikendalikan oleh pemimpinnya. Terkait Korea Utara terus bertindak agresif dikarenakan kebijakan dari pemimpin negaranya yaitu Kim Jong Un yang terus mengembangkan program nuklir. Salah satu cara agar kedua negara bersaudara ini berdamai ialah dengan diterapkannya kembali Sunshine Policy terkait proses reunifikasi Semenanjung Korea, intervensi Amerika dan Uni Soviet dikurangi. Pencabutan sanksi yang memberatkan Korea Utara dan kembali melaksanakan kerja sama. Salah satu cara agar konflik diminimalisir ialah Korea Utara berhenti melakukan provokasi dan Korea Selatan harus berhenti menggelar latihan militer bersama dengan Amerika Serikat. Membuka kembali akses kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang berbatasan dengan Korea Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. A, Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 2011.

Anak Agung Banyu, "Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia", dalam Analisis CSIS, No.1 Hal.70.

Angkasa, Krisis Semenanjung Korea: Akankah Memantik Perang Dunia Ketiga ?, Jakarta: PT MediaronaDirgantara. 2011.

Holsti K.J, Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis . Bandung : Bina Cipta 1992.

Holsti, KJ International politics: framework for Analysis, New delhi: Prentice-Hall of India. 1981.

Jackson, Robert & Georg. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Jervis, R. "Cooperation Under the Security Dilemma", World Politics vol. 30, no. 2 (1978): hlm.186–214 (Published by Cambridge University Press).

Kamasa, Frassminggi . Perang Korea (Tragedi Terbelahnya Semenanjung Korea Dalam Perang Yang Belum Selesai)". PT. Buku Seru ; Jakarta, 2016.

Plano Jack & Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional (terjemahan) Putra A. Bardin. Jakarta, 1999.

Prince A. Lobanov-Rostovsky, Russia and Assia (New York, 1933), hal 193 et seq.

Radis, Bastian, Tumbal- Tumbal Sang Diktaktor Korea Utara. PT. Agromedia Pustaka : Jakarta, 2014.

Rodee, Carlton Clymer, at all, : "Pengantar Ilmu Politik". PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2011. S. L Roy, DIPLOMASI. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 1995.

Jurnal & e - Journal :

Andrew scobe II dan John M. Sanford, 2007, North Korea's Military Threat: Pyongyang's Conventional Forces, Weapons Of Mass Destruction, And Ballistic Missiles,Strategic Studies Institute.

Anthony H. Cordesman dan AshleyHess, Excutive Summary: The Evolving Military Balancein the Korean Peninsula and Northeast Asia,Centre For Strategic and International Studies.

Ariyadi. REAKSI PEMERINTAHAN CINA TERHADAP KEPEMIMPINAN KIM JONG UN DI KOREA UTARA. Universitas Mulawarman. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (1): 25-34 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013.

Barry R. Posen. Security dilemma and ethnic conflict dari <http://www.sais-jhu.edu/cmtoolkit/pdfs/posen-1993.pdf>. Pada Tanggal 9 Juni 2016. Pukul 14:00 WITA. Diah Ayu Pratiwi. Strategi Militer. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. 2011.

Doc, Balance Of Power. Diakses dari : <http://documents.mx/download/link/balance-of-power-559796fa61290>. Pada Tanggal 16 Juni 2016. Pukul 23:34 WITA.

Olinda L. Laimeheriwa

Dwi Aryanto Diakses dari :<http://greatandre.blogspot.co.id/2011/02/balance-of-power-and-security.html> Balance of power and security. Di post Februari 2011.

Fauzan Azhima. "Program Nuklir Korea Utara serta Kebijakan PBB Terhadap Program Nuklir Korea Utara". Fisip- Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Al-Azhar Indonesia. Skripsi 2013.

Galih Wisnu Aji. Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dalam Pengembangan Senjata Nuklir . Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. 2013.

Hasibuan, Perang Korea Selatan Dan Korea Utara. Universitas Airlangga. 2011.

Jeremy Bender. "Military and Defense": <http://www.businessinsider.co.id/3-maps-that-outline-north-koreas-military-might-2016-4/?r=US&IR=T#.V36Ob2eJkwY>.

Makalah Perang Korea Utara dan Korea Selatan. Diunduh : <http://www.academia.edu>.

Ministry Of Defense ROK. North Korean Long-range Missile Survey, Diakses dari : <<http://www.ucsusa.org/assets/documents/nwgs/SK-report-on-NK-rocket-debris-analysis-translation-1-18-13.pdf>.

Prasojo, Transformasi Kompleks. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik .Universitas Indonesia. 2009.

Robert Jarvis. 2008. Cooperation Under the Security Dilemma. The Johns Hopkins University Press. Hal 41

Tania Branigan (19 December 2011). "Kim Jong-il, North Korean leader, dies". The Guardian (London). Diakses 1 Juli 2016.

Text From Doc. Yulia Sari. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Unikom. 2006.

Artikel & Media Internet :

20 alasan Korea Utara disebut Negara Diktator. Diakses dari : <http://www.sosialpower.com/2014/01/20-Alasan-Mengapa-Korea-Utara-Disebut-Negara-Diktator-Paling-Gila-di-Dunia.html>. Pada Tanggal 25 Juni 2016. Pukul 13:42 WITA.

4 Isu Nuklir Korea Utara

60 Tahun Perang Korea. Diakses dari : <https://teguhtimur.com/2010/07/04/60-tahun-perang-korea/>. Pada Tanggal 22 Juni 2016. Pukul 19:41 WITA.

Ahmad Bustomi, Kronologi Perang Korea, : <http://asianfansclub.wordpress.com/2010/11/23/kronologi-perang-korea-utara-korea-selatan/>, Pada tanggal 22 September 2015. Pukul 08:00 WITA

Asal Muasal Bom Nuklir:<http://www.jejaktapak.com/2016/02/22/bagaimana-sebenarnya-asal-muasal-korut-bisa-membuat-bom-nuklir/>. Pada Tanggal 24 Juni 2016. Pukul 11:12 WITA.

BBC Indonesia : <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/08/pasukan-korut-siaga-penuh-korsel-siap-merespon>. Pada Tanggal 29 Juni 2016. Pukul 22:23 WITA.

BBC News:http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160314_dunia_korut_tes_nuklir. Pada Tanggal 27 Juni 2016. Pukul 23:08 WITA.

Defenisi Nuklir. Diakses dari : <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-nuklir-sejarah-penemuan-dan.html>. Pada Tanggal 23 Juni 2016. Pukul 15:53 WITA.

Defenisi Senjata Nuklir dan Klarifikasinya. Diakses dari : <http://artikel-teknologi.com/definisi-senjata-nuklir-dan-klasifikasinya/>. Pada Tanggal 23 Juni 2006. Pukul 19:23 WITA.

Analisis Motif Penyerangan Rudal Balistik Korea Utara Terhadap Korea Selatan (Periode 2010-2015)

Dilemma Keamanan Dalam Hubungan Internasional, Diakses dari : <https://www.seniberpikir.com/security-dilemma-dalam-hubungan-internasional/>. Pada Tanggal Rabu 15 Juni 2016. Pukul 14:58 WITA.

Fajar Nugraha, : <http://news.okezone.com/read/2011/08/10/413/490400/korsel-korut-kembali-terlibat-baku-tembak>. Pada Tanggal 25 Juni 2016. Pukul 19:37 WITA.

Fiqarrahma Yustiazari , Pengantar Hubungan Internasional, : http://fyustiazari-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail60530Pengantar%20Hubungan%20InternasionalNational%20Interest%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html. Pada tanggal 25 Mei 2016. Pukul 12:13 WITA.

Haryono Prasodjo, Diakses dari: <http://www.haryoprasodjo.com/2013/04/konsep-national-interest.html>. Pada tanggal 30 Mei 2016. Pukul 12:01 WITA.

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_04b.htm, Buku Putih Departemen Pertahanan 2006. Pada tanggal 9 September 2015. Pukul 20:35 WITA.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130212_korea_utara_uji_nuklir. Pada Tanggal 26 Juni 2016. Pukul 17:59 WITA.

Iwan, Konsep Kepentingan Nasional, : <https://iwansmile.wordpress.com/konsep-kepentingan-nasional-national-interest/>. Pada tanggal 23 Mei 2016. Pukul 10:40 WITA.

Kepentingan Nasional Dalam Kajian HI. Diakses dari : http://daniel-rinaldo-kfisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-112302-SOH101-Kepentingan%20Nasional%20dalam%20Kajian%20Hubungan%20Internasional%20m.html.

Korea Utara punya rudal nuklir jangkau Amerika Serikat. Diakses Dari : <http://jakartagreater.com/korea-utara-punya-rudal-nuklir-yang-bisa-jangkau-amerika-serikat/>. Pada Tanggal 25 Juni 2016. Pukul 20:09 WITA.

Korut Matangkan Persiapan Uji Coba Nuklir. <http://www.dw.com/id/korut-matangkan-persiapan-uji-coba-nuklir/a-17608524>. Pada tanggal, 21 Desember Pukul 20:30 WITA.

Lady Amalia, Teori Hubungan Internasional. Diakses dari : http://ladyadaptisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-43226-Teori%20Hubungan%20Internasional-review%20week%202.html. Pada Tanggal 17 Juni 2016. Pukul 02:00 WITA.

Liputan 6 News Com. Diakses Dari: <http://global.liputan6.com/read/2016447/korea-utara-luncurkan-4-rudal-ke-laut-jepang>. Pada Tanggal 26 Juni 2016. Pukul 19:05 WITA.

Niswati, Diakses dari : <http://niswaistiqamah.blogspot.co.id/2011/04/power-and-balance-of-power.html>. Pada tanggal 17 Juni 2016. Pukul 02:45. WITA.

North Korean leader Kim Jong Un salutes during a visit to the Ministry of the People's Armed Forces on the occasion of the new year. Diakses dari : <http://jakartagreater.com/korea-utara-peringatkan-korea-selatan-dan-amerika-serikat/>. Pada Tanggal 21 Juni 2016. Pukul 22:30 WITA.

On The News, Diakses dari : http://www.kompasiana.com/nurulloh/proxy-war-duo-korea_54ff1da4a33311344450f9fe. Pada Tanggal 21 Juni 2016. Pukul 01:05 WITA.

Peluru Kendali (Rudal) : https://id.wikipedia.org/wiki/Peluru_kendali. Pada Tanggal 24 Juni 2016. Pukul 09:00 WITA.

Pengertian Proxy War. Diakses dari : <http://www.artileri.org/2015/03/proxy-war.html>. Pada Tanggal 23 Juni 2016. Pukul 10:04 WITA.

Olinda L. Laimeheriwa

See More "A-4 (V-2) rocket": <http://www.russianspaceweb.com/a4.html>. Pada Tanggal 24 Juni 2016. Pukul 08:00 WITA.

See more at: <http://lintasterkini.com/01/03/2014/untuk-pertama-kali-sejak-2009-korut-tembakkan-rudal-scud.html#sthash.idcVwvdT.dpuf>

Tempo New Com, : <https://m.tempo.co/read/news/2014/03/26/118565653/korut-dituntut-minta-maaf-dalam-tragedi-cheonan>. Pada Tanggal 25 Juni 2016. Pukul 19:06 WITA.

Tempo News : <https://m.tempo.co/read/news/2014/04/22/118572381/korsel-tuding-korut-kembali-uji-coba-nuklir>. Pada Tanggal 27 Juni 2016. Pukul 12:50 WITA.

Tempo News. :<https://m.tempo.co/read/news/2013/03/29/118470016/pesawat-siluman-as-mengudara-korut-siapkan-rudal>. Pada Tanggal 26 Juni 2016. Pukul 18:38 WITA.

Text from article... Diakses dari : <http://www.britannica.com/topic/balance-of-power>. Pada Tanggal 16 Juni 2016. Pukul 20:15 WITA.

Vioranda, Memahami Security Dilemma, Diakses dari : <http://viorandafelani.blogspot.co.id/2011/05/memahami-security-dilemma.html>. Pada Tanggal 7 Juni 2016. Pukul 19:07 WITA.

Viva News. Diakses Dari :<http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/191001-suara-artileri-terdengar-korut-menyerang>. Pada Tanggal 25 Juni 2016. Pukul 19:28 WITA.

Yeonpyeong Island: A history: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/8155486/Yeonpyeong-Island-A-history.html>, Pada Tanggal 19 September 2015. Pukul 22:00 WITA.

ANALISIS BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PERJANJIAN MINSK DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Eliyah Pra Utami HS

Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

Arief Wicaksono, S.Ip.,MA

ABSTRACT

The conflict between Russia and Ukraine that began to heat up since 2013 ago has not found a bright spot until now. Peaceful efforts have been made to de-escalate the conflict, one of them by the enactment of an agreement agreed upon by all parties involved known as the Minsk agreement but the conflict is still inevitable. The research on this thesis aims to know: How are the forms of violation of the Minsk agreement in the Russian-Ukrainian conflict and the causes of the violation occurred. The method used in this research is qualitative deksriptif method. In this research data collection techniques used by the author is the study of librarians where the authors retrieve information through the source of literature related to the object of research, and the authors conducted interviews with activists and observers of research objects. The data analysis technique used qualitative data from interviews and library sources. The findings of this research are that the Minsk agreement which was originally an attempt to reduce the Russian-Ukrainian conflict did not have a significant impact considering the rampant violations committed by the parties involved in it. These violations subsequently resulted from an unbalanced design agreement as well as a conflict of interest to be achieved on both sides and supported by external pressures posing a threat and a distrust between the two.

KataKunci: Perjanjian Minsk, Rusia, Ukraina, Konflik Rusia-Ukraina,

PENDAHLUAN

Konflik antara Rusia dan Ukraina mulai memanas sejak tahun 2013 silam. Permasalahan bermula ketika Victor Yanukovich yang saat itu menjabat sebagai presiden Ukraina menolak menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa. Keputusan Victor Yanukovich tersebut kemudian menuai kecaman dari masyarakat yang kemudian memproklamkan dirimereka sebagai "Euromaidan" yang di mana menginginkan Ukraina berintegrasi dengan Uni Eropa. Aksi protes tersebut kemudian diwarnai dengan kekerasan sehingga ketegangan di Ukraina semakin meningkat.

Konflik kemudian kembali mencuat dan menjadi lebih luas hingga ke wilayah Krimea dan Ukraina bagian Timur yang menuntut untuk memisahkan diri dari Ukraina. Rusia kemudian melakukan tindakan aneksasi ke Semenanjung Krimea mengirimkan pasukannya dengan memanfaatkan isu penggulingan Yanukovich yang kemudian menjadi konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia. Hal ini didukung dengan permintaan formal Yanukovich selaku mantan presiden Ukraina kepada Rusia agar membantu menegakkan hukum di Ukraina.²⁶

Dari kasus aneksasi Rusia terhadap semenanjung Krimea tersebut mengakibatkan timbulnya pergerakan massa pro-Rusia yang semakin massif di berbagai daerah di bagian timur Ukraina. Kemudian Kiev melancarkan aksi anti terorisme skala besar kepada para kelompok separatis pro-Rusia yang mengakibatkan konflik bersenjata dan memakan banyak korban dari kedua pihak.²⁷ Melihat semakin besarnya pertempuran yang terjadi dan konflik yang terjadi semakin meningkat, pihak barat dan Uni Eropa kemudian memberikan kecaman dan menuntut agar seluruh pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata. Pada 5 September 2014 di Mnsk, melalui perundingan panjang maka perwakilan dari Ukraina, Rusia, Donetsk People's Republik (DPR), Luhansk People's Republik (LPR) dan Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) sebagai mediator dalam pertemuan tersebut mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah

²⁶Nick Bryant, "Ukraine's Yanukovich asked for troops, Russia tells UN" BBC, <http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848>, diakses pada tanggal 2 Februari 2017 10:02

²⁷<http://blogluffyonepiece.blogspot.co.id/2015/06/makalah-konflik-ukraina.html> diakses pada 7 Februari 2017 20:30

perjanjian yang dinamakan Protokol Minsk. Di mana inti dari kesepakatan tersebut adalah agar kedua negara melakukan gencatan senjata dengan menarik semua persenjataan dan pasukan asing dari zona konflik serta OSCE selaku organisasi keamanan akan memantau dan memverifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan gencatan senjata sesuai dengan kesepakatan.

Namun tak lama setelah penandatanganan perjanjian, banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan keduanya saling menuding melanggar kesepakatan. Selanjutnya untuk menghidupkan kembali perjanjian Minsk yang telah gagal, perwakilan Ukraina, Rusia, dimediasi oleh Jerman dan Prancis dan dipantau oleh OSCE kembali mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian Minsk dan membahas langkah-langkah selanjutnya dalam meredakan konflik yang terjadi di bagian timur Ukraina. Dari pertemuan itu kemudian menghasilkan Perjanjian Minsk II yang dimana dalam kesepakatan ini OSCE akan memantau langsung dan memberi kontrol penarikan pasukan asing dari wilayah Ukraina dalam pelaksanaan gencatan senjata yang berlangsung sesuai dengan perjanjian Minsk II.²⁸

Gagalnya perjanjian Minsk I serta maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian Minsk II membuktikan bahwa perjanjian ini tidak mendeekskalasi konflik yang terjadi melainkan konflik yang terjadi semakin memanas akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi maraknya pelanggaran perjanjian Minsk adalah tekanan-tekanan pihak eksternal yang meningkatkan ketegangan diantara pihak-pihak yang bertikai sehingga menimbulkan rasa saling tidak percaya kedua pihak yang telah meratifikasi perjanjian.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deksriptif-analitik. Dimana melalui tipe penelitian ini akan menggambarkan bentuk-bentuk pelanggaran perjanjian Minsk dalam konflik Rusia-Ukraina dan akan menganalisis faktor yang menyebabkan sehingga pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Dimana data primer yakni data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara sedangkan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran beberapa literatur berupa buku dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan berupa jurnal dan generalisasi fakta-fakta yang tersebar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni telaah pustaka dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelusuran data melalui internet. Disamping itu penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan para ahli yang konsen di bidang penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak KIKE (Komunitas Indonesia untuk Kawasan Eropa). Dan adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang ditekankan pada fakta-fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perjanjian Minsk I

Pelanggaran Gencatan Senjata

Perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati oleh semua pihak-pihak yang bertikai tidak berjalan sesuai dengan yang tertera pada perjanjian tersebut. Bahkan bukannya mendeekskalasi konflik, pertempuran antara pihak separatis dan pasukan Ukraina semakin memanas dan semakin menambah daftar korban tewas dan luka-luka. Kedua belah pihak kemudian melakukan

²⁸RBTH.2015.Gencatan Senjata Berhasil Dicapai Di Minsk. Diakses dari http://indonesia.rbth.com/politics/2015/02/13/gencatan_senjata_berhasil_dicapai_di_minsk_pakar_perdamaian_kini_berg_26845.htm diakses pada 6 Februari 2017

aksi saling tuding sebagai pelaku yang melanggar isi dari perjanjian Minsk yang telah disepakati. Pertempuran dan aksi saling serang antara pihak-pihak yang bertikai terus terjadi meskipun perjanjian gencatan senjata telah disepakati dan mulai diberlakukan. Terbukti dengan terjadinya pertempuran di bandara Donetsk dimana separatistis pro-Rusia menggunakan peluncur roket ke arah pasukan Ukraina. Selain itu peluncur roket juga digunakan untuk menghancurkan pos keamanan pasukan Ukraina di Mariupol.²⁹ Pihak Ukraina juga menuding Rusia memfasilitasi massa separatistis dalam hal persenjataan untuk digunakan menyerang Ukraina. Sedangkan dari pihak separatistis mengatakan bahwa pasukan Ukraina bersenjata Ingkap memasuki wilayah Telmonovo, yang kemudian mengakibatkan aksi saling tembak dan pasukan Ukraina berhasil menguasai kembali wilayah tersebut.³⁰

Pemilihan Umum di wilayah Donetsk dan Luhansk

Pelanggaran juga dilakukan oleh separatistis di wilayah Donetsk dan Luhansk dengan mengadakan pemilihan umum yang kemudian dari hasil pemilu tersebut menjadikan mantan teknisi yang beralih menjadi pemimpin pemberontak, Alexander Zakharchenko sebagai kepala DPR dengan 79%suara, dan Igor Plotnitsky yang merupakan mantan anggota militer Uni Soviet menjadi kepala LPR. Hal ini sangat bertentangan dengan kesepakatan dalam perjanjian Minsk karena di dalam perjanjian bahwa pemilihan lokal di dua wilayah dengan otonomi khusus tersebut harus berdasarkan hukum Ukraina dan akan digelar pada Desember 2014.pemberontak menolak hal tersebut dan melaksanakan pemilihan lokal pada bulan Oktober 2014 tanpa berlandaskan hukum Ukraina. Berdasarkan hasil laporan dari OSCE, Rusia memberikaan dukungan penuh terhadap pemilihan ini.³¹

Selain melanggar karena tidak sesuai dengan hukum Ukraina, saat pemilu berlangsung tank-tank dan senjata berat ditempatkan di lokasi pemilihan. Hal ini kemudian memberikan ancaman kepada pihak Ukraina dan pemberontakan kembali terjadi. Warga di kedua wilayah di timur Ukraina itu tidak punya pilihan, sebab tidak ada persaingan politik. Dengan dukungan Rusia, kelompok tersebut boleh dikatakan dalam semalam merebut kekuasaan. Ratusan ribu warga tidak dapat ikut memilih, karena diusir atau mengungsi dari kawasan perang. Tidak ada daftar pemilih yang sah, hingga mencoblos berkali-kali amat mudah dilakukan. Juga pencoblosan lewat internet yang dibuka selama beberapa hari, tidak bisa diverifikasi oleh pihak independen. Banyak warga yang terpaksa datang ke bilik pemilihan, karena di tempat pemilihan dibagikan bahan pangan.³² Pemilihan lokal yang dilaksanakan dengan tidak adil dan penuh tekanan ini menjadi salah satu faktor yang semakin meningkatkan konflik diantara kedua belah pihak.

Maraknya pelanggaran yang terus terjadi danjumlah korban yang semakin meningkat, maka pada akhir Januari 2015 perjanjian Minsk I kemudian dinyatakan gagal. Sebagaimana yang telah tertera dalam Konvensi Wina yang membahas tentang indikator gagalnya suatu perjanjian internasional apabila selama diberlakukannya perjanjian terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Bentuk Pelanggaran Perjanjian Minsk II

Pelanggaran Gencatan Senjata

Beberapa saat setelah diberlakukannya perjanjian Minsk II aksi tembak menembak kembali berlangsung.Sekitar 430 pasukan Ukraina tewas sejak Maret sampai Oktober 2015, termasuk 54 orang tewas di periode September sampai Oktober yang dapat dikatakan periode yang relatif lebih tenang dari yang lain.

²⁹Unian.2014.Militants Destroyed Strengthen Battalion "Azov" and Border Guards From Novoazovsk. Diakses dari <http://www.unian.net/politics/959327-boeviki-unichtojili-peredovoy-blokspot-azova-v-20-km-ot-mariupolya.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2017

³⁰Prvda.2014.Ukrainian Army Liberated Telmanovo. Diakses dari <http://web.archive.org/web/20150718112750/http://kpravda.com/ukrainskaya-armiya-osvobodila-telmanovo> diakses pada tanggal 12 Mei 2017

Eliyah Pra Utami HS

Berdasarkan laporan dari OSCE pihak separatis yang di back up oleh Rusia mulai menyerang kota Debaltseve dan berhasil menarik mundur pasukan Ukraina yang menguasai tempat tersebut lima hari tepat setelah gencatan senjata diberlakukan. Debaltseve menjadi daerah yang sangat dibutuhkan oleh separatis karena merupakan pusat transportasi utama di Donbass dan semua jalur kereta listrik menuju Donetsk dan Luhansk yang merupakan tempat separatis melewati Debaltseve.³³ Hal ini kemudian menjadi jalur bagi Rusia untuk memasok pasukan kewilayah Donetsk dan Luhansk dengan cepat. OSCE juga melaporkan salah satu pelanggaran senjata terbesar yang dilakukan oleh Rusia adalah pertempuran Maryinka pada bulan Juni 2015. Di mana para separatis melakukan serangan besar ke kota yang dikuasai oleh Ukraina ini dengan menggunakan senjata berat sehingga pasukan Ukraina kemudian membalas serangan tersebut dengan menggunakan artileri berat.

Penarikan Senjata Berat belum Dilaksanakan

Intensifikasi berkala dari pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut menunjukkan bahwa senjata berat terus digunakan. Sedangkan dalam perjanjian Minsk II telah disepakati untuk menarik semua senjata berat dari kedua sisi dan membuat zona penyangga seluas 50 sampai 140 kilometer dari batas kontak. Namun pada kenyataannya berdasarkan laporan dari OSCE, beberapa senjata berat dan senjata baru yang telah dimodifikasi yang hanya diproduksi oleh Rusia ditempatkan di dekat batas kontak seperti tank, IFVs dan howitzer.³⁴

Hal ini terus berlanjut hingga Februari 2017 terjadi pelanggaran besar-besaran di area yang bukan di bawah kontrol pemerintah dimana dari hasil pantauan OSCE ditemukan senjata berat berupa stasionari tank (T-64) di Lyman, 4 howitzer (D-20) di sekitar wilayah Luhansk dan juga terdapat pesawat tak berawak disekitar daerah dibawah kontrol pemerintah yaitu Aslanove.³⁵ Dengan maraknya senjata-senjata berat yang asih berea di batas yang telah disepakati dalam perjanjian Minsk II kemudian semakin meningkatkan tensi dari kedua belah pihak karena merasa terancam dengan adanya hal tersebut.

Pemilihan Umum 2015 di Donetsk dan Luhansk

Berdasarkan kesepakatan Minsk II bahwa harus diadakannya pemilihan lokal diwilayah dengan otonomi khusus yaitu Donetsk dan Luhansk tetapi tetap berdasarkan hukum Ukraina dan tetap dalam standar dan pengawasan OSCE serta setiap pihak-pihak yang terlibat harus menyampaikan aspirasi melalui dialog karena dari hasil pemilu ini diharapkan akan meredam konflik yang terjadi. Pemimpin Donetsk dan Luhansk kemudian mengeluarkan dekrit untuk menggelar pemilu pada November 2015.

Namun hal ini kemudian melanggar karena berdasarkan perjanjian Minsk II pemberlakuan status khusus itu baru bisa berlaku setelah pemilu dilaksanakan dan penyelenggara pemilu harus ditentukan oleh pemerintah Ukraina. Pemerintah Ukraina juga tidak bisa mengawasi jalannya pemilu di wilayah tersebut karena permasalahan keamanan bahkan OSCE dan pengamat internasional tidak diizinkan untuk meliput pemilu tersebut terbukti dengan dihancurkannya drone milik OSCE oleh pasukan separatis. Selain itu pada pemilu 2016 ini sangat jauh dari kata aman adil dan terbuka yang sesuai dengan hukum Ukraina, terbukti dengan selain tidak diizinkan partai-partai Ukraina untuk berpartisipasi, sejak awal kelompok militan pro-Rusia juga mengancam barang siapa warga yang tidak pergi memilih, harus memperhitungkan konsekuensi pribadi maupun di tempat kerja.

³¹ SMM by OSCE, 2015, Ongoing Violations of International Law and Defiance of OSCE Principles and Commitments by the Russian Federation in Ukraine. Diakses dari <http://www.osce.org/pc/197646/html> diakses pada tanggal 23 Juli 2017

³² DW, 2014. Pemilihan Lokal di Ukraina Timur. Diakses dari <http://www.dw.com/id/pemilu-abal-abal-di-ukraina-timur/a-18036202> diakses pada 23 Juli 2017

³³ EuromaidanPress. 2015. The Minsk Agreement-danger for Ukraine. Diakses dari <http://euromaidanpress.com/2015/02/13/the-minsk-agreement-dangers-for-ukraine/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017

Kontrol penuh atas perbatasan tidak terealisasikan

Dalam pasal 9 perjanjian Minsk II telah ditetapkan bahwa Ukraina akan mengambil alih kontrol penuh atas perbatasan yang berjarak 500 kilometer dari Rusia sehari setelah pemilu lokal dilaksanakan. Namun hingga 2016 Ukraina belum mendapatkan kembali kendali atas jalur perbatasan bahkan kontrol perbatasan masih berada ditangan separatis dan Rusia.³⁴ Hal ini kemudian yang menjadi pelanggaran utama yang mengakibatkan pertempuran terus terjadi karena Rusia gencar memasok pasukan dan senjata kepada para militan melalui perbatasan yang tidak dikontrol oleh pemerintah Ukraina ini.

Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan

Dalam pasal 7 perjanjian telah disepakati untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan khususnya kepada masyarakat sipil yang membutuhkan sesuai dengan mekanisme internasional. Hal ini kemudian tidak sesuai yang terjadi di lapangan karena situasi dengan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah penduduk tidak stabil, pertama-tama karena masalah organisasi kemanusiaan internasional saat memperoleh akreditasi dari "republik" separatis untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut. Masalah lain adalah bahwa ada banyak kasus yang dilaporkan saat bantuan kemanusiaan tidak diberikan secara gratis namun dijual di wilayah-wilayah pendudukan. Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan seperti ini sudah tidak sesuai dengan mekanisme internasional sehingga melanggar perjanjian Minsk.

Faktor Penyebab Pelanggaran Perjanjian Minsk

Benturan Kepentingan Ukraina-Rusia dan Power yang Tidak Berimbang

Dalam konflik yang terjadi antara Ukraina-Rusia di mana dalam hal ini kepentingan Rusia di wilayah Ukraina sangat besar. Salah satu wilayah Ukraina yakni Krimea yang kini telah berhasil diambil alih oleh Rusia setelah melakukan aneksasi di wilayah tersebut merupakan salah satu alasan Rusia melakukan intervensi. Selain untuk melindungi etnis Rusia yang ada di wilayah Ukraina pasca kudeta Victor Yanukovich, di wilayah Krimea terdapat Armada Laut Hitam yang menjadi pangkalan armada laut Rusia. Disamping itu wilayah laut hitam juga sedang hangat diperbincangkan oleh dunia internasional karena menyimpan sumber energi yang besar. Karena kepentingan nasional yang ingin dicapai, Rusia kemudian terus mendukung dan memfasilitasi para separatis di wilayah Krimea dengan memberikan bantuan berupa persenjataan dan tank-tank serta mengirimkan pasukan militernya. Rusia juga kemudian gencar mendukung Krimea untuk mengadakan referendum untuk memisahkan diri dari Ukraina.

Selain untuk menguasai armada laut hitam yang ada di Krimea, kepentingan Rusia atas Ukraina yakni untuk menyatukan kembali negara pecahan Uni Soviet dibawah federasi Rusia guna untuk membendung pengaruh barat yang mulai masuk ke dalam Ukraina. Oleh karena itu, setelah sukses melalui aneksasi Krimea, Rusia kemudian kembali melakukan intervensi dan mendukung para separatis yang pergerakan massanya mulai merembes sampai ke wilayah Ukraina Timur. Di sisi lain Ukraina juga memiliki kepentingan yang sangat vital karena akibat dari konflik ini salah satu wilayah strategisnya jatuh ke tangan Rusia. Bahkan setelah Krimea berhasil dikuasai oleh Rusia pihak separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk juga melakukan demonstrasi besar-besaran untuk melakukan referendum dan memisahkan diri dari Ukraina. Ukraina kemudian melakukan segala cara untuk mempertahankan agar tidak kehilangan wilayahnya lagi seperti yang terjadi pada Krimea. Dengan melihat intervensi Rusia di wilayah Donbass yang semakin gencar membuat Ukraina merasa terancam dan mengirimkan pasukan antiterornya meskipun perjanjian damai telah disepakati.

³⁴U.S Mission to OSCE. 2016. Russia's Ongoing Violations In Ukraine. Diakses dari <https://osce.usmission.gov/russias-ongoing-violations-ukraine-statement-pc-4-2/> diakses pada tanggal 3 Juli 2017

³⁵Unian. 2017. OSCE announce lack of information regarding withdrawal of weapons near Avdiyivka. Diakses dari <https://www.unian.info/war/1768802-osce-announces-lack-of-information-regarding-withdrawal-of-weapons-near-avdiyivka.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

³⁶Robert Golanski. 2016. One Year After Minsk II: Consequences and Progress. Hal.71. diakses dari <https://link.springer.com/article/10.1007/512290-016-0398-2> diakses pada tanggal 21 Agustus 2017

Disamping karena benturan kepentingan di antara kedua belah pihak, masalah power juga menjadi alasan utama perjanjian Minsk kemudian tidak efektif dan terus dilanggar. Menurut Hans.J.Morgenthau kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan pencapaian power atau kekuasaan suatu negara. Dalam realisme kepentingan didasari akan suatu power yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung agar mendapatkan pengakuan dunia.³⁷

Dalam konflik ini, power yang dimiliki Ukraina tidak sebanding dengan power yang dimiliki Rusia. Tidak hanya hard power yang berupa kapabilitas militer tetapi Rusia juga memiliki soft power yang besar sehingga Rusia gencar memberikan ancaman, tekanan serta mendukung massa separatistis yang ada di Ukraina untuk memisahkan diri yang dimana menurut Hans Morgenthau bahwa tindakan tersebut itu merupakan sesuatu yang rasional karena terkadang suatu negara mengabaikan peranan moral dalam bertindak guna mencapai kepentingan nasionalnya.

Aksi intervensi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina kemudian banyak menuai kecaman dan sanksi ekonomi dari dunia internasional seperti NATO, Uni Eropa dan Amerika Serikat agar Rusia menghentikan aksinya dalam mendukung pihak separatistis. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Rusia dan terus gencar melakukan aksi guna mencapai kepentingannya untuk memisahkan Donetsk dan Luhansk dari Ukraina agar berintegrasi dengan Rusia. Dalam realisme hal ini membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan tertinggi di atas negara.

Rusia malah menanggapi sanksi dan kecaman yang diberikan oleh dunia internasional dengan mengancam akan melakukan langkah balasan terhadap Uni Eropa dengan menutup ruang udaranya untuk semua penerbangan dari Eropa ke Asia. Menanggapi hal ini Rusia juga menggunakan soft power yang dimiliki yakni dengan mengadakan gas weapon mengingat Rusia adalah eksportir gas terbesar dunia. Tidak hanya mengurangi suplai gas yang jalur pipa gasnya melewati Ukraina, Rusia juga mulai mengurangi pasokan gas ke Polandia, Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Pasokan gas Rusia ke Polandia mendadak berkurang 50% , Austria mendapatkan 15% lebih sedikit dari sebelumnya. Pengurangan pasokan gas dari Rusia ini sangat memberikan dampak yang sangat signifikan khususnya bagi negara-negara Eropa yang notabenehnya adalah negara-negara industri yang sangat bergantung terhadap impor gas Rusia.

Sikap dari Rusia ini menurut Morgenthau ada sebuah tindakan self-interest dan self-help demi mencapai kepentingannya, hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor ketidakefektifan perjanjian Minsk dan maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalamnya.

Desain Perjanjian yang Tidak Berimbang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama seorang peneliti Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada dan juga sebagai penggiat Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa, Nurhawira Gigi Pramono menjelaskan bahwa ketidakefektifan perjanjian Minsk serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disebabkan karena desain perjanjian yang tidak berimbang. Menurutnya meskipun perjanjian ini telah disepakati oleh Ukraina, Rusia, DNR dan LNR serta OSCE sebagai mediator, komitmen politik terbesar dibebankan kepada Ukraina sebagaimana contohnya dalam pasal 11 perjanjian, dimana Ukraina dituntut untuk melakukan reformasi konstitusi dan memberikan hak otonomi khusus wilayah Donetsk dan Luhansk. Reformasi konstitusi dan hak otonomi khusus untuk wilayah Donetsk dan Luhansk ini secara tidak langsung memungkinkan Ukraina untuk kehilangan wilayah tersebut. Dengan diberlakukannya otonomi khusus tersebut semakin memberikan kesempatan kepada Rusia untuk memegang kendali terhadap separatistis yang telah dilegitimasi dan Rusia juga akan memiliki pasukan legal di Ukraina yang secara tidak langsung menjadikannya lebih mudah untuk menyerang Ukraina.

³⁷John Baylis and Steve Smith, *opc.it*, hal 142

Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perjanjian Minsk Dalam Konflik Rusia-Ukraina

Di samping itu akibat dari otonomi khusus ini hingga saat ini parlemen Ukraina belum sepenuhnya mengimplementasikan kesepakatan ini. Aksi dari Ukraina ini kemudian menuai banyak tekanan dari pihak Barat dan Uni Eropa yang kemudian membuat Ukraina semakin terpojok. Reformasi konstitusi ini dianggap sebagai upaya terpenting dalam menciptakan perdamaian di Ukraina.

Selain itu pada pasal 8 perjanjian Minsk disepakati bahwa Ukraina mengambil kontrol penuh perbatasan mulai berlaku akhir tahun 2015 sehari setelah pemilihan lokal di Donbass dilaksanakan. Hal ini kemudian sangat merugikan bagi pihak Ukraina karena sampai kontrol penuh perbatasan diambil alih oleh Ukraina maka perbatasannya tetap dikendalikan oleh pihak separatistis. Dengan kondisi perbatasan yang tidak terkendali mengakibatkan pihak separatistis lebih leluasa menerima pasokan persenjataan dari Rusia serta mudahnya akses tentara bayaran Rusia masuk ke Donbass.

Desain perjanjian yang juga tidak berimbang dapat terlihat dengan adanya kesepakatan untuk menjamin amnesti bagi separatistis. Berdasarkan perjanjian telah disepakati bahwa penuntutan dan penghukuman orang-orang yang terkait dengan kejadian di wilayah Donbass khususnya Donetsk dan Luhansk dilarang.³⁸ Perjanjian ini menuntut Ukraina untuk membebaskan pihak separatistis yang telah terlibat tindakan terorisme, pembunuhan dan pemerkosaan. Hal ini memberatkan bagi Ukraina karena sejalan dan menerapkan praktik internasional dan ketentuan-ketentuan dari Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1949 dalam mengatasi konflik bersenjata yang menyatakan bahwa kejahatan berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah masalah amnesti.

Hal ini juga relevan dengan prespektif realis di mana negara yang memiliki power yang lebih kecil akan tunduk dengan negara yang memiliki power yang lebih besar. Dalam kasus ini dimana Ukraina yang notabeneanya memiliki power yang jauh lebih kecil di banding Rusia harus menerima perjanjian tersebut walaupun pada hakekatnya desain perjanjian tersebut tidak berimbang dan secara tidak langsung bisa menyebabkan Ukraina akan kehilangan lebih banyak wilayahnya. Meskipun pada dasarnya perjanjian Minsk merupakan hasil dari perundingan negara-negara terkait yang di dalamnya merupakan aspirasi dari tiap-tiap negara.

Menurut Nurhawirah Gigi Pramono selaku salah satu narasumber dalam penelitian ini selama Ukraina tidak berkomitmen untuk melakukan desentralisasi di kedua wilayah tersebut maka sulit untuk mengharapkan situasi damai tercipta di Ukraina. Sejauh ini beberapa reformasi politik sudah dilakukan oleh Ukraina, tetapi tidak menyentuh wilayah Donetsk dan Luhansk secara spesifik. Bagi Ukraina reformasi politik akan dilakukan apabila gencatan senjata dilaksanakan sepenuhnya. Tetapi sebaliknya bagi kelompok separatistis pro-Rusia, proses gencatan senjata dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila reformasi politik dijalankan di Donetsk dan Luhansk. Hak tarik ulur seperti inilah kemudian yang menyulitkan proses implementasi Perjanjian Minsk dan pelanggaran yang gencar dilakukan.

Tekanan Eksternal yang Menimbulkan Ketidakpercayaan

Faktor yang juga sangat mempengaruhi maraknya pelanggaran dalam perjanjian Minsk adalah besarnya tekanan dari pihak-pihak eksternal. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Nurhawirah Gigi Pramono bahwa komitmen politik yang tidak dipenuhi oleh pihak Ukraina ini diiringi pula dengan tekanan dan keterlibatan pihak-pihak eksternal yang kemudian mengekskalasi konflik dan menimbulkan ketidakpercayaan antar pihak-pihak yang bertikai.

Aksi intervensi Rusia dengan memfasilitasi pihak separatistis dengan perlengkapan militer kemudian menuai banyak kecaman khususnya dari pihak Amerika Serikat, Uni Eropa dan NATO terbukti dengan banyaknya sanksi yang diberikan kepada Rusia.

³⁸EuromaidanPress. 2015. The Minsk Agreement-danger for Ukraine. Diakses dari <http://euromaidanpress.com/2015/02/13/the-minsk-agreement-dangers-for-ukraine/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017

Amerika Serikat menilai bahwa tindakan Rusia telah merusak proses demokrasi dan institusi di Ukraina, mengancam perdamaian, keamanan, stabilitas kedaulatan dan integritas wilayah.³⁹ AS kemudian menjatuhkan sanksi atas tindakan intervensi Rusia tersebut. Dengan maraknya intervensi Rusia di Ukraina meskipun perjanjian gencatan senjata telah diberlakukan, Amerika Serikat kemudian mengambil langkah dengan bekerjasama dengan Ukraina dalam proses transaksi militer.⁴⁰

Uni Eropa juga turut memberikan sanksi namun sanksi yang diberikan Uni Eropa tidak untuk menghukum tetapi didesain untuk mengubah kebijakan atau aktifitas suatu negara, badan ataupun individu yang dikenai sanksi. Uni Eropa juga berusaha meminimalisir konsekuensi dari penerapan sanksi terhadap masyarakat sipil ataupun kegiatan-kegiatan yang resmi yakni dalam bentuk sanksi ekonomi berupa larangan ekspor teknologi tinggi untuk industri minyak dan gas. Uni Eropa juga melarang negara anggota melakukan transaksi saham dan keuangan dengan perusahaan dan bank-bank milik pemerintah Rusia. Hal itu praktis berarti, perbankan Rusia tidak bisa masuk lagi ke pasar uang Eropa.⁴¹ Dalam prespektif realisme menurut Hans Morgenthau, kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain pasti berbeda, hal ini tergantung dari national interest negara tersebut terhadap negara yang dituju. Dalam hal ini Amerika berkepentingan untuk memperluas pengaruhnya di bidang produksi pangan, teknologi dan sistem ekonomi liberal kapitalis ke Ukraina dengan mengatasnamakan hak asasi manusia guna melakukan ekspansi di Ukraina dengan isu Euromaidan sebagai benteng pertahanan dalam politik luar negerinya.

Tekanan-tekanan dan intervensi dari luar semacam ini kemudian menjadi pemicu eskalasi konflik dan menimbulkan ketidakpercayaan pihak-pihak terkait dalam mematuhi perjanjian damai yang telah disepakati. Kedua belah pihak merasa terancam dengan adanya intervensi eksternal tersebut sehingga pelanggaran-pelanggaran perjanjian dan aksi saling tuding melakukan pelanggaran terlebih dahulu gencar dilakukan.

Ancaman yang dihasilkan akibat tekanan eksternal tersebut kemudian memicu pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan aksi untuk membela diri salah satunya yang terjadi di Ukraina dengan penggunaan kekuatan bersenjata oleh kedua belah pihak yang bertentangan dengan perjanjian Minsk. Hak atas beladiri merupakan hak yang melekat pada sebuah negara yang berdaulat sehingga ketika suatu negara merasa terancam maka negara tersebut akan berusaha untuk melindungi negaranya dengan cara apapun. Hal ini kemudian relevan dengan prespektif realisme menurut Hans Morgenthau yang mengatakan bahwa negara sebagai aktor utama lebih cenderung mengabaikan peranan moral dalam menjalankan politik praktis dalam hal ini adalah upaya melindungi diri dari ancaman. Setiap negara memiliki pandangan moral yang berbeda-beda. Apa yang dianggap baik oleh suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh separatist pro-Rusia yang melakukan aksi hingga melanggar gencatan senjata karena merasa terancam dan tidak percaya terhadap pihak Ukraina yang terus mendapat dukungan dari pihak Barat dan begitupula sebaliknya sehingga aksi saling tuding melakukan pelanggaran terlebih dahulu gencar terjadi.

Selain dinilai mengancam perdamaian, tekanan-tekanan dan intervensi eksternal dari berbagai pihak khususnya negara-negara adikuasa tidak terlepas dari kepentingan politik. Ukraina dalam hal ini secara politis adalah kawasan strategis yang menjadi wilayah persaingan antar linkup maritim dan kontinental. Ukraina dianggap sebagai sabuk pemisah (shatterbelt) yang menjadi wilayah persaingan antara beberapa major power yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, NATO dan Rusia. Ukraina juga menjadi wilayah yang seimbang bagi kekuatan yang bersaing di dalamnya khususnya yang berasal dari lingkup geostrategis yang berbeda karena berdasarkan sensus Ukraina barat ditempati oleh masyarakat yang pro-Barat sedangkan Ukraina timur ditempati oleh masyarakat yang pro-Rusia. Dengan kata lain dalam wilayah ini menjadikan kekuatan besar eksternal (Barat) sebagai intrusiv power dan kekuatan besar regional (Rusia) sebagai penyeimbang.

³⁹ Mega Berahim. 2015. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Krisis Ukraina. Hal.3, https://www.academia.edu/11315815/Kebijakan_Luar_Negeri_AS_terhadap_Krisis_Ukraina diakses pada tanggal 2 Agustus 2017

⁴⁰ Business Insider. 2017. Some US military gear could be 'Made in Ukraine' under new defense deals. Diakses dari <http://www.businessinsider.com/r-us-army-gear-could-be-made-in-ukraine-under-new-defence-deals-2017-6/?IR=T> diakses pada 5 Agustus 2017

⁴¹ Dewi Mentari Siregar. 2017. Efektivitas Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia dalam Kasus Aneksasi Krimea. Hal.6,

PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian Minsk yang sebelumnya menjadi harapan untuk meredam konflik tidak memberikan pengaruh yang sangat signifikan khususnya kepada pihak-pihak yang bertikai terbukti dengan pertempuran yang semakin mengeskalasi konflik Rusia-Ukraina tersebut. Meskipun perjanjian Minsk dibuat dan disepakati oleh seluruh pihak-pihak yang bertikai, namun pelanggaran-pelanggaran perjanjian gencar dilakukan. Adapun pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian Minsk adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran gencatan senjata
2. Penarikan senjata berat belum dilaksanakan sehingga menimbulkan ancaman bagi pihak lawan
3. Pemilihan umum di wilayah berotonomi khusus yaitu Donetsk dan Luhansk yang tidak sesuai dengan isi perjanjian
4. Kontrol atas perbatasan yang seharusnya berada dibawah naungan pemerintah Ukraina belum terealisasikan
5. Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan yang Selain bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian Minsk I dan II penulis juga mencoba menganalisis faktor yang mempengaruhi sehingga maraknya pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian Minsk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

1. Benturan kepentingan dan power yang tidak berimbang
2. Desain perjanjian yang tidak berimbang di mana komitmen politik terbesar dibebankan oleh pihak Ukraina
3. Tekanan pihak-pihak eksternal yang kemudian mengeskalasi konflik dan menimbulkan ketidakpercayaan antar pihak-pihak yang bertikai. Pelanggaran-pelanggaran perjanjian Minsk ini kemudian membuktikan bahwa perjanjian ini tidak efektif dalam meredam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tarik ulur pandangan dari kedua belah pihak juga menyulitkan proses implementasi perjanjian Minsk.

Saran

Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus kepada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian Minsk dan juga peneliti mencoba menganalisis faktor-faktor yang kemudian menjadi pemicu sehingga pelanggaran tersebut marak dilakukan. Dalam mengkaji tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini selain faktor penyebab pertempuran yang terus terjadi meskipun upaya damai telah disepakati, tanggapan dan aksi dari Euromaidan setelah adanya kesepakatan damai juga perlu untuk dikaji lebih dalam mengingat awal dari pecahnya konflik yang terjadi dipicu oleh aksi besar-besaran dari demonstran yang kemudian mengatasnamakan diri mereka sebagai Euromaidan.

Selama proses penelitian, peneliti juga menemukan fakta baru bahwa referendum Donetsk dan Luhansk untuk memisahkan diri dari Ukraina yang mengatasnamakan keinginan mayoritas penduduk merupakan klaim dari pihak separatistis saja karena sebagian besar penduduk di wilayah tersebut berdasarkan survey 2017 lebih memilih untuk tetap berintegrasi dengan Ukraina. Fakta ini kemudian penting untuk dikaji peneliti selanjutnya yang tertarik pada konflik Rusia-Ukraina agar mampu menyempurnakan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan e-book :

- Carinaes, Walter & Thomas Risse, Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, Bandung, Nusamedia, 2013
- Mauna , Boer, *Hukum Internasional "Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global"*, Bandung, P.T.Alumni, 2013
- Griffiths , Martin & Steven C. Roach, *"Fifty Key Thinkers in International Relations"*, Routledge, Canada, 2009
- Kusumaatmadja, Mochtar, S.H., LL.M., *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung-Jakarta, 1990
- Rudy, May.T, "Hukum Internasional II", PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal.123
- Sakwa, Richad & Agnieska Pikulicka, *Ukraine and Russia "People, Politics, Propaganda and Prespectives*, England, 2016, www.e-ir.info
- Steans , Jill, & Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional "Prespektif dan Tema"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Thontowi, Jawahir,SH.,Ph.D & Pranoto Iskandar, SH, "Hukum Internasional Kontemporer", PT.Rafika Aditama, Bandung, 2006

Jurnal :

- Article 42 (1) Vienna Convention on Treaty Chapter Six "Batal dan Berakhirnya Perjanjian Internasional".
- Berahim, Mega. 2015. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Krisis Ukraina. Hal.3https://www.academia.edu/11315815/Kebijakan_Luar_Negeri_AS_terhadap_Krisis_Ukraina diakses pada tanggal 2 Agustus 2017
- Candradewi, Renny, "What Russia Want for Ukraina is to consider its interes", *JurnalPhobia, Journal Issue: Vol:1/No.01/6March 2014*
- Dewan Kementrian Republik Otonom Krimea, *Regional Profile:The Autonomou Republic of Crimea*, 2013
- Dragneva , Rika -Lewers & Katryna Wolczuk, "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnationor Rivalry?" *National Security & Defence*, 2013
- Hadi Rahman, Radhitya,2016. "Aneksasi Krimea oleh Rusia"
- Kamasa , Frasinggi, "Krisis Ukraina dan Dampaknya Terhadap TataananPolitik Global dan Regional", tahun 2014
- M.Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik", *Jurnal Transnasional*, vol.3, No.2, 2012
- Muhammad, Ali, "Selamat Datang Perang Dingin!": Kepentingan Rusia di Krimea dan Ukraina Timur dan Ketegangan Hubungan dengan Barat",

Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perjanjian Minsk Dalam Konflik Rusia-Ukraina

Siregar, Dewi Mentari. 2017. *Efektivitas Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia dalam Kasus Aneksasi Krimea*. Hal.6.

Stefan Meister. 2014. *Reframing Germany's Russia Policy an Oppurtunity for the EU*, (European Council and Foreign Relations).

Artikel Internet

Alexey Lossan, "Putin: Rusia Siap Akui Pemilu Ukraina" RBTH Indonesia, http://indonesia.rbth.com/politics/2014/05/28/putin_rusia_siap_akui_pemilu_ukraina_23923.html,

BBC. 2014. *Ukraine: Pro-Russians Storm Offices in Donetsk, Luhansk, Kharkiv*. <http://www.bbc.com/news/world-europe-26910210>

BBC. 2014. *Ukraine Says Donetsk 'Anti-Terror Operation' Under Way*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-Europe/27035196>

BBC. 2015. *Ukraine Crisis: Leaders Agree Peace Roadmap*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-eurpe-31435812>

Business Insider. 2017. *Some US military gear could be 'Made in Ukraine' under new defense deals*. Diakses dari <http://www.businessinsider.com/r-us-army-gear-could-be-made-in-ukraine-under-new-defence-deals-2017-6/?IR=T>

DW, 2014. *Pemilihan Lokal di Ukraina Timur*. Diakses dari <http://www.dw.com/id/pemilu-abal-abal-di-ukraina-timur/a-18036202>

Euromaidan Press. 2016. *12 Month of Minsk-2, Examining a Year of Violation*. Diakses dari <http://euromaidanpress.com/2016/02/13/12-months-of-minsk-2-looking-back-at-a-year-of-violations/#arvlbdata>

EuromaidanPress. 2015. *The Minsk Agreement-danger for Ukraine*. Diakses dari <http://euromaidanpress.com/2015/02/13/the-minsk-agreement-dangers-for-ukraine/>

Interfax. 2014. *Luhansk Prosecutors Launch Probes Into Federalizationa Support Rallies*. Diakses dari <http://en.interfax.com.ua/news/general/201534.html>

Jakarta Gear, 2014, *Krisis Ukraina-Rusia*. www.JakartaGear.com/KrisisUkraina-Rusia/

Nick Bryant, "Ukraine's Yanukovich asked for troops, Russia tells UN" BBC, <http://www.bbc.com/news/world-europe-26427848>

Oleksandr V. Thurcynov. 2014. "Kiev's Messages to Mosow, Ukraine's President Rebuff Russian Imperialism" <http://www.nytime.com/2014/03/12/ukraine/president/rebuffs/russian/imperialism.html>.

Pikulicka, Agnieszka & Richard Sakwa, "Ukraine and Russia : People, Politics, Propaganda, and Prespectives",

Public Opinion Survey Residents of the Autonomous Republic of Crimea May 16 – 30, 2013, diakses dari <http://www.iri.org/sites/default/files/2013-October-7-Survey-of-Crimean-Public-Opinion,-May-16-30-2013.pdf>

- Prvda. 2014. *Ukrainan Army Liberated Telmanovo*. Diakses dari <http://web.archive.org/web/20150718112750/http://kpravda.com/ukrainskaya-armiya-osvobodila-telmanovo>
- Radio Suara Vietnam. 2014. Demonstrasi di Provinsi-Provinsi Ukraina Timur untuk menuntut diadakannya Referendum. <http://vovworld.vn/id-id/Berita/Demonstrasi-di-provinsiprovinsi-Ukraina-Timur-untuk-menuntut-diadakannya-referendum/221508.vov>
- Robert Golanski. 2016. *One Year After Minsk II: Consequences and Progress*. Hal.71. diakses dari <https://link.springer.com/article/10.1007/512290-016-0398-2>
- RT, "Kiev allow police to use firearms, demand armed rioters lay down weapons", <http://rt.com/news/ukraine-kiev-firearms-weapons-police-934/>
- SMM by OSCE, 2015, *Ongoing Violations of International Law and Defiance of OSCE Principles and Commitments by the Russian Federation in Ukraine*. Diakses dari <http://www.osce.org/pc/197646/html>
- Telegraph. 2014. *Kiev and Separatists Accuse Each Other of Breaking Ukraine Ceasefire as West Lines up Russia Sanctions*. Diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/eurpe/ukraine/11078954/Ukraine-truce-takes-hold-as-West-lines-up-Russia-sanction.html>
- Telegraph. 2015. *Revealed: How Ukraine Conflict Has Claimed 6,400 Lives*. Diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11363291/Revealed-how-Ukraine-conflict-has-claimed-5000-lives.html>
- Ukrinform. 2014. *Millitans Shell Ukrainian Army Positions Ten Times After Casefire*. Diakses dari http://www.ukrinform.net/rubric-crime/1704402/millitans_shell_ukrainan_army_positions_ten_times_after_ceasefire_325949.html
- Unian. 2014. *Millitans Destroyed Strengthen Battalion "Azov" and Border Guards From Novoazovsk*. Diakses dari <http://www.unian.net/politics/959327-boeviki-unichtojili-peredovoy-blokspot-azova-v-20-km-ot-mariupolya.html>
- Unian. 2017. *OSCE announce lack of information regarding withdrawal of weapons near Avdiyivka*. Diakses dari <https://www.unian.info/war/1768802-osce-announces-lack-of-information-regarding-withdrawal-of-weapons-near-avdiyivka.html>
- U.S Mission to OSCE. 2016. *Russia's Ongoing Violations In Ukraine*. Diakses dari <https://osce.usmission.gov/russias-ongoing-violations-ukraine-statement-pc-4-2/>
- Vovworld. 2016. *OSCE: Senjata Berat Muncul di Ukraina Timur*. Diakses dari <http://vovworld.vn/id-ID/berita/osce-senjata-berat-muncul-di-ukraina-timur-462780.vov>
- <http://blogluffyonepiece.blogspot.co.id/2015/06/makalah-konflik-ukraina.html>
- http://www.cnnindonesia.com/inter_nasional/20141113160124-134-11343/gencatan-senjata-di-ukraina-timur-berakhir/
- http://indonesia.rbth.com/politics/2015/02/13/gencatan_senjata_berhasil_dicapai_di_minsk_pakar_perdamaian_kini_berg_26845.htm

Analisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perjanjian Minsk Dalam Konflik Rusia-Ukraina

http://syaichuhamid.blogspot.co.id/2012/07/hukumperjanjianinternasional_09.html

<http://m.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562653/Rusia-Veto-Resolusi-DK-PBB-tentangCrimea>, Maria Rita Hasugian, Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea

PENGARUH SOFT POWER RUSIA TERHADAP UKRAINA DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA

Yulita Yusuf

Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA
Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

ABSTRACT

This study aims to find out: (1) Why Rusia using soft power method at the conflict with Ukraine, (2) What type of soft power that Rusia use in the conflict. The method used in this research is descriptive qualitative. Techniques of collecting data obtained through articles, journals, books, literature review and other valid sources that related with the research. Techniques of data analyses is qualitatively from library research, internet, and university lecture. These results indicate that is true if Rusia using soft power against Ukraine in the gas severance case and Crimea case. The effectiveness of Rusia soft power is proven in gas severance case, which is Rusia can make Ukraine think twice for join in United Nation and second is in Crimea case that Rusia succeed take Crimea into Rusia territory.

Keywords : soft power, Rusia, Ukraina, United Nation, Crimea case, gas severance case, Vladimir Putin

PENDAHLUAN

Rusia adalah negara terbesar di dunia dan cukup memiliki pengaruh besar dalam lingkungan internasional. Rusia juga termasuk kedalam salah satu negara bekas Uni Soviet. Uni Soviet sendiri merupakan negara adidaya pada masa Perang Dunia II hingga akhirnya mengalami keruntuhan pada 1989 dan menghasilkan 15 negara pecahan di Eropa. 15 negara pecahan ini adalah Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraina, Belarus, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Rusia sebagai pewaris utama Uni Soviet ini.⁴²

Rusia yang merupakan penerus Uni Soviet memiliki struktur pemerintahan dan sikap yang sangat mirip dengan Uni Soviet. Mengikuti Uni Soviet, negara ini sangat memperlihatkan sisi realismenya yang menganggap siapa yang terkuat maka dialah yang menang dan berkuasa, sehingga Rusia terus memperkuat pasukan militernya meskipun zaman telah berubah. Rusia menganggap militer dan kekuatan, dengan kata lain adalah hard power, dapat membuat segala kebutuhannya terpenuhi. Ditambah lagi, Rusia yang bahkan hampir tidak pernah merasakan dan menganut yang namanya sistem demokrasi membuat negara ini semakin memiliki citra yang keras dimata dunia.

Rusia yang berdiri sendiri sejak terlepas dari Uni Soviet tidak membuat negara ini kehilangan pengaruh besarnya didunia, khususnya di Eropa tempatnya berdaulat. Dengan power yang dimilikinya, ia mampu mempengaruhi negara-negara disekitarnya terutama negara-negara yang juga pecahan Uni Soviet. Segala cara dilakukan Rusia untuk tetap membuat negara-negara ini untuk tetap terikat kepadanya. Ini terbukti dari beberapa negara bekas Uni Soviet yang sangat terikat dengan Rusia meskipun telah menyatakan kemerdekaannya sendiri. Beberapa diantaranya adalah negara-negara Eropa Timur yang notabene kesemuanya adalah negara bekas Uni Soviet.⁴³ Sejak dulu Rusia terkenal dengan kekuatan militernya yang besar dan sikapnya yang terkesan selalu menggunakan hard power. Didukung dengan penduduknya yang banyak dan luas wilayah yang sangat besar, ia mampu menunjukkan kekuatannya melalui kedua hal ini. Pangkalan-pangkalan militer tersebar di setiap wilayah di negara ini juga penduduknya yang bisa dikatakan sepemikiran dengan negaranya menambah nilai plus bagi Rusia. .

⁴²Kartika, Sejarah Negara Ukraina, <http://kartika.xyz/sejarah-dunia/sejarah-negara-ukraina/> diakses pada 10 Februari 2016 pukul 23.20 WITA

⁴³Deni Cahlam, Profil Lengkap Negara Rusia <https://www.scribd.com/doc/292131282/Profil-Lengkap-Negara-Rusia> diakses pada 11 Februari 2016 pukul 00.20 WITA

Konflik Rusia dan Ukraina merupakan konflik terbuka dan memakan korban serta berlangsung dalam waktu lama. Ukraina adalah salah satu negara yang terletak di Eropa Timur dan memiliki letak geografis yang paling dekat dengan Rusia karena berbatasan langsung. Ini menyebabkan Rusia menaruh perhatian lebih pada Ukraina. Namun masalah timbul ketika Ukraina berkeinginan untuk mengikuti jejak negara-negara lain yang juga bekas Uni Soviet untuk bergabung dengan Uni Eropa yang notabene sangat bertentangan dengan Rusia. Uni Eropa yang terus meluaskan sayapnya sampai kenegara-negara Eropa Timur berhasil mengajak tiga negara bekas Uni Soviet untuk bergabung bersamanya. Ukraina yang pada saat itu masih berusaha untuk memajukan sektor ekonominya tertarik akan visi misi Uni Eropa yang menjanjikan perbaikan ekonomi bagi negara-negara anggotanya.⁴⁴ Sejak inilah konflik kedua negara ini dimulai, tepatnya 2006 hingga sekarang. Rusia yang memiliki pengaruh kuat di Ukraina menganggap Uni Eropa adalah pengganggu. Hal ini karena Uni Eropa dapat melemahkan pengaruh Rusia yang sudah sengaja ditancapkannya kepada Ukraina melalui kerjasama-kerjasama yang telah dijalinnya dengan Ukraina. Ukraina yang terus bersikeras ingin bergabung dengan kubu Barat membuat Rusia semakin memperkeras pula sikapnya kepada Ukraina dalam menolak keinginan Ukraina ini. Konflik kedua negara ini terus terekskalasi hingga akhirnya turut melibatkan dunia internasional. Sejak 2006 telah banyak kasus-kasus konflik yang terjadi antara keduanya. Diantaranya adalah konflik keduanya ketika Rusia melakukan pemutusan pasokan gasnya untuk Ukraina dan ketika keduanya memperebutkan Crimea untuk dimasukkan kedalam teritorinya masing-masing.

Rusia yang dikenal selama ini dengan sikap keras dan agresifnya menunjukkan perubahan pada konfliknya dengan Ukraina. Ini terlihat pada saat hubungan keduanya tengah dalam kondisi kurang baik, Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin terlihat melakukan perubahan pada sikap politiknya. Kata soft power yang tidak pernah terdengar secara langsung diucapkan oleh Vladimir Putin di dunia internasional akhirnya digunakan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tepatnya pada Februari 2012 dalam artikel Putin tentang politik luar negeri yaitu :

“Russia and The Changing World”: As Putin noted, “Soft power is a set of tools and methods to achieve foreign policy goals without the use of weapons, through the use of information and other levers of influence.”⁴⁵

Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Rusia setuju dan sepemikiran dengan penggunaan soft power sebagai langkah politik luar negeri. Pernyataan Rusia yang diungkapkannya ketika tengah berkonflik dengan Ukraina ini membuatnya terlihat lebih lunak dari citranya yang selama ini telah terbangun. Sebelumnya, Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Rusia kepada negara-negara bekas Uni Soviet memang sudah terlihat sejak lama dengan terus menjalin hubungan baik antar mereka, namun Putin tidak pernah secara jelas mengatakan bahwa mereka melakukan soft power. Selama ini Rusia terus mendekati diri dengan negara-negara bekas Soviet hanya untuk membangun hubungan baik antar sesama negara Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Metode-metode yang dilakukan Rusia untuk membuat negara-negara bekas Uni Soviet tetap bergantung dengan Rusia adalah dengan memberikan beasiswa untuk pelajar luar negeri, bekerjasama dalam sektor ekonomi dan sumber daya alam, memberikan visa free untuk para tenaga kerja dengan negara tetangga, selain itu juga dengan terus menekankan kedekatan kultural dengan negara-negara bekas Uni Soviet karena berasal dari induk yang sama.⁴⁶ Sehingga ketika Rusia berkonflik dengan Ukraina yang merupakan negara tetangga terdekat Rusia, Rusia sangat memperhitungkan tindakan-tindakan yang diambilnya. Dan ini terlihat dari konflik keduanya ketika pemutusan pasokan gas Rusia ke Ukraina dan kasus Crimea.

Dalam pembahasan, penulis membatasi lingkup pembahasan sesuai dengan judul yang diangkat, yaitu lingkup konflik yang berlokasi di dua Negara yaitu Rusia dan Ukraina, aktor-aktor yang terlibat didalamnya yaitu Rusia, Ukraina, dan Uni Eropa, serta periode konflik yang dimulai sejak tahun 2006-2015. Penulis membatasi periode konflik pada 2006-2015 karena konflik terbuka kedua Negara

⁴⁴EuropeanUnionExternalAction,EuropeanNeighbourhoodPolicy(ENP),https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy/np/330/european-neighbourhood-policy-enp_en, diakses pada 11 Februari 2016 pukul 08.22 WITA

⁴⁵Corinne Nordt, Foreign Policy Toolkit: Putin's Use Of Soft Power, <http://grieboski.com/foreign-policy-toolkit-putins-use-of-soft-power/> diakses pada 18 Februari 2016 pukul 09.00 WITA

⁴⁶Natalia Burlinova, Russian Soft Power Just Like Western Soft Power, But With A Twist, <http://www.russia-direct.org/opinion/russian-soft-power-just-western-soft-power-twist> diakses pada 18 Februari 2016 pukul 13.16 WITA

Pengaruh Soft Power Rusia Terhadap Ukraina Dalam Konflik Rusia-Ukraina

ini dimulai pada 2006 ketika Ukraina berkeinginan melepaskan diri dari Rusia dan sampai tahun 2015 karena konflik kedua Negara ini masih berlanjut hingga sekarang. Penulis juga akan fokus pada tindakan-tindakan apa saja yang diambil Rusia untuk terus mempertahankan Ukraina dalam pengaruhnya, terutama tindakan soft power Rusia, situasi konflik yang melibatkan dua negara, yaitu konflik keduanya pada pemutusan gas Rusia kepada Ukraina dan konflik keduanya dalam perebutan Crimea.

METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu menggambarkan konflik Rusia-Ukraina dan penggunaan soft power oleh Rusia. Tipe penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan “apa” dan “mengapa” sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pendekatan soft power dapat memperluas pengaruh Rusia di Ukraina.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan di penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar dan internet serta keterangan lainnya dari objek penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan data melalui sumber-sumber seperti bahan bacaan buku dan surat kabar dan juga sumber-sumber dari internet seperti jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan masalah yang diangkat.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang diperoleh dari library research, sumber-sumber internet, dan hasil pengetahuan yang didapat dari perkuliahan yang pernah dijalani. Teknik analisis kualitatif ini sengaja diambil oleh penulis karena teknik ini yang paling memungkinkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data tentang konflik dan korelasi konflik dengan penggunaan soft power Rusia.

e. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif, yang mana penulis akan mendeskripsikan permasalahan secara umum kemudian akan menarik kesimpulan secara khusus pada akhir pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat. Penulis akan menjelaskan kondisi kedua Negara sehingga menimbulkan konflik secara umum dan kemudian akan menjelaskan implikasi dari pendekatan soft power Rusia dalam memperluas pengaruhnya di Ukraina.

PEMBAHASAN

A. Kasus Pemutusan Gas Rusia Kepada Ukraina (2006)

Politik Luar Negeri Rusia dalam Kasus Pemutusan Gas (Rusia-Ukraina)

Rusia sangat mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari politik luar negerinya jika ia memutus pasokan gasnya ke Ukraina. Karena jika Rusia memutus cadangan gasnya ke Ukraina maka negara-negara lain khususnya Eropa Timur akan terhenti pula pasokan gasnya. Negara-negara Eropa Timur ini antara lain adalah Latvia, Slovakia, Estonia, Finlandia, Bulgaria, Lithuania, Czech Republik, Yunani, dan Hongaria. Dengan menghentikan pasokan gasnya ke Ukraina, otomatis negara-negara yang telah disebutkan diatas akan terkena dampaknya, karena Ukraina merupakan saluran pipa gas utama Rusia ke negara-negara tersebut. Dan dengan begitu negara-negara tersebut juga akan menghentikan pasokan gasnya ke negara-negara lain seperti Jerman, Polandia, Prancis, Italia, dan Austria.

Semua pipa gas Rusia melewati Ukraina baru kemudian tersalurkan ke negara-negara importer di kawasan Eropa baik Eropa Tengah maupun Eropa Barat. Sehingga dengan menutup saluran gasnya ke Ukraina saja, Rusia telah dapat memberikan guncangan bagi negara-negara di sekitarnya. Meskipun penutupan saluran gas ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar satu minggu, akan tetapi kestabilan energi di Ukraina dan Eropa lumayan terguncang. Harga gas alam melambung tinggi dan membuat negara-negara kesulitan dalam menstabilkan energi dalam negerinya. Ukraina menjadi yang paling terkena dampak dari hal ini bahkan hampir menyebabkan krisis energi di dalamnya.

Dari kasus pemutusan gas ini terlihat bahwa politik luar negeri Rusia pada saat itu bergantung dari lingkungan eksternalnya juga hubungan diplomatik antara kedua negara. Rusia dan Ukraina dulunya memang adalah negara yang memiliki suasana hubungan yang baik, tetapi sejak Ukraina berkeinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa, Rusia kemudian merasa terancam dan menyatakan ketidaksetujuannya. Hubungan antara keduanya pun masuk kedalam suasana diplomasi yang memburuk. Dimana pada tahap inilah kecurigaan-kecurigaan antara satu sama lain mulai bermunculan. Inilah yang terjadi kepada Rusia yang mencurigai Ukraina atas tindakan pencurian gas. Kecurigaan Rusia ini membuatnya mengambil tindakan politik luar negeri jangka pendek (*short term*) dengan cara memutus pasokan gas Rusia ke Ukraina sehingga menyebabkan ketidakstabilan gas dan pelonjakan harga gas serta kekurangan gas di Ukraina dan negara-negara kawasan Eropa yang otomatis membuat negara-negara waspada. Sebetulnya tindakan Rusia ini sangat beresiko. Atas tindakannya ini dia bisa mendapat tanggapan buruk dari negara-negara internasional atas sikapnya yang bisa dianggap agresif. Tetapi sebelum itu semua, Rusia telah lebih dulu melakukan pembelaan sebelum kemudian memutus pasokan gasnya, yaitu dengan mengatakan bahwa tindakan yang diambilnya adalah untuk melindungi gasnya dari kecurangan dan eksploitasi energi.

Rusia juga sangat paham dengan apa yang akan terjadi pada kawasan Eropa jika ia mengambil tindakan ini. Seolah tindakan ini sengaja diambil oleh Rusia untuk menunjukkan strata atau levelnya di dunia internasional, dimana dengan faktor energi saja dia telah mampu untuk mengguncang kestabilan Eropa. Seolah ingin menunjukkan ke Eropa bahwa Rusia merupakan satu negara besar yang memiliki banyak kehebatan dan secara tidak langsung memberi peringatan kepada Uni Eropa untuk tidak seenaknya bertindak mendekati negara-negara pesemakmuran Soviet khususnya Ukraina karena Rusia tidak akan tinggal diam melihatnya. Serta memberi peringatan secara tidak langsung kepada Ukraina bahwa segala tindakan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa akan menerima konsekuensi dari Rusia yang selama ini telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada Ukraina.

Pengaruh Soft Power Rusia Terhadap Ukraina Dalam Konflik Rusia-Ukraina

Politik luar negeri Rusia juga sangat di pengaruhi oleh Variabel Sistemik, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa variabel sistemik ini adalah variabel-variabel eksternal yang mempengaruhi kebijakan atau tindakan dari politik luar negeri suatu negara. Variabel ini berhubungan erat dengan kebijakan atau tindakan suatu negara dalam merespon tindakan negara lain, dimana variabel ini bertujuan untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki oleh satu negara atau untuk mendapatkan serta mencapai kesempatan-kesempatan baru yang ditawarkan oleh lingkungan eksternalnya. Rusia mencerminkan kedua hal ini dalam perumusan politik luar negerinya. Tindakan-tindakan yang diambilnya dalam menghadapi Ukraina dan pihak luar yang turut campur dalam urusannya dengan Ukraina, membuatnya harus menentukan langkah yang tepat agar tidak merugikan negaranya sendiri. Dan ini terbukti berhasil dilakukannya. Rusia berusaha untuk mempertahankan Ukraina. demi mencapai kepentingan dan keinginannya di Ukraina, Rusia tidak dengan gegabah mengambil tindakan jalur keras seperti yang biasa dilakukannya.

Politik luar negeri Rusia sendiri mempengaruhi tindakan Ukraina yang begitu mengebung-gebug ingin bergabung dengan Uni Eropa. Keinginan Ukraina ini menjadi terurungkan dan Ukraina kembali fokus dengan Rusia, setidaknya untuk permasalahan gas mereka. Rusia yang memberikan penawaran kenaikan harga gas kepada Ukraina kemudian dijawab oleh Ukraina bahwa Ukraina akan memenuhi kenaikan gas ini tetapi dilakukan secara bertahap, tidak langsung meningkat berkali-kali lipat. Melihat respon dari Ukraina untuk mengikuti kemauan Rusia, dapat dikatakan bahwa tindakan politik luar negeri Rusia telah berhasil mempengaruhi Ukraina.

Tindakan Rusia yang tanpa pemaksaan ini mencerminkan ciri dari konsep Soft Power. Memang sedikit mengejutkan jika Rusia menggunakan konsep soft power yang awalnya dipopulerkan oleh Amerika. Namun dari tindakan-tindakan yang diambil Rusia, mencerminkan bahwa Rusia melakukannya dengan lebih halus. Jika selama ini Rusia dikenal sangat terikat dengan bayang-bayang Uni Soviet yang komunis dan penggunaan militernya, pada konflik kedua negara perihal pemutusan gas ini tidak terlihat kedua hal tadi. Rusia justru lebih memperlihatkan sisi soft power. Dengan Ukraina mengikuti keinginan Rusia untuk menyetujui kenaikan harga gas tanpa menerima paksaan dari Rusia saja telah menunjukkan bahwa Rusia menggunakan soft power dan bisa dikatakan berhasil. Rusia juga membuat Ukraina berpikir bahwa tindakan ini terpaksa diambil Rusia karena perilaku dari Ukraina sendiri yang ingin menjauhkan diri dari Rusia, Padahal selama ini Rusia telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan-kemudahan bagi Ukraina. Mulai dari harga gas yang lebih murah 3 kali lipat dari harga pasaran dunia, kerjasama-kerjasama yang dilakukan seperti pemberian visa free Rusia kepada pekerja-pekerja Ukraina, dan masih banyak lagi. Namun Ukraina yang justru seolah ingin menjauhkan diri dari Rusia dengan mengatakan ingin lebih mendekatkan diri dengan Uni Eropa sehingga membuat Rusia menjadi geram dan menolak keinginan Ukraina ini. Ini bisa dikatakan hal yang wajar. Oleh karena itu pada kasus pemutusan gas yang dilakukan Rusia ini, Rusia sangat menekankan bahwa tindakan yang dilakukannya ini adalah disebabkan oleh Ukraina sendiri.

Tidak ada pengerahan militer dalam kasus ini, tidak ada ancaman dalam kasus ini. Rusia memberikan alasan yang masuk akal tentang pemutusan gas yang dilakukannya terhadap Ukraina, dan Ukraina menyadari akan hal itu sehingga mengikuti kemauan Rusia tentang kenaikan harga gas meskipun dengan meminta untuk kenaikan harga gas ini dilakukan secara bertahap kepada Rusia. Rusia memiliki sepak terjang yang bisa dikatakan bertolak belakang dengan dunia barat. Keinginannya untuk tetap membuat negara-negara bekas Uni Soviet berada dalam jangkauan kekuasaannya membuatnya harus berusaha keras untuk merangkul negara-negara ini agar tetap berpihak kepada negara Vladimir Putin ini. Namun zaman yang semakin berkembang membuat negara ini harus sangat memperhatikan langkah apa saja yang akan diambilnya. Langkah keras tidak lagi menjadi opsi utama dalam penentuan keberhasilan dari tindakannya. Soft power menjadi opsi yang paling aman di era sekarang.

Konflik keduanya dalam pemutusan gas yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina yang diketahui melibatkan banyak pihak ini, nyatanya mempengaruhi Rusia dalam proses diplomasi dan politik luar negerinya. Rusia menggunakan soft power tentu memiliki alasan. Dan dari penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan dua alasan utama mengapa Rusia menggunakan soft power sebagai bentuk diplomasinya.

Jika dulu jalan keras dapat langsung ditempuh untuk mengamankan kepentingan, sekarang situasi telah berbalik. Sistem kerja dunia internasional tidak lagi menganggap hard power sebagai hal yang utama, bahkan bisa dikatakan hard way adalah jalan terakhir yang akan ditempuh oleh suatu negara. Berkebalikan dengan zaman Perang dulu yang menganggap bahwa hard power adalah satu-satunya kunci untuk dapat mencapai kepentingan suatu negara.

Konsep soft power yang digadang-gadang oleh Amerika Serikat berhasil membuat hampir seluruh negara-negara di dunia untuk melakukan dan mengaplikasikannya. Soft power yang dianggap memiliki resiko kecil bagi penggunaannya namun dapat membuahkan hasil yang besar membuat negara-negara memilih cara ini dalam kerjasamanya, diplomasinya, maupun dalam hal-hal saling berhubungan antara satu sama lain. Oleh karena itu jika ada satu negara langsung menggunakan hard power dalam mencapai keinginannya, maka negara ini akan langsung menjadi sorotan dan akan dicap agresif dalam dunia internasional bahkan bisa menjadi musuh bersama. Dan Rusia sangat menyadari hal ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman yang sangat signifikan juga dapat mempengaruhi Rusia. Negara yang dulunya sangat jauh dari konsep soft power. Soft power memberikan warna baru dalam perpolitikan Rusia, khususnya dalam hal berdiplomasi dan politik luar negerinya. Perkembangan zaman menjadi salah satu alasan utama Rusia mengapa lebih memilih menggunakan soft power pada konfliknya dengan Ukraina dalam kasus pemutusan gas yang dilakukannya pada 2006. Jika Rusia mengambil langkah keras yang melibatkan senjata dan militer atau bentuk ancaman lainnya dalam kasus pemutusan gas ini maka dapat dipastikan Rusia juga akan mengalami kerugian meskipun dia adalah salah satu pemasok gas terbesar di Ukraina.

Selain pengaruh perkembangan zaman yang membuat Rusia menggunakan soft power, aktor yang terlibat dalam konfliknya dengan Ukraina juga menjadi faktor penentu dan pertimbangan Rusia dalam keputusannya menggunakan soft power. Ukraina tidak sendiri dalam menghadapi Rusia, ada aktor lain yang mendukung Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia. Aktor itu tidak lain dan tidak bukan adalah Uni Eropa, pemicu awal kedua negara ini masuk kedalam zona konflik. Rusia memang adalah negara terbesar yang memiliki paket lengkap didalamnya. Militer yang kuat, teritori yang luas, sumber daya alam yang sangat banyak, hingga pengaruh yang sangat kuat di kawasan Eropa Timur. Namun, ada aktor lain yang tidak kalah hebatnya dengan Rusia, dan dia adalah Uni Eropa, organisasi internasional perkumpulan negara-negara Barat terbesar di dunia.

Fakta bahwa Uni Eropa mendukung dan menyokong Ukraina menjadikan Rusia tidak dapat mengambil sembarang tindakan dalam perumusan politik luar negerinya. Soft power menjadi jalan teraman bagi Rusia jika ingin berhasil dalam keputusannya memutus gasnya kepada Ukraina, yang dilakukannya selama seminggu. Uni Eropa membuat Rusia harus memikirkan matang-matang perihal langkah apa yang harus diambilnya dalam kasus pemutusan gas ini. Jika Vladimir Putin langsung menggunakan hard power dalam memutus gasnya, maka yakin dan percaya Rusia akan menerima akibat dari tindakan agresifnya. Hard power yang dimaksud adalah seperti memberikan ancaman kepada Ukraina ataupun langsung memutus pasokan gasnya secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Uni Eropa bisa saja berbalik menghentikan permintaan gasnya kepada Rusia jika langkah hard power dilakukan oleh Rusia. Dan itu sudah pasti akan menimbulkan kerugian bagi Rusia.

Bentuk Soft Power Rusia Dalam Kasus Pemutusan Gas (Rusia-Ukraina)

Cara Rusia memberikan alasan logis atas pemutusan gas yang dilakukannya memang membuat negara ini terlihat seperti bukan negara utama bekas Uni Soviet yang memiliki citra keras dan agresif serta seakan hanya selalu melakukan tindakan keras dalam mencapai keinginannya. Namun karena pengaruh zaman dan aktor yang terlibat tadi membuat Rusia mau tidak mau harus merubah politik luar negerinya dengan menggunakan soft power.

Zaman semakin berubah, cara lama yang keras, yang dulunya akan berhasil jika digunakan sekali pakai tidak akan berhasil di zaman sekarang ini. Dan ini disadari oleh Rusia. Jika Rusia langsung mengambil tindakan memutus pasokan gasnya kepada Ukraina tanpa alasan yang jelas dan dilakukan secara sepihak, maka dapat dipercaya bahwa Rusia akan menjadi musuh bersama negara-negara kawasan Eropa. Dan Uni Eropa sebagai perwakilan negara-negara Eropa ini pasti akan langsung mengambil tindakan karena pemutusan gas ini juga mempengaruhi stabilitas energi kawasan Eropa, tidak hanya Ukraina. Soft power menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Rusia untuk bisa mencapai keinginannya untuk membuat Ukraina tetap dalam pengaruhnya.

Pada konsep *Soft Power* Joseph S. Nye, dia memberikan ulasan tentang ciri-ciri dari soft power itu sendiri. Tentang apa yang membedakan soft power dengan hard power. Dan salah satu cirinya adalah *soft power* dilakukan dengan cara yang lebih humane, yang artinya tanpa kekerasan dan berbagai hal lainnya yang mengandung unsur keras dalam penggunaannya. Soft power merupakan metode atau konsep yang dilakukan untuk mendapatkan keinginan dengan cara yang halus, tanpa kekerasan, tanpa embargo, tanpa ancaman, dan tanpa militer. Singkatnya adalah kebalikan dari hard power. Dan sikap Rusia dalam memutus gasnya ke Ukraina mencerminkan ciri dari soft power ini.

Rusia tidak serta merta memutus pasokan gasnya kepada Ukraina tanpa memberikan alasan yang jelas dan masuk akal. Dengan alasan bahwa Ukraina harus mengikuti harga gas yang Rusia patok untuk negara-negara pasarnya yang lain jika ingin bergabung dengan Uni Eropa dan juga pernyataan Rusia yang mengatakan kecurigaannya bahwa Ukraina melakukan kecurangan dengan mencuri gas Rusia yang melewati pipanya, Rusia telah dapat mempengaruhi Ukraina. Dan Ukraina tidak dapat membantah keputusan Rusia ini, karena Rusia memberikan alasan serta peringatan yang jelas. Yaitu jika Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa maka Rusia akan memperlakukanmu seperti negara-negara Barat lainnya. Sikap Rusia ini mencerminkan konsep Soft Power yang ditawarkan oleh Joseph S. Nye.

Tindakan Rusia yang memutus pasokan gasnya tidak terlepas dari strateginya untuk mencegah Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Karena sejak awal Ukraina menyatakan keinginannya untuk lebih mendekatkan diri dengan Uni Eropa, Rusia sudah menyatakan penolakannya atas keinginan Ukraina ini. Cara yang diambil Rusia untuk menunjukkan penolakannya pun dilakukannya tidak seperti citra Rusia dimata dunia. Meskipun tindakannya ini menuai komentar negatif dari negara-negara lain namun ada perubahan dalam setiap langkah yang diambil Rusia. Pemberian alasan yang logis untuk pemutusan gas yang dilakukannya menunjukkan bahwa Rusia tidak langsung menggunakan cara keras dalam politik luar negerinya seperti citranya selama ini yang akan langsung menggunakan cara keras.

Politik luar negeri Rusia ini membuahkan hasil sesuai keinginan Rusia. Ukraina yang ingin segera bergabung dengan Uni Eropa terurungkan niatnya. Pengaruh Rusia yang sangat besar kepada Ukraina hanya dengan memanfaatkan gasnya telah mampu mengubah bahkan menghentikan keinginan Ukraina meski hanya sementara untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Untuk data tambahan, Ukraina menggantungkan 60% kebutuhan gasnya dari pasokan Rusia. Ukraina sangat membutuhkan gas Rusia baik untuk memutar roda industri dan pembangkit listrik maupun konsumsi rumah tangga. Sehingga pemutusan gas yang dilakukn Rusia membuat keadaan internal Ukraina menjadi tidak stabil dan ini juga menjadi keluhan bagi masyarakat Ukraina sendiri. Rakyat Ukraina percaya bahwa memiliki hubungan baik dengan Rusia akan menjamin stabilitas dalam pemenuhan energi di negara itu.

Faktor energi Rusia menjadi nilai tambah bagi Rusia untuk menjalankan politik luar negerinya. Seperti pada 2013 ketika hubungan antara kedua negara kembali memanas diakibatkan karena Presiden Ukraina, Victor Yanukoich, yang adalah pro Rusia digulingkan dan kursi-kursi pemerintahan Ukraina kembali di isi oleh orang-orang pro Barat, Rusia kembali menaikkan harga gasnya. Harga diskon yang semula Rusia berikan untuk Ukraina ketika Victor Yanukovich menjabat yaitu seharga \$280 US per seribu meter kubik yang merupakan sebuah insentif besar bagi Kiev, merangkak naik menjadi %485 US per meter kubik setelah Victor Yanukovich digulingkan dari jabatannya. Kenaikan harga sebesar 42% membuat permasalahan Ukraina semakin menumpuk. Mahalnya harga gas membuat produksi dalam negeri Ukraina mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pendapatan Ukraina. Ini membuat pihak Kiev, Ukraina tidak mampu untuk membayar hutang yang harus dilunasinya kepada Rusia. Beban hutang gas Ukraina sendiri pada Rusia mencapai 2,2 miliar dolar sampai 8 April 2014.⁴⁷

Dari data diatas dapat terlihat bahwa Rusia sangat mengetahui apa yang menjadi kekuatannya dan memanfaakkannya dengan tepat. Terlihat ketika Ukraina dipimpin oleh orang yang pro Rusia maka Rusia juga memberi kemudahan bagi Ukraina akan tetapi jika Ukraina kembali mencondongkan diri ke lingkungan Barat khususnya Uni Eropa, maka Ukraina harus menerima konsekuensi harga gas yang mengikuti pasaran gas Rusia untuk negara-negara pengeksportnya yang berada di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Barat.

B. Kasus Perebutan Crimea (Rusia-Ukraina)

Politik Luar Negeri Rusia Dan Pengaruhnya Pada Kasus Crimea (Rusia-Ukraina)

Tidak bisa dipungkiri bahwa militer Rusia memberikan efek tersendiri kepada pihak Ukraina dan bahkan pihak Uni Eropa maupun negara-negara Barat lainnya. Efek yang dimaksud adalah efek penekan dari Rusia. Militer Rusia mampu membuat pihak Ukraina gentar dalam mengambil langkah-langkah politik luar negerinya. Jika ingin dibandingkan antara militer Rusia dan Ukraina sudah pasti akan terlihat jurang perbedaan yang besar antara keduanya. Namun Rusia tetap memperhatikan segala tindak tanduknya dalam politik luar negerinya karena mengetahui bahwa Ukraina memiliki dukungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Ya, fakta bahwa Amerika Serikat menjadi salah satu pendukung Ukraina membuat Rusia harus memperhatikan segala proses dan memperhitungkan segala tindakan dari politik luar negerinya di kasus Crimea ini. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh massa pro Uni Eropa di Ukraina memberikan dampak besar bagi massa pro Rusia yang memang menjadi minoritas di Ukraina. Crimea yang menjadi pusat pro Rusia terbesar tentu saja mendapat perhatian lebih dari Rusia. Kota Sevastopol yang menjadi pangkalan armada laut Rusia dijadikan pintu masuk Rusia untuk masuk ke Crimea. Dan Crimea sangat membuka diri terhadap Rusia. Alasan Rusia kembali menggunakan soft power pada kasus perebutan Crimea antara dia dan Ukraina sebenarnya sama dengan alasan mengapa Rusia menggunakan soft power dalam kasus pemutusan gasnya dengan Ukraina. Hanya saja dalam kasus Crimea ini, aktor-aktor yang terlibat semakin beragam. Amerika Serikat masuk menjadi aktor yang mendukung Ukraina dalam upaya bergabung dengan Uni Eropa dan membantu Ukraina untuk tetap mempertahankan Crimea sebagai salah satu wilayah yang masuk kedalam teritorinya.

⁴⁷http://Indonesian.trib.ir/ranah/telisisik/item/79649-Krisis_Gas_Ukraina_dan_Solusi_Barat diakses pada 25 Agustus 2016 pukul 22.00 WITA

Rusia dan Amerika Serikat bukanlah cerita baru dalam dunia internasional. Dua negara super power ini sudah menunjukkan ketidakcocokannya sejak Rusia masih berbentuk Uni Soviet. Hingga saat ini keduanya masih saling menyimpan kecurigaan-kecurigaan antara satu sama lain, namun tidak serta merta menunjukkannya dengan tindakan kekerasan. Keduanya sangat mengetahui kekuatan dari masing-masing. Sehingga ketika Amerika Serikat masuk kedalam pusaran konflik antara Rusia dan Ukraina ini, Rusia menjadi sangat hati-hati dalam mengambil langkah khususnya dalam konfliknya dengan Ukraina pada kasus perebutan Crimea ini. Sekali lagi soft power menjadi alternatif utama Rusia untuk dapat mencapai keinginannya dalam memiliki Crimea tanpa menerima kerugian besar.

Bentuk Soft Power Rusia Dalam Kasus Perebutan Crimea (Rusia-Ukraina)

Keberhasilan Rusia dalam menjadikan Crimea sebagai miliknya tidak terlepas dari strategi soft power Rusia yang persuasif. Rusia sadar tidak ada jalan lain yang lebih aman dalam kasus Crimea ini selain menggunakan soft power jika tidak ingin menerima kerugian besar. Kerugian besar yang dimaksud adalah, misalkan Rusia langsung menggunakan hard power dalam kasus perebutan Crimea ini maka dapat dipastikan pendukung-pendukung Ukraina yang tidak lain adalah Uni Eropa dan Amerika Serikat akan ikut turun tangan dalam membantu Ukraina. Dan ini bukanlah hal yang bagus untuk Rusia karena Rusia sangat mengetahui level kekuatan dari kedua aktor ini. Oleh karena itu soft power menjadi pilihan Rusia. Soft power Rusia dalam menarik Crimea pun dilakukannya melalui beragam faktor, yaitu berbagi sejarah, kesamaan etnis, kesamaan bahasa, kesamaan agama yang dianut, dan budaya-budaya keduanya (Rusia dan Crimea) yang mirip.

- ***Kedekatan Sejarah***

Sejarah antara Crimea dan Rusia memang tidak dapat dipisahkan. Kedua wilayah ini memang sangat dekat, karena sejak awal Crimea memang merupakan bagian dari Rusia yang kemudian diberikan kepada Ukraina pada 1954 oleh pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, yang memberikan Sevastopol dan seluruh wilayah semenanjung Crimea kepada Ukraina sebagai hadiah. Berbagi sejarah menjadi nilai tambah bagi Rusia untuk kelancaran soft powernya. Karena kedekatan sejarah Rusia dapat mengetahui Crimea dengan baik.

Rusia sangat mengetahui kedekatannya dengan Crimea disbanding wilayah-wilayah lain yang juga menjadi basecamp pro Rusia, akan tetapi mengapa Crimea yang dipilih oleh Rusia? Ini karena Rusia dan Crimea memang terlihat jauh lebih dekat ketimbang Crimea dan Ukraina. Rusia selalu memberikan bantuan kepada Crimea dalam bentuk apapun itu. Sevastopol yang menjadi ibukota Crimea menjadi jembatan dari Rusia untuk terus berhubungan baik dengan Crimea.

- ***Etnis Mayoritas***

Fakta bahwa Crimea dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia terlihat pada masyarakat Crimea yang mayoritas adalah etnis Rusia. Tentu saja orang atau etnis Rusia akan lebih nyaman dengan orang atau etnis Rusia juga. Dan Rusia yang selama ini selalu menjaga hubungan baik dengan Crimea baik masyarakatnya maupun pemerintahnya. Soft power Rusia terbantu karena hal ini. Rusia semakin mudah melakukan pendekatan dengan Crimea karena kesamaan etnis ini.

- ***Kesamaan Bahasa***

Sejarah panjang Crimea yang dulunya adalah bagian dari Rusia serta mayoritas etnis yang adalah etnis Rusia, sudah pasti membuat masyarakat Crimea lebih dekat dengan Rusia. Termasuk dalam kenyamanan berbicaranya. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Crimea memang lebih nyaman dalam menggunakan bahasa Rusia daripada bahasa Ukraina dalam percakapannya.

Bahkan ini tidak hanya di Crimea, tapi banyak keluarga-keluarga di Ukraina yang lebih nyaman menggunakan bahasa Rusia dalam berkomunikasi sehari-hari antara sesama anggota keluarga daripada menggunakan bahasa resmi Ukraina.

- **Agama Mayoritas**

Rusia sangat terkenal dengan aliran Kristen Ortodoksnya. Rusia bahkan memiliki Gereja Ortodoks yang masuk kedalam warisan budaya Rusia. Sekali lagi sejarah menjadi titik kunci utama dalam keberhasilan soft power Rusia. Mengapa? Karena sejarahnya yang membentuk Ukraina. berasal dari sejarah yang sama yaitu Uni Soviet membuat Rusia dan Ukraina memiliki banyak sekali kesamaan. Termasuk kesamaan agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Crimea termasuk Ukraina mayoritas adalah ajaran agama Kristen Ortodoks. Meskipun mulai banyak agama-agama lain yang memasuki Ukraina, namun di Crimea Kristen Ortodoks tetap menjadi agama sejuta umat.

Kedekatan antara Crimea dan Rusia dalam hal sejarah, etnis, bahasa, agama, dan bahkan budaya, tidak dapat dipungkiri menjadi hal utama dalam keberhasilan soft power Rusia untuk mengambil Crimea dari Ukraina. Salah satu bentuk keberhasilan soft power Rusia adalah memicu diadakannya referendum di Crimea. Meskipun banyak negara khususnya negara-negara Barat tidak setuju akan diadakannya referendum di Crimea ini dan mengatakannya illegal akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa banyak, karena Crimea sendirilah yang memutuskan melakukan referendum ini. Referendum yang berisikan apakah 96,77% masyarakat Crimea ingin kembali bergabung dengan Federasi Rusia ini menjadi sebuah kabar baik bagi Rusia dan mimpi buruk bagi Ukraina.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang sejak 2012 mengatakan bahwa akan menjadikan soft power sebagai perangkat dalam politik luar negeri Rusia, dan ini terbukti dalam kasus Crimea ini. Secara sepintas memang terlihat seolah Rusia mengerahkan militernya yang memang sangat besar itu untuk menekan Ukraina akan tetapi, jika diperhatikan lebih seksama, pelepasan Crimea dari Ukraina ini adalah karena soft power yang dilancarkan Rusia ke Crimea. Rusia sangat mengetahui kedekatannya dengan Crimea dibanding wilayah-wilayah lain yang juga menjadi basecamp pro Rusia dan ia dengan pintar memanfaatkannya. Sedangkan Ukraina, memang memiliki kesempatan yang tipis untuk mempertahankan Crimea. Jika sejak awal Ukraina lebih memperhatikan Crimea, dalam hal ini lebih mendekati diri dengan Crimea, maka Ukraina mungkin memiliki kesempatan untuk bisa bersaing dengan Rusia dalam memperebutkan Crimea.

Pernyataan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada 2012 bahwa Rusia setuju dengan soft power dan penggunaannya serta mengatakan bahwa soft power merupakan perangkat penting dalam menginfluence pihak lain terbukti dengan jelas pada kasus perebutan kepemilikan Crimea ini.

Referendum Crimea yang ditentang oleh Amerika Serikat melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatakan bahwa referendum ini adalah illegal dan meminta kepada pihak Rusia untuk membatalkannya, nyatanya tidak dapat menyurutkan keinginan Crimea untuk kembali bergabung dengan Rusia. Sebenarnya, pihak luar tidak bisa dengan seenaknya mengatakan bahwa referendum ini illegal dan mengatakan bahwa Rusia menjadi dalangnya karena warga Crimealah yang melakukan sendiri referendum ini dan terbukti bahwa 96,77% warga Crimea lebih condong kepada Rusia. Yang Rusia lakukan hanyalah memberi saran kepada Crimea untuk melakukan referendum namun yang melaksanakannya adalah Crimea sendiri, tanpa paksaan. Dan apabila pihak luar mengatakan ini adalah illegal, hasil dari pemungutan suara dari referendum ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Fakta bahwa masyarakat Crimea lebih memilih untuk kembali bergabung dengan Rusia menjadi bukti bahwa Rusia memperlakukan Crimea lebih baik dari Ukraina sendiri tempatnya berada. Karena jika Ukraina memperlakukan atau memperhatikan Crimea lebih baik, maka referendum ini akan berkata lain pula. Entah persentase dari jumlah pendukung Ukraina bertambah atau jumlah

pendukung Rusia berkurang. Namun dari hasil persentase yang terlihat dari referendum ini hanya sekitar 4% warga Crimea yang memilih untuk tetap bersama Ukraina. Dalam perjalanan konflik keduanya yang dimulai sejak 2013 memang Rusia terlihat mengerahkan militernya ke Crimea, tepatnya di Sevastopol tempat armada laut Rusia sejak 1991. Rusia melakukan pembelaan bahwa armada lautnya yang dikirim ke Crimea adalah untuk berlatih militer bukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memicu perang. Namun militer Rusia ini menjadi salah satu penentu keberhasilan Rusia dalam memiliki Crimea.

Terlepas dari konflik kedua negara ini, kita akhirnya dapat melihat perubahan dari suatu negara yang awalnya sangat beraliran komunis dan terkenal selalu menggunakan cara keras dalam mencapai kepentingannya bisa berubah menggunakan soft power dalam proses pencapaian keinginannya. Konsep soft power yang persuasif menjadi pilihan Rusia untuk menghadapi Ukraina dan mencapai kepentingannya baik dalam kasus pemutusan gas yang dilakukan Rusia kepada Ukraina maupun dalam kasus perebutan Crimea antara kedua negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Keputusan yang Rusia ambil untuk lebih menggunakan soft powernya dalam konfliknya dengan Ukraina ternyata adalah merupakan keputusan yang tepat. Perumusan politik luar negerinya dengan menggunakan metode soft power baik dalam konfliknya pada kasus pemutusan gas maupun kasus perebutan Crimea, dapat dilihat keberhasilannya dalam “kemenangan” Rusia. Rusia memahami benar keadaan dunia sekarang ini dimana kekuatan yang mengandalkan jalur hard tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa ada kerusakan pada negara penggunanya.

Status atas kepemilikan energi khususnya gas oleh Rusia, terbukti dapat dimanfaatkannya dengan cerdas pada konfliknya dengan Ukraina dalam kasus pemutusan gas. Dengan memutus aliran gasnya ke Ukraina saja, Rusia telah mampu memberikan guncangan kepada Ukraina bahkan negara-negara Eropa lainnya yang menjadi eksportir gas Rusia. Rusia bahkan telah mengantisipasi jika ada protes besar atas sikapnya ini dengan cara memberikan alasan yang jelas mengapa tindakan pemutusan gas ini diambil oleh Rusia. Negara ini memberikan dua alasan mengapa sikap politik luar negeri ini diambilnya. Yang pertama adalah jika Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa, maka Ukraina harus siap dengan perlakuan yang Rusia berikan, dalam arti Rusia akan memperlakukan Ukraina tidak lagi seperti negara tetangga pesemakmuran Soviet melainkan Rusia akan melihat Ukraina menjadi satu negara bagian dari Uni Eropa. dan dengan begitu, Ukraina harus bersedia menerima konsekuensi kenaikan harga gas Rusia.

Ini karena selama ini Rusia memberika harga gas kepada Ukraina jauh lebih murah tiga kali lipat daripada negara-negara importernya yang lain khususnya Eropa Barat. Maka jika Ukraina ingin tetap bergabung dengan Uni Eropa, Ukraina harus siap dengan harga gas baru ini. hal yang kedua adalah Rusia mencurigai Ukraina melakukan tindakan curang dengan mengambil gas Rusia yang melalui pipa gas Ukraina.

Alasan yang jelas serta sikap tegas Rusia dilakukannya tanpa ada sedikit pun ancaman atau pergerakan militer. Melainkan murni tindakan politik luar negeri yang bisa dilihat merupakan soft power. Karena tindakan Rusia ini mencirikan dari konsep soft power yang Joseph Nye tawarkan, yaitu membuat negara lain mengikuti apa yang kita inginkan tanpa adanya kekerasan, ancaman, atau embargo, apalagi perang. Perumusan politik luar negerinya dengan menggunakan metode soft power juga diperlihatkan Rusia dalam kasus perebutan Crimea. Dalam keberhasilannya mendapatkan Crimea atau memasukan Crimea menjadi wilayah kekuasaannya, Rusia menggunakan empat hal, yaitu

kedekatan sejarah yang dimilikinya dengan Crimea karena pada dasarnya Crimea adalah bagian dari Rusia yang kemudian dihadiahkan kepada Ukraina. Kedua adalah memanfaatkan mayoritas etnis Crimea yang adalah etnis Rusia, sehingga warga Crimea lebih merasa "nyambung" dengan orang-orang Rusia. Ketiga adalah kesamaan bahasa yang digunakan oleh penduduk Crimea, yaitu bahasa Rusia, karena kebanyakan orang Crimea adalah etnis Rusia. Keempat adalah agama yang dianut oleh warga Crimea bahkan Ukraina yaitu Kristen ortodoks dimana Rusia menjadi penganut terbesar dari agama ini. Keempat hal inilah yang menjadi dasar soft power yang dilakukan Rusia kepada Crimea sehingga warga Crimea lebih berpihak kepada Rusia daripada Ukraina.

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis ditujukan kepada peneliti-peneliti lain yang tertarik untuk meneliti hubungan Rusia dan Ukraina ini. Ada beberapa hal yang penulis tidak bahas dalam konflik kedua negara ini mengingat penulis membatasinya dalam dua kasus saja. Namun peneliti-peneliti lain dapat lebih menggali tentang penggunaan soft power Rusia secara menyeluruh, bukan hanya pada Ukraina tetapi kepada negara-negara tetangganya yang lain, atau bahkan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara maju lainnya. Fakta bahwa Rusia menggunakan soft power kepada Ukraina dan ternyata berhasil, membuat kita bertanya-tanya, apakah jika hal ini dilakukannya kepada negara lain, apakah hasilnya akan tetap sama? Atau bahkan bisa lebih dari hasil yang diberikan dalam kasusnya dengan Ukraina ini.

Penulis juga memberikan saran kepada peneliti lain untuk lebih melihat secara mendetail perumusan-perumusan politik luar negeri yang dilakukan Rusia, apakah Rusia telah memantapkan politik luar negerinya dengan menggunakan soft power atau Rusia akan tetap membarengi penggunaan soft powernya dengan militer yang dimilikinya. Apakah Rusia dapat memanfaatkan soft power sepenuhnya untuk mrncapai keinginan dan kepentingannya tanpa harus turut menyertakan militernya. Semoga peneliti-peneliti lain tertarik untuk meneliti hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Rudy, May; Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya, PT Refika Aditama, Bandung – 2011

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani; Pengantar ilmu Hubungan Internasional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung – 2011

Soeprapto, R.; Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, dan Beth A Simmons; HANDBOOK HUBUNGAN INTERNASIONAL, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2014

Referensi Internet :

<http://kartika.xyz/sejarah-dunia/sejarah-negara-ukraina/>

<http://vibiznews.com/2014/03/06/mengenal-crimea-penyebab-ancaman-perang-rusia-dan-ukraina/>

<http://www.porosilmu.com/2015/02/memahami-konsep-soft-power-diplomacy.html>

<http://kyotoreview.org/issue-15/diplomasi-soft-power-cina-dan-kebijakan-constructive-engagement-asean-hubungan-sino-asean-dan-laut-cina-selatan/>

<http://www.panimbang.net/2006/11/soft-power-dan-jejak-bush.html>

<http://www.iisip.ac.id/content/kebijakan-korea-selatan-dalam-menyelesaikan-konflik-dengan-korea-utara-melalui-wajib-militer>

<https://www.scribd.com/doc/292131282/Profil-Lengkap-Negara-Rusia>

http://old.uiec.org/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=2&lang=id

<http://www.nytimes.com/2014/03/15/world/europe/crimea-vote-does-not-offer-choice-of-status-quo.html>

<http://news.liputan6.com/read/2176071/presiden-ukraina-minta-pemberontak-taati-gencatan-senjata>

<http://www.dw.de/rusia-mulai-latihan-perang-di-krimea/a-18247210>

<http://www.kiblat.net/2015/01/24/ketegangan-rusia-dan-ukraina-bisa-memicu-perang-dunia-iii/>
<http://indonesian.irib.ir/ranah/telitik/item/79649>

http://elvina-yudith-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-139098SOH%20321%20MBP%20EurasiaDinamika%20Erpa%20Timur:%20Pertahanan%20Pengaruh%20Rusia%20Melalui%20Isu%20Lokal%20dan%20Kawasan.htm

https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp/330/european-neighbourhood-policy-enp_en

Yulita Yusuf

<http://www.ilmu-hi.com/korea-selatan-korea-utara-dalam-bingkai-sunshine-policy/>

http://buahpikir-claudya-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42239part%20of%20AsiaPerkembangan%20Ekonomi,%20Politik,%20Politik%20Luar%20Negeri%20%20Korea%20Selatan%20dan%20Korea%20Utara.html

<http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/evolusi-kebijakan-luar-negeri-korea-selatan-terhadap-korea-utara-trust-politik-policy-park-geun-hye/>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/118814-T%2025108-Kebijakan%20Korea-HA.pdf>

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/12995/8703>

<http://www.haryoprasodjo.com/2013/04/kebijakan-luar-negeri-korea-utara-dalam.html><http://www.antaranews.com/berita/423774/perbandingan-kekuatan-militer-rusia-dan-ukraina>

http://indonesia.rbth.com/politics/2014/04/15/mengapa_militer_rusia_yang_kuat_baik_untu_dunia_23611

https://indonesia.rbth.com/economics/2014/03/09/krisis_krimea_dampak_ekonomi_terhadap_rusia_23369

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150520_dunia_ukraina_rusiahttp://www.kompasiana.com/milyakhulsafri/rivalitas-rusia-dan-uni-eropa-di-tanah-ukraina_54f7abd1a33311d41b8b472f

<http://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-panjang-konflik-dan-rawannya-langit-ukraina.html>

http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=573&type=1#.V9jhSfS2D

https://www.academia.edu/17660276/Dampak_Intervensi_Militer_Rusia_Atas_Ukraina_Terhadap_Hubungan_Bilateral_Rusia_-_Amerika_Serikat_tahun_2014

<http://foreignpolicy.com/2013/04/29/what-china-and-russia-dont-get-about-soft-power/>

<https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics>

<http://foreignpolicy.com/2006/02/23/think-again-soft-power><http://www.policyreview.eu/can-russia-exercise-soft-power-as-well-as-hard-power/>

<http://www.russia-direct.org/opinion/russian-soft-power-just-western-soft-power-twist>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131583-T%2027540-Politik%20energi-Pendahuluan.pdf>

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=298025>

Jurnal :

<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/85334/potongan/S1-2015-311508-Introduction.pdf>

<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/199/83>

<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/3188/3104>

Pengaruh Soft Power Rusia Terhadap Ukraina Dalam Konflik Rusia-Ukraina

<http://thesis.umsida.ac.id/datapublik/t25109.pdf>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131592-T%2027569-Diplomasi%20energi-Metodologi.pdf>.

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahieff38801392full.pdf>

<https://core.ac.uk/download/pdf/35390876.pdf>

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euata glance_id.pdf.

<https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia.pdf>

<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/85334/potongan/S1-2015-311508-Introduction.pdf>.

http://indonesia.mid.ru/documents/3046611/9269502/mfa_ind_02i.pdf

<http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/05/825.-Octab-Alfiansyah-0902045071.pdf>

ISU HAM DALAM ERA KEPEMIMPINAN SBY-JOKOWI STUDI KASUS: EKSEKUSI MATI “DUO BALI NINE”

Astira Sitaba

Beche Bt. Mamma, S.Ip.,MA
Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

ABSTRACT

This study aims to identify and explain the vision of human rights in the era of president SBY and Jokowi leadership in the case of death executions of “duo bali nine”, and to explain the various factors that influence different visions of human rights in the era of president SBY and Jokowi. This research is doing by using method by literature, is the collecting a variety of books, journals, a similar thesis, articles, and results of research are written in the form of documents. Analysis techniques including the steps of collecting information and data using the qualitative descriptive analysis technique. The analysis of data which emphasized the non-mathematical data. This analysis is also using by describing and analyzing the number of data obtained, and give a conclusions at the end of discussion. The findings in this study is that influence different factors in vision enforcement human rights in era president SBY and Jokowi is factor national interest and idiosinkretik factor that tend to refer to individuals different era leadership. These factors clearly reflects things that affect different human right vision in era of president SBY and Jokowi.

Keywords: Human right, national interest, idiosinkretik, death execution, duo bali nine, SBY, Jokowi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan visi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di era kepemimpinan SBY dan Jokowi dalam kasus eksekusi mati “duo bali nine” dan untuk menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perbedaan visi penegakan Hak Asasi Manusia di era kepemimpinan SBY dan Jokowi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dengan cara studi pustaka, yakni pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi serupa, artikel serta hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk dokumen. Teknik analisis data meliputi tahap-tahap pengumpulan menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif, yaitu analisis data yang ditekankan pada data-data non-matematis. Analisis juga dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisis sejumlah data yang diperoleh, serta memberikan kesimpulan pada akhir pembahasan. Temuan dalam penelitian ini adalah, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan visi penegakan HAM di era kepemimpinan SBY-Jokowi adalah faktor kepentingan nasional dan faktor Idiosinkretik yang mengacu kepada individu era kepemimpinan yang berbeda. faktor-faktor tersebut dengan jelas mencerminkan hal-hal yang mempengaruhi perbedaan visi penegakan HAM di era kepemimpinan SBY dan Jokowi.

Kata kunci: HAM, kepentingan nasional, idiosinkretik, eksekusi mati, duo bali nine, SBY, Jokowi.

PENDAHULUAN

Hubungan antara Indonesia dan Australia diketahui tidak selalu berjalan mulus. Seiring waktu berjalan, hubungan bilateral kedua negara tersebut mengalami berbagai pasang surut. Hal ini dikarenakan dengan hal yang berbeda didalam negara masing-masing, yakni seperti perbedaan sistem politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi serta kondisi budaya. Menurut Collin Brown, hubungan Indonesia dan Australia seperti roller coaster yang artinya seperti bergerak berundak-undak atau

berputar, sehingga jika ada langkah naik (upturn) yang dihasilkan, maka kemudian akan diikuti oleh penurunan (downturn) lainnya.⁴⁸ Hubungan Indonesia dan Australia cukup berliku-liku, mulai dari kasus timor-timur, illegal fishing, terorisme, penyadapan, penyelundupan orang bahkan penyelundupan obat-obat terlarang. Deretan peristiwa tersebut cukup menimbulkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya kondisi antar negara kembali stabil seiring berjalannya waktu. Hubungan Indonesia dan Australia merupakan hubungan bilateral yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kedua negara tersebut harus mampu untuk menciptakan suatu hubungan kemitraan yang baik guna untuk menjalin kerjasama dalam hal untuk menjamin kestabilan hubungan kedua negara dalam interaksi politik internasional.

Melewati sederet peristiwa yang terjadi antara keduanya pada masa kemarin, baru-baru ini kasus eksekusi mati “*duo bali nine*” sedang marak diperbincangkan. Kasus “*duo bali nine*” ini beranggotakan 2 warga Australia, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Mereka ditangkap pada tanggal 17 April 2005 di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dengan bukti menyelundupkan 8,3 kilogram heroin. Metode mereka dalam menyelundupkan heroin yakni dengan cara memasangnya di masing-masing tubuh dari mereka. Pada akhirnya kedua terpidana mati ini ditetapkan menjadi tersangka oleh Pengadilan Negeri Bali pada tanggal 14 Februari 2006 dengan hukuman eksekusi mati. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, kedua terpidana mati ini mengajukan grasi akan tetapi ditolak oleh Presiden Jokowi setelah ditunda pada masa pemerintahan Presiden SBY. Sehingga pada akhirnya eksekusi mati “*duo bali nine*” ini dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015 setelah ditunda setelah 10 tahun lamanya ditunda pada masa pemerintahan SBY.⁴⁹

Setelah pelaksanaan eksekusi mati “*duo bali nine*” ini cukup banyak menuai pro dan kontra. Eksekusi mati sendiri pertama kali diterapkan pada abad ke 18 sebelum Masehi, saat era kekuasaan raja Hamurabi di Babilonia. Pada masa itu ada beberapa hukum tertulis yang dibuat khususnya tentang eksekusi mati. Dengan adanya hukum yang dibuat secara tertulis, pada saat itu juga undang-undang dibuat, dan pada saat itu juga ada sebanyak 25 macam kejahatan yang diancam dengan eksekusi mati. Pada zaman itu, eksekusi mati mulai banyak diterapkan di banyak Negara di dunia yang melakukan kejahatan besar.⁵⁰ Menurut Amnesty International pada saat ini khususnya di Indonesia sedikitnya ada 54 orang yang berada dibawah ancaman eksekusi mati. Informasi ini berdasarkan pada laporan media dan informasi dari para pengacara yang menangani kasus-kasus eksekusi mati. Sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan oleh kantor Jaksa Agung menunjukkan adanya daftar 55 orang yang berada dibawah ancaman pidana eksekusi mati pada bulan januari 2003. 30 orang dari mereka dijatuhi pidana eksekusi mati karena pelanggaran narkoba.⁵¹

⁴⁸ Analisa “hubungan diplomatik indonesia terhadap australia” dalam www.academia.edu/marketing.blogspotina-aus (diakses pada tanggal 22 desember 2015 pukul 19:59 WITA)

⁴⁹ Kontroversi hukuman mati dan relevansi terhadap HAM” dalam cirebonmedia.com (diakses pada tanggal 14 juni 2016 pukul 22:32 WITA)

⁵⁰ kontroversi hukuman mati dan relevansi terhadap HAM” dalam cirebonmedia.com (diakses pada tanggal 14 juni 2016 pukul 23:29 WITA)

⁵¹ Data tentang kasus-kasus pidana mati dalam pernyataan pers, pusat informasi hukum, kantor kejaksanaan agung, 28 oktober 2003 dalam amnestyinternationalcharitylimited-pidana mati di Indonesia” (diakses pada tanggal 14 juni 2016 pukul 23:51 WITA)

Perkembangan Isu ini kemudian berfluktuatif utamanya pada saat baru-baru ini dalam kasus "duo bali nine" ini. Kabar tentang eksekusi mati ini di Indonesia cukup booming pada saat akan dilaksanakannya eksekusi mati tersebut saja dan setelah itu berita tentang eksekusi mati ini tak terdengar lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, isu ini menjadi isu yang cukup diperbincangkan di berbagai kalangan dalam bidang politik, kemanusiaan hingga keagamaan karena bertambahnya jumlah orang yang dijerat dengan ancaman eksekusi mati khususnya di Indonesia dikarenakan oleh narkoba.

Dengan seiring perkembangannya, eksekusi mati "duo bali nine" ini menuai pro dan kontra yang paling utama mengenai HAM yang dimiliki oleh kedua terpidana mati tersebut. Eksekusi mati dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM. Eksekusi mati "duo bali nine" ini jika dilihat dari awal kejadian tertangkapnya hingga penundaan sekitar 10 tahun lamanya yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden SBY dan pada akhirnya kemudian menjadi kenyataan untuk dilaksanakannya eksekusi mati "duo bali nine" ini pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di dua era kepemimpinan yang berbeda ini maka berbeda pula pandangan mereka tentang posisi HAM khususnya yang difokuskan pada kasus eksekusi mati "duo bali nine" ini. Seperti yang diketahui bahwa kasus eksekusi mati "duo bali nine" ini mengalami penundaan pelaksanaannya pada masa pemerintahan Presiden SBY. Sekitar 10 tahun 2 terpidana mati ini tidak jelas nasib dari pelaksanaan eksekusi matinya. Permintaan Grasi yang diajukan oleh kedua terpidana mati ini tidak di proses oleh Presiden SBY. Pelaksanaan eksekusi mati ini hanya melanjutkan pemerintahan terdahulu yakni pemerintahan Presiden SBY. Saat itu SBY menunda eksekusi mati dengan alasan SBY dalam kebijakannya yakni "*Million Friends and Zero Enemy*".⁵² SBY dinilai lebih menjaga hubungan antar Negara (khususnya Australia) tanpa tegas mengambil keputusan untuk melaksanakan eksekusi mati tersebut. SBY lebih mementingkan mencari situasi aman dan membangun citra positif dalam mata dunia internasional dan dengan jelas ingin menjaga nama baik di pemerintahan Australia. SBY dinilai tidak tegas dalam kasus ini karena tidak cepat mengambil keputusan, bahkan SBY melakukan penundaan sekitar 10 tahun dengan sengaja tidak memproses grasi yang diajukan oleh kedua terpidana mati tersebut.

Sedangkan kasus eksekusi mati "duo bali nine" pada masa pemerintahan Presiden Jokowi mengalami keterbalikan. Jokowi dengan tegas menolak pengajuan grasi dari kedua terpidana mati ini dan langsung membuat keputusan untuk melaksanakan eksekusi mati dengan mengemukakan alasan bahwa setiap bulan ada sekitar 1500 anak muda Indonesia meninggal karena narkoba. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat narkoba. Jokowi juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para bandar narkoba ini telah merusak jutaan generasi muda Indonesia demi kepentingan pribadi/kelompoknya. Hal ini menurut Jokowi tidak bisa ditolerir dan eksekusi mati ini harus dilakukan agar timbul

⁵² Nico Harjanto peneliti dari Populi Center dalam laporannya yang berjudul "hukuman mati warisan SBY" dalam www.inilah.com (diakses pada tanggal 15 juni pukul 00:50 WITA)

efek jera bagi pelaku.⁵³ Jokowi juga menegaskan, Indonesia sangat ingin bersahabat dengan Negara manapun, terlebih lagi Negara tetangga. Namun, jika menyangkut masalah hukum, itu adalah kedaulatan Indonesia yang harus dihormati.⁵⁴ Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa eksekusi mati adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan maka dari itu Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan. Namun, khususnya jika berhubungan dengan narkoba, sudah bisa dipastikan bahwa tidak akan ada pengedar narkoba yang lolos dari jerat hukum maksimal khususnya yang ada di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga meminta agar sikap Indonesia tidak diintervensi oleh pihak manapun.⁵⁵

Dengan terlaksananya eksekusi mati, maka persoalan lain pun ikut mencuat yakni masalah HAM. Karena proses eksekusi mati ini bertentangan dengan Hak Hidup. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Karena setiap manusia di bumi ini mempunyai hak yang sama akan hal itu sebagaimana juga yang dijamin dalam konstitusi RI. Pelaksanaan eksekusi mati ini pada akhirnya menimbulkan wacana negatif tentang keberadaannya, karena merampas hak hidup seorang manusia dan sangat jelas bahwa hal itu dilarang. Dengan melihat berbagai tulisan yang memiliki kesamaan objek khususnya dalam kasus ini, maka penulis ingin membuat hal yang baru dengan menambahkan isu HAM di dalamnya. Masih sangat minimnya pembahasan tentang HAM dan eksekusi mati khususnya pada kasus “duo bali nine” ini. Judul ini kemudian menjadi penting karena selain membahas hal yang sangat kritis yakni HAM, kemudian penelitian ini penting untuk diteliti karena membahas dua era kepemimpinan yang berbeda dalam melihat suatu isu dan kasus yang sama.

Dengan melihat fenomena yang terjadi, pada akhirnya penulis berada pada pihak yang mempunyai argumentasi terkait dengan fenomena ini. Penulis berasumsi bahwa eksekusi mati khususnya di Indonesia bukan hanya sekali terjadi, akan tetapi eksekusi mati sudah sering diterapkan dalam mengatasi masalah besar di Indonesia. Selain ingin memberikan efek jera bagi para pelaku dan atau bagi calon pelaku kejahatan tersebut. Dalam kasus eksekusi mati “duo bali nine” sudah sangat jelas adanya perbedaan pandangan antara 2 masa kepemimpinan yang berbeda. yang telah diketahui bersama bahwa masa kepemimpinan SBY yang seolah-olah tidak langsung mengambil langkah tegas dalam mengambil kebijakan eksekusi mati tersebut melainkan karena ingin menjaga tali silaturahmi dan jalinan kerjasama yang telah lama terjalin khususnya dengan Australia. Presiden SBY tidak memproses grasi dan menunda kasus ini hingga 10 tahun lamanya. SBY sangat menjaga citra Negara yang sebenarnya baik dalam hal menjalin kerjasama antar Negara, Sedangkan masa pemerintahan Jokowi berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan sebelumnya. Presiden Jokowi dengan tegas menolak segala bentuk upaya-upaya yang diajukan oleh pemerintah Australia dan juga menolak grasi, hingga pada akhirnya di masa kepemimpinan Presiden Jokowi eksekusi mati dilakukan, Presiden

⁵³Harian Jokowi dalam harianjokowi.blogspot.co.id (diakses pada tanggal 15 juni 2016 pukul 01.12 WITA)

⁵⁴Eksekusi Mati “duo bali nine” dalam news.detik.com (diakses pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 21:29 WITA)

⁵⁵Eksekusi Mati “duo bali nine” dalam news.detik.com (diakses pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 21:30 WITA)

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa eksekusi mati tertuang pada perundang-undangan yang ada. Akan tetapi bisa diprediksi bahwa di mata internasional, Jokowi dianggap melakukan pelanggaran HAM karena menyangkut dengan hak hidup yang dimiliki oleh kedua terpidana mati tersebut. Jokowi dituding merampas hak hidup kedua terpidana mati tersebut, bahkan Jokowi tidak memberikan jeda bagi terpidana mati untuk berubah setelah proses grasi ditolak. Dengan alasan lebih melindungi generasi penerus bangsa, Jokowi juga menekankan pada masalah kedaulatan bangsa yang harus dihormati dan dihargai oleh seluruh Negara di dunia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang telah dan sedang berlangsung. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan "apa", "bagaimana", dan "mengapa". Tipe penelitian ini juga mencakup pengumpulan fakta, pemilihan kata dan generalisasi kata. Tipe penelitian deskriptif juga merupakan tipe penelitian yang menggunakan pola penggambaran fakta yang empiris dan disertai dengan argumen yang mendukung atau relevan. Pola ini digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai adanya perbedaan visi tentang penegakan isu HAM di era kepemimpinan SBY dan Jokowi serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan visi tersebut. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder, dimana data sekunder merupakan kumpulan data yang berasal dari buku, jurnal, skripsi hasil penelitian, dokumen dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi Penegakan HAM di era kepemimpinan SBY-Jokowi

Didalam era kepemimpinan SBY selama dua periode, SBY menjabarkan visinya yang harus menghormati HAM. Visi tersebut antara lain; Penghargaan terhadap HAM mutlak harus diwujudkan dalam Negara Indonesia yang demokratis serta mengembangkan substansi demokratis itu sendiri yakni kebebasan, penegakan keadilan dan hukum serta adanya rasa tanggung jawab dalam segala hal untuk mempertahankan dan memperjuangkan HAM. Di era kepemimpinan SBY pelanggaran HAM masih terus terjadi dan meluas di berbagai sektor. Hal ini mencerminkan kegagalan SBY khususnya untuk memberikan perlindungan HAM dalam hal gagal memastikan adanya penghukuman yang akuntabel atas kekerasan-kekerasan yang terjadi, terutama jika kekerasan tersebut dilakukan oleh aparaturnegara dan kolabor-kolabornya. Baik yang terjadi dimasa reformasi maupun dimasa orde baru. Kalaupun ada penyelesaian tersebut maka hal itu tidak memenuhi

aspek keadilan dan tidak memuaskan korban. Sebelum “duo bali nine” pada era kepemimpinan SBY kasus eksekusi mati karena narkoba pernah terjadi dengan terpidana dua warga nigeria bernama Samuel Iwuchukwu dan Hansen Anthony Nwolisa yang dieksekusi mati pada tanggal 26 Juni 2008 dalam kasus penyelundupan heroin seberat 3,8 kg yang disembunyikan Iwuchukwu

Di dalam tasnya saat masuk ke Indonesia serta 3,2 kg yang diselundupkan oleh Hansen dengan cara ditelan.⁵⁶ Adapun kasus “duo bali nine” yang terjadi pada masa pemerintahan SBY dengan dua terpidana mati warga Negara Australia yang menjadi tersangka yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Jika dibandingkan dengan dua warga nigeria sebelumnya, “duo bali nine” tidak langsung dieksekusi mati setelah keluarnya vonis akan tetapi semenjak terhitung keluarnya vonis eksekusi mati, kasus “duo bali nine” mengalami penundaan dalam hal eksekusi itu sendiri dan grasi yang diajukan. Tersangka mengajukan grasi kepada Presiden SBY yang masih menjabat saat itu untuk meringankan hukuman akan tetapi kemudian grasi tersebut tidak diproses bahkan tidak dipedulikan sama sekali oleh SBY yang kemudian pada akhirnya proses eksekusi mati “duo bali nine” tertunda hingga 10 tahun lamanya. Eksekusi mati “duo bali nine” tertunda karena SBY lebih memilih untuk tidak mendalami kasus ini, dengan lebih fokus kepada permasalahan lain di era kepemimpinannya. Setelah dua periode kepemimpinan SBY, grasi pun tetap tidak diproses hingga selesainya era kepemimpinan SBY.

Hal ini mengakibatkan SBY dinilai sebagai pemimpin yang lamban dan tidak tegas dalam menyetarakan keadilan yang sebelumnya diterapkan dalam eksekusi mati kepada dua warga nigeria tersebut. SBY dalam hal ini memilih untuk diam dan tidak memproses eksekusi mati “duo bali nine” tersebut dikarenakan SBY tidak ingin menjadi “musuh” dari Australia pada saat itu. SBY dinilai tidak tegas dalam mengambil keputusan tentang hal ini dikarenakan Australia yang menjadi Negara donor terbesar untuk Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa sumbangsih Australia untuk Indonesia cukup dominan dalam hal pemberian bantuan bencana alam, penerima bantuan pembangunan resmi terbesar dari Australia serta pemberian beasiswa terbesar untuk Indonesia.

Visi penegakan HAM pada era kepemimpinan SBY yakni terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan HAM. Khususnya pada bidang hukum, pertahanan dan keamanan Negara, hasil-hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan pada era kepemimpinan SBY antara lain dalam hal peningkatan pengungkapan perkara dilihat tampak meningkat terutama pada beberapa jenis kejahatan seperti kejahatan transnasional yakni dalam hal ini tentang kejahatan narkoba, telah dilaksanakan berbagai program pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi serta sanksi tegas yang diberikan. Sanksi tegas yang diberikan berupa eksekusi mati yang dilakukan.

⁵⁶Rubrik hukuman mati bagi dua Negara nigeria” dalam www.breakingworldnews.com (diakses pada tanggal 7 Agustus 2016 pukul 17:04 WITA)

Kebijakan luar negeri SBY yakni "million friends and zero enemy" merupakan kebijakan yang berarti selama era kepemimpinannya, SBY lebih memilih untuk memperbanyak teman dan mengurangi musuh. Hal ini kemudian menjadi tolak ukur bagi SBY untuk tetap menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah Australia dengan cara menunda eksekusi mati terhadap "duo bali nine" bahkan tidak memproses grasi yang diajukan. Dengan kebijakan tersebut juga SBY seolah-olah tidak tegas dalam memberi kebijakan eksekusi mati jika dibandingkan dengan telah terlaksananya eksekusi mati kasus narkoba kepada dua warga nigeria pada tahun 2006 silam. Selain hal tersebut, SBY mengatakan bahwa ia telah berupaya untuk meningkatkan persahabatan dengan Australia selama kurun waktu 10 tahun terakhir dalam hal berbagai peningkatan kerjasama pada bidang apapun. Upaya SBY untuk membangun persahabatan lebih baik lagi dengan Australia, merupakan hal yang dilanjutkan oleh SBY dari era kepemimpinan sebelumnya. Hal ini kemudian menjadi tuntutan bagi SBY untuk tetap menjaga hubungan baik yang telah dijalin sejak lama dengan pihak pemerintah Australia. Dengan cara inilah, SBY lebih akan fokus dengan berbagai kerjasama yang telah dilakukan atau yang sementara dilakukan dengan pihak pemerintahan Australia. Oleh karena itu, pihak pemerintah Australia juga memiliki alasan yang kuat untuk melaksanakan diplomasi dengan pihak pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati terhadap kedua warga Negeranya tersebut.

Sedangkan dalam era kepemimpinan Jokowi, visi penegakan HAM yang dicanangkan adalah: memberikan rasa aman kepada setiap warga Negara Indonesia dengan menciptakan pertahanan dan keamanan nasional demi berlangsungnya hidup yang sejahtera dan bebas dari gangguan dari dalam negeri Indonesia sendiri bahkan dari luar negeri sehingga kedaulatan wilayah dapat terjaga dengan baik, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan sejahtera serta melindungi segenap bangsa beserta warga Negara dan memberikan rasa aman dalam menjalankan hidup sehari-hari. Berbagai visi tentang HAM yang dicanangkan tersebut tidak lain hanya memiliki satu tujuan yakni melindungi dan menegakkan HAM dari berbagai pelanggaran yang terjadi.⁵⁷

Setelah mendapatkan penundaan pelaksanaan eksekusi mati sekitar 10 tahun lamanya, Jokowi dengan tegas mengeluarkan kebijakan untuk menolak grasi yang ditujukan kepadanya dan langsung memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana eksekusi mati "duo bali nine" tersebut. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memasuki Negara darurat narkoba sehingga tidak ada ampun terhadap para bandar, pengedar dan pemakai narkoba. Hal ini dilakukan mengingat generasi penerus bangsa sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan kehidupan bernegara Indonesia. Jokowi melaksanakan eksekusi mati "duo bali nine" ini dengan dalih bahwa pelaku kejahatan tentang narkoba sulit untuk di maafkan karena pada umumnya mereka adalah para bandar besar yang demi

⁵⁷Era kepemimpinan Jokowi serta Penegakan HAM" dalam www.regionalKompas.com (diakses pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 23:30 WITA)

demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa. Eksekusi mati ini juga dilakukan agar timbulnya efek jera bagi pelaku kejahatan serta eksekusi mati sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang akan atau telah melakukan kejahatan serupa. Dengan melihat aspek Hukum berupa, dorongan dari Mahkamah Agung. Hal ini juga membuktikan bahwa Jokowi tidak pandang bulu dalam memerangi narkoba khususnya di Indonesia.⁵⁸ Kasus eksekusi mati “duo bali nine” merupakan kasus yang sifatnya lintas Negara, yakni melibatkan Australia. Dalam sejarahnya, Indonesia dan Australia telah banyak terlibat dalam suatu kasus sebelum kasus eksekusi mati “duo bali nine” ini. Salah satu hal inilah yang membuat Jokowi untuk tetap bertindak tegas dalam hal pelaksanaan eksekusi mati tersebut. Pihak pemerintah Australia pun telah berupaya mengajukan grasi untuk mendapatkan keringanan hukuman atas dua warga Negaranya. Akan tetapi Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang darurat akan narkoba, oleh karena itu Jokowi lebih memilih untuk melindungi segenap penerus bangsa agar perlahan-lahan terhindar dari kejahatan narkoba dengan cara tetap melaksanakan eksekusi mati tersebut.

Pada era kepemimpinannya, Jokowi lebih fokus untuk memerangi narkoba di Indonesia. Eksekusi mati merupakan cara yang tepat untuk membuktikan bahwa Negara Indonesia serius dalam memerangi kasus narkoba. Dalam hal ini, Jokowi dinilai lebih menekankan bahwa Negara Indonesia tidak boleh kehilangan wibawa karena dikendalikan oleh para pelaku tindakan narkoba, khususnya dengan Negara lain yakni Australia.⁵⁹ Setelah mendapat penundaan sekitar sepuluh tahun lamanya dari era kepemimpinan SBY, kasus “duo bali nine” dinilai sudah cukup banyak menerima tekanan dari pihak pemerintah Australia. Hal ini seolah-olah membuat Indonesia tidak mempunyai harga diri dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan eksekusi mati “duo bali nine” tersebut. Hal inilah yang membuat Jokowi dengan tegas memberikan perintah untuk melaksanakan eksekusi mati “duo bali nine” tersebut. Hal lain yakni, Jokowi melihat kasus tersebut merupakan kasus lintas Negara yang kemudian berkaitan dengan masalah kedaulatan Negara yang wajib dihormati dan dihargai oleh seluruh Negara di dunia. Dalam kasus eksekusi mati “duo bali nine” ini, Jokowi mengaskan bahwa intervensi tidak dibutuhkan dalam hal pelaksanaan eksekusi mati tersebut karena hal ini menyangkut kedaulatan Negara, kedaulatan hukum serta kedaulatan politik Negara Indonesia. Kedaulatan inilah yang menjadi fokus utama Jokowi untuk melaksanakan eksekusi mati “duo bali nine” tersebut, karena kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang melanggar kedaulatan Negara Indonesia, karena melintasi batas Negara dengan terpidana mati warga Negara Australia.⁶⁰

Dalam pelaksanaan eksekusi mati “duo bali nine” tersebut, terdapat pihak pro dan kontra di dalamnya. Pihak pro, yakni pihak yang setuju akan pelaksanaan eksekusi mati “duo bali nine”, menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi mati ini

⁵⁸ Jokowi tolak permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba” dalam <http://regional.kompas.com> (diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 00:34 WITA)

⁵⁹ Peta diskursus hukuman mati di era Jokowi” dalam www.ejournal.fisip-unmu.com (diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 22:30 WITA)

⁶⁰ Jokowi tolak permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba” dalam <http://regional.kompas.com> (diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 00:39 WITA)

merupakan cara yang tepat untuk memerangi kasus narkoba di Indonesia yang pada zaman ini telah memasuki Negara darurat narkoba serta pelaksanaan eksekusi mati merupakan cara yang tepat untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia di mata dunia internasional dalam hal mempertahankan serta menjunjung tinggi kedaulatan Negara Indonesia, dimana kedaulatan merupakan hal yang utama dalam pembentukan Negara dan merupakan citra bangsa yang harus di hargai dan di hormati oleh seluruh Negara di dunia.

Sedangkan pada pihak yang kontra, yakni pihak yang tidak setuju akan pelaksanaan eksekusi mati "duo bali nine" tersebut, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mati "duo bali nine" ini merupakan hal yang bertentangan dengan HAM. Hal ini disebabkan karena masing-masing manusia memiliki HAM yang harus dijaga dan dihormati keberadaannya. Secara langsung, pelaksanaan eksekusi mati "duo bali nine" ini merupakan hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena, pelaksanaan eksekusi mati merupakan hal yang dengan jelas merampas hak hidup suatu manusia beserta hak untuk mendapatkan keadilan di muka hukum. Hal ini kemudian menjadi kontroversi atas pelaksanaannya, karena selain mengganggu kedaulatan Negara Indonesia atas kejahatan lintas Negara yang dilakukan oleh kedua terpidana eksekusi mati tersebut, hal ini juga mengambil hak hidup serta hak untuk mendapatkan perlindungan di mata hukum yang wajib dihormati oleh setiap orang.

Menurut konsep HAM yang diadopsi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyatakan bahwa DUHAM menjadi acuan internasional untuk menentukan batasan-batasan HAM, yang pada dasarnya berpatokan pada terwujudnya kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. DUHAM merupakan "alat" untuk menjadi acuan dalam bertindak untuk mencapai keadilan di mata hukum terkait dengan adanya HAM yang melekat di setiap manusia di dunia. Kasus eksekusi mati "duo bali nine" sama-sama melibatkan Negara yang ikut meratifikasi DUHAM yakni Indonesia dan Australia. Dimana Indonesia dan Australia merupakan anggota tetap dari DUHAM. Hal ini mengakibatkan pasca penjatuhan vonis eksekusi mati "duo bali nine" tersebut dilakukan, hubungan antar kedua Negara tersebut sempat mengalami ketegangan. Sebagaimana yang telah dituliskan di dalam DUHAM bahwa "pembangunan hubungan persahabatan diantara Negara-Negara perlu ditingkatkan serta Negara-Negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa". Penetapan vonis eksekusi mati "duo bali nine" ini kemudian dinilai sebagai hal yang kontroversi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibawah era kepemimpinan SBY karena eksekusi mati dinilai bertentangan dengan isi DUHAM. Bahwa, suatu Negara tidak mempunyai hak untuk mengakhiri hidup seseorang dan siapapun di dunia ini yang melakukan tindakan kriminal tentang narkoba, layak

dihukum tetapi bukan dengan eksekusi mati. Indonesia merupakan anggota dari DUHAM dimana isi DUHAM yang paling dasar adalah mengatur tentang hak untuk hidup setiap manusia di dunia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan Visi penegakan HAM

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi mati terhadap “duo bali nine” tersebut, lebih cenderung merujuk kepada Kepentingan Nasional masing-masing didalam era kepemimpinan yang berbeda pula. Adanya kepentingan nasional yang berbeda tersebut, menyebabkan adanya perlakuan berbeda pula terhadap terpidana eksekusi mati “duo bali nine” tersebut. Menurut Hans Mogenthau, kepentingan nasional merupakan suatu “kekuatan” atau power yang dimiliki oleh suatu pemimpin dan dengan kekuatan tersebut dapat mempengaruhi aktor lain dalam rangka mencapai kepentingan-kepentingan Negaranya. Hal ini membuktikan pernyataan diatas bahwa adanya perlakuan berbeda terhadap kasus yang sama didalam era kepemimpinan yang berbeda pula. Dalam kasus “duo bali nine” ini terdapat strategi yang berbeda dalam menyikapi kasus tersebut. Strategi ini bersifat diplomasi yang berdasarkan kepada kepentingan nasional.

Kepentingan Nasional, ini pula yang digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. Menurut Mogenthau, suatu Negara dapat mengadili Negara lain yang kemudian menguntungkan kepentingan nasional demi keamanan dan keselamatan suatu bangsa tersebut. Tercapainya kepentingan nasional merupakan cerminan dari power yang dimiliki oleh suatu pemimpin dengan cara mencapai kekuasaan yang bersifat menguntungkan masing-masing Negara yang terlibat. Kasus “duo bali nine” merupakan kasus lanjutan dari era kepemimpinan SBY yang tidak diproses lebih lanjut. SBY lebih memilih mewariskan kasus ini kepada era kepemimpinan selanjutnya dan cenderung tidak ingin disorot oleh dunia atas pelaksanaan eksekusi mati tersebut. SBY dinilai tidak tegas bahkan takut untuk berurusan dengan pihak pemerintahan Australia yang dimana di dalam era kepemimpinannya menjalin kerjasama yang begitu baik. Kembali lagi dengan kebijakan politik luar negeri SBY, yakni Million Friends and Zero Enemy. SBY terkesan tidak ingin untuk menjadi musuh Negara tetangga yang pada era kepemimpinannya cukup banyak membantu Indonesia dalam hal kerjasama yang saling menguntungkan. Pada hakikatnya, hubungan antara Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan dalam hal meniti kerjasama guna untuk membuat lebih baik hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini tercermin dalamrealitas hubungan kedua Negara yang berdasarkan pada kepentingan nasional masing-masing Negara. Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, terdapat beberapa peristiwa yang kurang baik antara Indonesia dan Australia.

merupakan cara yang tepat untuk memerangi kasus narkoba di Indonesia yang pada zaman ini telah memasuki Negara darurat narkoba serta pelaksanaan eksekusi mati merupakan cara yang tepat untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia di mata dunia internasional dalam hal mempertahankan serta menjunjung tinggi kedaulatan Negara Indonesia, dimana kedaulatan merupakan hal yang utama dalam pembentukan Negara dan merupakan citra bangsa yang harus di hargai dan di hormati oleh seluruh Negara di dunia.

Sedangkan pada pihak yang kontra, yakni pihak yang tidak setuju akan pelaksanaan eksekusi mati "duo bali nine" tersebut, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mati "duo bali nine" ini merupakan hal yang bertentangan dengan HAM. Hal ini disebabkan karena masing-masing manusia memiliki HAM yang harus dijaga dan dihormati keberadaannya. Secara langsung, pelaksanaan eksekusi mati "duo bali nine" ini merupakan hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena, pelaksanaan eksekusi mati merupakan hal yang dengan jelas merampas hak hidup suatu manusia beserta hak untuk mendapatkan keadilan di muka hukum. Hal ini kemudian menjadi kontroversi atas pelaksanaannya, karena selain mengganggu kedaulatan Negara Indonesia atas kejahatan lintas Negara yang dilakukan oleh kedua terpidana eksekusi mati tersebut, hal ini juga mengambil hak hidup serta hak untuk mendapatkan perlindungan di mata hukum yang wajib dihormati oleh setiap orang. Hal ini yang membuat hubungan antara kedua Negara mengalami pasang surut. Akan tetapi, Indonesia dan Australia selalu mencoba untuk memperbaiki kembali hubungan mereka. Kemauan untuk memperbaiki hubungan bilateral ini semata-mata untuk tetap terjalinnya kerjasama diantara kedua Negara tersebut.

Berbeda dengan SBY, pada era kepemimpinan Jokowi dengan pelaksanaan eksekusi mati "duo bali nine" tersebut, terdapat faktor kepentingan nasional yang mendasarinya. Eksekusi mati "duo bali nine" ini merupakan langkah kebijakan tegas yang diambil demi sebuah komitmen untuk tetap "perang" dengan narkoba. Menurut Jokowi, narkoba harus diperangi secara serius dengan alasan bahwa narkoba bisa merusak karakter, fisik, dan kesehatan manusia kemudian jika hal tersebut terjadi dalam jangka panjang, maka akan mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Jokowi menilai bahwa kejahatan narkoba sudah termasuk ke dalam tindak kejahatan luar biasa, terlebih lagi kejahatan narkoba yang terjadi di lintas Negara antara Indonesia dan Australia. Kejahatan lintas Negara ini merupakan kejahatan yang terorganisir sehingga kemudian kasus ini menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. Untuk mencapai kepentingan nasional, Jokowi dengan tegas mengambil keputusan untuk menolak grasi terpidana eksekusi mati "Duo bali nine".

Jokowi ingin menunjukkan kepada dunia tentang era kepemimpinan yang baru dengan pemimpin yang baru pula. Jokowi sangat bertolak belakang dengan

pemimpin yang baru pula. Jokowi sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang dilakukan dengan SBY terkait kasus “duo bali nine” tersebut. Dalam hal ini, kepentingan nasional Jokowi adalah tetap melaksanakan eksekusi mati terhadap kedua terpidana eksekusi mati “duo bali nine” tersebut serta lebih ke arah menantang pihak pemerintahan Australia untuk tetap menghargai keputusan yang diambil olehnya sebagai hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden.

Hal yang harus diketahui bahwa, setiap era kepemimpinan wajib memiliki kebijakan yang memiliki konteks yang berbeda demi tercapainya kepentingan nasional. Di dalam era kepemimpinan Jokowi, kepentingan nasional lain yang ingin dicapai Jokowi adalah menjunjung tinggi citra bangsa Indonesia di mata dunia khususnya dalam hal pemberantasan narkoba. Yang dimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara darurat narkoba di dunia. Selain itu, Jokowi ingin menegaskan bahwa Indonesia bisa menjadi Negara yang mandiri dan tegas akan keputusan yang telah diambil dan resiko yang akan diterima setelah pelaksanaan eksekusi mati tersebut. Adanya hal tersebut dapat mencapai kepentingan nasional untuk menaikkan citra bangsa Indonesia yang selama ini dikenal tidak tegas dalam hal memberantas kejahatan lintas Negara, khususnya kasus narkoba. Pada intinya, pada era kepemimpinan SBY maupun era kepemimpinan Jokowi, hal yang ingin dicapai adalah tetap terciptanya kerja sama atau tetap menjalin hubungan bilateral antara suatu Negara dengan Negara lain. Khususnya dalam kasus ini adalah Negara Indonesia dan Australia, yakni dengan syarat untuk tetap menghormati kebijakan apapun yang menyangkut kedaulatan Negara Indonesia. Kasus eksekusi mati “duo bali nine” ini merupakan kasus yang tidak membutuhkan intervensi dari Negara manapun, karena setiap Negara memiliki kedaulatan Negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan politik yang harus dihargai dan dihormati oleh seluruh Negara di dunia begitu pula Indonesia.

Selain kepentingan nasional, faktor lain yang mempengaruhi perbedaan visi penegakan HAM adalah aspek Idiosinkretik. Aspek ini menekankan kepada aktor yang melakukan pengambilan keputusan (decision maker) guna untuk memegang kendali yang sangat besar terhadap output kebijakan yang dihasilkan. Aspek idiosinkretik merupakan sistem nilai, keyakinan, citra yang dimiliki seseorang sehingga mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakannya terhadap suatu fenomena atau objek tertentu. Aspek idiosinkretik cenderung kepada individu yang mendasari lahirnya sebuah kebijakan. Di dalam era kepemimpinan SBY, aspek idiosinkretik berupa memilih tindakan untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini ditekankan kembali bahwa SBY merupakan individu yang lebih memilih memperbanyak teman daripada harus menambah musuh dengan cara melaksanakan eksekusi mati terhadap dua warga Negara yang berasal dari Negara sahabatnya sendiri yakni Australia.

SBY dengan kebijakan untuk menunda proses pelaksanaan eksekusi mati tersebut dan tidak secara lanjut memproses grasi, hal ini merupakan aspek individu suatu pemimpin Negara yang tidak tegas dan tidak berani dalam mengambil keputusan beserta resiko setelahnya. Aspek yang ingin dicapai SBY secara individual adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai Negara di dunia. Mulai dari people to people kemudian ke arah nation to nation yang lebih luas cakupannya. Jika Indonesia cukup menggandeng banyak Negara untuk bekerjasama, maka hal ini akan membanggakan Indonesia atas usaha untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di percaturan politik dunia. Gaya kepemimpinan SBY yang menjunjung tinggi Million Friends and Zero Enemy dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan Negara-Negara lain untuk menjalin hubungan erat yang kokoh dan jauh dari permusuhan. Selain itu, pada era kepemimpinan SBY juga menekankan pada prinsip persatuan yang kuat dan kerjasama di berbagai bidang. Contohnya bidang ekonomi yang dilakukan dengan pemerintah Australia. Hal ini yang membuat SBY untuk tidak melaksanakan eksekusi mati terhadap "duo bali nine" karena mengingat berbagai kerjasama dan perjanjian yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia yang cukup banyak dan menjanjikan untuk mencapai kepentingan nasional bahkan kepentingan individual SBY yang dikenal dengan pencitraan.

Sedangkan pada era kepemimpinan Jokowi, aspek idiosinkretik yang terlihat yakni, Jokowi lebih berani dalam mengambil keputusan dengan menggunakan dalih "darurat". Dimana keadaan "darurat" narkoba di Indonesia menjadi fokus Jokowi untuk tetap melaksanakan eksekusi mati "duo bali nine" tersebut. Tanpa melihat resiko yang pasti terjadi setelah pelaksanaan eksekusi mati tersebut. Intinya, Jokowi lebih menegaskan tentang kedaulatan Negara Indonesia yang harus dihargai dan dihormati oleh pihak pemerintah Australia. Dalam era kepemimpinan Jokowi, pemerintah Indonesia akan melindungi seluruh wilayah Indonesia dan menjaga kepentingan warga Negara Indonesia di dalam maupun luar negeri. Hal ini yang kemudian membuat Jokowi lebih tegas atas kedaulatan Negara Indonesia yang merupakan prioritas utama Jokowi dalam memimpin, khususnya dalam bidang Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pada era kepemimpinan Jokowi, Indonesia telah cukup banyak membantu Negara lain dalam berbagai bidang dengan alasan keamanan bukan hanya politik semata.

Hal ini yang Jokowi harapkan dari berbagai Negara didunia untuk mempertimbangkan "keamanan" sebagai suatu prioritas utama yang harus menjadi komitmen antar suatu Negara dengan Negara lain. Secara individual, cara memimpin Jokowi dinilai lebih tegas dan lebih berani dalam menghadapi berbagai tekanan dari Australia. Pasalnya, bukan hanya dari kedua terpidana eksekusi mati "duo bali nine" saja yang mengupayakan agar pelaksanaan eksekusi mati tersebut batal dilaksanakan.

Melainkan, pihak pemerintah Australia dengan gencar mengupayakan agar pelaksanaan eksekusi mati tersebut dihapuskan dan ditiadakan untuk “duo bali nine”. Akan tetapi, Jokowi tidak terpengaruh atas berbagai tekanan dan ancaman yang ditujukan kepada Negara Indonesia, Jokowi tidak bergeming tentang keputusannya untuk tetap melaksanakan eksekusi mati tersebut.

Di dalam pembahasan ini, penulis berada pada pihak yang tidak mengafirmasi masing-masing kebijakan pada era kepemimpinan yang berbeda. Penulis tidak setuju dengan adanya penundaan pelaksanaan eksekusi mati pada era kepemimpinan SBY dan juga tidak setuju dengan pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan oleh Jokowi. HAM sangat penting bagi seluruh Negara di dunia. Akan tetapi, di Indonesia sering gagal dalam hal memelihara komitmen terhadap penerapan hak-hak tersebut. Pelaksanaan eksekusi mati “duo bali nine” ini merupakan contoh nyata dari pengabaian hak hidup. Kebijakan ini kemudian berlawanan dengan upaya Indonesia untuk menyelamatkan nyawa para penduduk Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman eksekusi mati di luar negeri. Akan tetapi, hal ini harus diperhatikan oleh pihak pemerintah Indonesia dalam hal untuk membela warga Negaranya di luar negeri. Namun, dari sudut pandang moral, kebijakan untuk membela warga Negara sendiri dengan mengeksekusi mati warga Negara lain di Indonesia merupakan cara yang tidak tepat dan tidak adil.

Penulis tidak setuju dengan adanya pelaksanaan eksekusi mati. Karena, eksekusi mati tidak menjamin akan selalu mencegah kejahatan. Contoh kasus seperti “duo bali nine” yang dieksekusi mati. Akan tetapi setelah beberapa bulan, terjadi kasus serupa yang pada akhirnya kemudian juga dilaksanakan eksekusi mati. Pelaksanaan eksekusi mati belum tepat untuk memberantas kejahatan narkoba di Indonesia karena efek jera yang ditekankan belum terlihat efektif, melihat pengedaran narkoba di Indonesia masih terus berlangsung. Pemerintah Indonesia, khususnya pada era kepemimpinan Jokowi, harus dapat memberikan cara lain untuk memberantas kejahatan narkoba selain pelaksanaan eksekusi mati. Karena eksekusi mati bukan jalan keluar untuk menghukum seseorang terpidana narkoba. Di dalam diskusi publik yang dilakukan, dapat dilihat adanya perbedaan era kepemimpinan, khususnya dalam politik eksekusi mati pada era kepemimpinan SBY dan era kepemimpinan Jokowi. Menurut Penulis, Pada era kepemimpinan SBY, penjatuhan vonis eksekusi mati dilakukan dengan diikuti oleh semacam sifat ketidakmauan SBY dalam mengoordinasi penjatuhan vonis eksekusi mati. Kemudian, terdapat sedikit unsur “terpaksa” didalamnya yang dilaksanakan dengan cara tanpa memperluas pemberitaan eksekusi mati “duo bali nine” tersebut dan seolah-olah hanya demi memenuhi tuntutan hukum di Indonesia. Buktinya adalah, setelah penjatuhan vonis tersebut dan setelah menunggu sekitar 10 tahun lamanya, proses eksekusi mati tersebut tak kunjung dilakukan pada era kepemimpinan SBY.

Kemudian pada era kepemimpinan Jokowi, eksekusi mati diumumkan secara terbuka dan transparansi. Eksekusinya "duo bali nine" ini mencerminkan adanya kemauan Jokowi untuk memperlihatkan ke dunia Internasional, bahwa pelaksanaan eksekusi mati ini dengan tegas dilakukan di Indonesia pada era kepemimpinannya yang belum memenuhi satu periode tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada masing-masing era kepemimpinan, tujuan yang ingin dicapai terhadap kasus eksekusi mati "duo bali nine" adalah sama-sama ingin melindungi dan menegakan HAM dari berbagai pelanggaran yang terjadi. Pada era kepemimpinan SBY, dengan kebijakan politik luar negerinya "Million Friends Zero Enemy" yang dicerminkan dengan keputusan SBY lebih memilih untuk tidak melaksanakan eksekusi mati terhadap kedua terpidana mati "duo bali nine". Karena, sesuai dengan kebijakan politik luar negerinya, SBY tidak ingin menjadi musuh negara Australia yang dimana negara tersebut cukup banyak membantu dan menjalin kerjasama dengan Indonesia. Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh SBY adalah bahwa dengan menunda pelaksanaan eksekusi mati tersebut dapat tetap meminimalisir ketegangan hubungan dengan Australia serta jalinan kerjasama dengan Australia tetap terjalin. Dengan kata lain, SBY lebih meminimalisir musuh dibandingkan dengan harus bersitegang dengan negara tetangga. Sedangkan pada era kepemimpinan Jokowi, ia lebih memilih untuk melindungi generasi muda yang telah "darurat narkoba" dibandingkan harus menunda. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia perlu untuk dihormati oleh negara lain khususnya dalam hal penyelundupan narkoba yang menurutnya melanggar kedaulatan negara.

Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dan tegas akan keputusan untuk melaksanakan eksekusi mati tersebut. Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Jokowi, yakni Jokowi ingin menaikkan citra bangsa Indonesia dimata dunia internasional yang selama ini masih dinilai minim dalam hal pencegahannya khususnya kasus narkoba. Selain faktor kepentingan nasional, faktor lainnya adalah faktor idiosinkretik, dimana pada era kepemimpinan SBY, dicerminkan dengan memilih tindakan berupa menunda dalam hal pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini merupakan aspek individual yang dimiliki oleh SBY dinilai tidak tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan pada era kepemimpinan Jokowi, aspek individual yang terlihat yakni Jokowi lebih berani dalam hal mengambil keputusan khususnya dalam kasus pelaksanaan eksekusi mati "duo bali nine" tersebut. Dimana keadaan "darurat narkoba" menjadi fokus utama Jokowi untuk melindungi generasi muda Indonesia dalam hal kasus narkoba.

Saran

Pelaksanaan eksekusi mati khususnya di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam lagi. Mengingat hal utama yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi mati adalah dengan adanya HAM yang dimiliki oleh setiap manusia. Dimana HAM merupakan hak dasar setiap manusia yang wajib dilindungi, dihormati dan tidak dapat dirampas oleh siapapun di dunia ini. pelaksanaan eksekusi mati bukan merupakan satu-satunya cara negara untuk memberantas narkoba. Karena jika dilihat pada zaman sekarang, masih merebaknya kasus narkoba setelah dilaksanakan eksekusi mati “duo bali nine” tersebut. hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati tidak serta-merta dapat mengurangi angka kejahatan narkoba khususnya di Indonesia.

Penulis juga ingin memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin membahas kasus ini, bahwa dengan mengingat penelitian ini hanya fokus kepada HAM beserta visi penegakannya. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya akan membahas kasus ini dengan mengambil fokus penelitian lain dengan aspek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Media Internet :

Analisa hubungan diplomatik indonesia terhadap australia, Diakses melalui <www.academia.edu/marketing.blogspotina-aus> diakses pada tanggal 22 desember 2015 pukul 19:59 WITA

Eksekusi Mati “duo bali nine”, Diakses melalui <www.detiknews.com> diakses pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 21:29 WITA

Era kepemimpinan Jokowi serta Penegakan HAM, Diakses melalui <www.regionalkompas.com>diakses pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 23:30 WITA

Harian Jokowi dalam 100 hari pemerintahan, Diakses melalui <www.harianjokowi.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 15 juni 2016 pukul 01.12 WITA

Jokowi tolak permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba, Diakses melalui <<http://regional.kompas.com>> diakses pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 00:34 WITA

Kontroversi hukuman mati dan relevansi terhadap HAM, Diakses melalui <www.cirebonmedia.com> diakses pada tanggal 14 juni 2016 pukul 22:32 WITA

Rubrik hukuman mati bagi dua terpidana mati warga negara nigeria, Diakses melalui <www.breakingworldnews.com> diakses pada tanggal 7 Agustus 2016 pukul 17:04 WITA

Jurnal dan Artikel :

Data tentang kasus-kasus pidana mati dalam pernyataan pers,pusat informasi hukum, kantor kejaksaan agung,28 oktober 2003, Diakses melalui <www.amnestyinternationalcharitylimited-pidana-mati-di-indonesia> diakses pada tanggal 14 juni 2016 pukul 23:51 WITA

Nico Harjanto peneliti dari Populi Center dalam laporannya yang berjudul “hukuman mati warisan SBY”, Diakses melalui <www.inilah.com> diakses pada tanggal 15 juni 2016 pukul 00:50 WITA

Peta diskursus hukuman mati di era Jokowi, Diakses melalui <www.ejournal.fisip-unmuh.com> diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 22:30 WITA

PERKEMBANGAN DRAMA KOREA DI AMERIKA SERIKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI KOREA SELATAN

Farid Sautama Hasyim

Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA
Finahliyah Hasan, S.Ip.,MA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan drama Korea di Amerika Serikat. (2) untuk mengetahui dampak perkembangan drama Korea di Amerika Serikat terhadap pembangunan ekonomi Korea Selatan. penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi, hasil penelitian dan artikel. Teknik analisis data meliputi tahap-tahap pengumpulan menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif, yaitu analisis data yang ditekankan pada data-data non-matematis. Analisis juga dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisis sejumlah data yang diperoleh, serta memberikan kesimpulan pada akhir pembahasan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa perkembangan drama Korea yang terjadi di Amerika Serikat sangat menguntungkan pembangunan ekonomi Korea Selatan dan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, diantaranya globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, adanya pengaruh nilai-nilai konfusianisme dan modernitas dan tentunya karena pemerintah Korea Selatan yang memanfaatkan diplomasi budayanya untuk pembangunan di Korea Selatan sendiri.

Kata Kunci : Globalisasi, Diplomasi Budaya, Drama Korea, Korean Wave, Korea Selatan, Amerika Serikat,

PENDAHULUAN

Perkembangan industri film di Asia mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini di buktikan dengan banyaknya industri film di Asia yang mampu bersaing dengan industri film di lingkup internasional. Seperti yang terlihat di beberapa Negara terkenal di Asia, yaitu, Jepang, China, India, ketiga Negara tersebut mempunyai ciri khas tersendiri di dalam industri filmnya yang membuatnya berbeda dari film lainnya yakni Jepang dengan Animenya, China dengan beladiri tradisionalnya dan India dengan ragam budaya melalui Bollywoodnya.

Drama korea mengacu pada drama televisi yang diproduksi di Korea Selatan. Banyak dari drama ini telah menjadi populer di seluruh Asia, dengan pertumbuhan yang menarik dibelahan dunia. Drama Korea telah memberi kontribusi pada lahirnya fenomen Korean Wave, dikenal juga sebagai Hallyu. Sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada popularitas hiburan Korea dan budaya di Asia, Hallyu atau Korean Wave pertama kali muncul pada pertengahan 1990-an setelah korea mengadakan hubungan diplomatik dengan China pada tahun 1992 dan drama TV Korea serta musik pop memperoleh popularitas besar di masyarakat China.⁶¹

Pertelevisian Korea Selatan baik SBS maupun KBS begitu massif dalam menayangkan dramanya di dalam Korea Selatan maupun di Amerika Serikat. Korea selatan pun tidak segan-segan untuk memperluas jangkanya dengan mendirikan kantor pertelevisiannya di Los Angeles Amerika Serikat. Drama Korea yang ditayangkan selalu berada di jam tayang utama atau Prime Time (18.00-22.00).⁶²

⁶¹Hallyu (Korean Wave). Sumber : <http://www.korea.net/AboutKorea/culture-and-the-arts/Hallyu>. Di akses pada tanggal 8 Agustus 2016 Pukul 15:53 WITA

⁶²<http://tvlistings.zap2it.com/tvlistings/ZCSGrid.do?stnNum=34164>

Selain mendapatkan jadwal prime time di amerika. KBS amerika mengungkapkan kesepakatan bersama U2K entertainment dalam American Film Market di santa monica, California. KBS amerika mengatakan, ada lima judul yang akan diproduksi ulang oleh Amerika Serikat yaitu “Full House” (2004), “Resurrection” (2005), “Iris” (2009), “Brain” (2011) dan “Orange Marmalade” (2015). U2K yang dibuat oleh Michael Uslan yang juga produser dari film Batman dan putranya telah mencapai kesepakatan tentatif dengan KBS Amerika pada 16 Oktober lalu untuk mendapatkan hak cipta drama “Resurrection” dan “Full House”. KBS Amerika dan U2K Entertainment juga sepakat bersama-sama membuat adaptasi dari webtoon terkenal Korea Selatan berjudul “PEAK” kesepakatan ini mewakili langkah pertama proyek Hallyu yang melibatkan konten luar biasa Korea Selatan dan produser Hollywood ternama, kata Yu Kon-shik, CEO KBS Amerika.⁶³ Drama Koreasecara masif telah menjadi wakil Korea ke penjuru dunia dan berhasil membuat mata Asia bahkan dunia mulai beralih ke semenanjung Korea bagian selatan. Kebangkitan Korea dan kemudian menjadi kiblat budaya Asia didasari atas semangat bersama untuk bangkit dari kesengsaraan. Konflik berlarat-larat tak menimbulkan pesimisme, melainkan gelombang semangat penuh daya juang.

METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan di pakai dalam penulisan ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang telah dan sedang berlangsung. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “apa”, “bagaimana” dan “mengapa”.Tipe penelitian ini juga mencakup pengumpulan fakta, pemilihan kata dan generalisasi fakta.

Tipe penelitian deskriptif juga merupakan tipe penelitian yang menggunakan pola penggambaran fakta yang empiris disertai argument yang mendukung atau relevan. Pola ini digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai perkembangan drama Korea di Amerika serikat dan dampaknya terhadap

b. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data sekunder. Data yang diperoleh adalah hasil dari pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai sumber literature yaitu beberapa buku, data olahan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang diterbitkan oleh lembaga terkait, terbitan berkala dan sumber-sumber lain yang relevan.

⁶³Sumber :<https://mmpo.co/read/news>. Di akses pada tanggal 16 Agustus 2016. Pukul 02:25 WITA

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa data menggunakan teknik analisa deskriptif-kualitatif, yaitu analisis data yang ditekankan pada data-data non-matematis. Analisis dilakukan terhadap pernyataan otoritas (ahli), kutipan dari sumber-sumber kepustakaan. Analisis juga dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisis sejumlah data yang diperoleh serta memberi kesimpulan pada akhir pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Globalisasi

Globalisasi adalah sebuah fenomena yang kompleks dan dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi menyentuh ke dalam hampir semua aspek kehidupan manusia sehingga suatu definisi tunggal barangkali tidak akan mampu menggambarkan fenomena yang sangat kompleks ini. Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan.⁶⁴

Globalisasi mengacu pada integrasi peningkatan produksi, pengembangan dan komunikasi antar bangsa pada skala dunia. Globalisasi sering dibagi menjadi tiga kategori: ekonomi, politik dan sosial. Meskipun ketiganya saling tergantung, kekuatan ekonomi dan politik biasanya faktor pendorong globalisasi, sementara perubahan sosial umumnya terjadi sebagai akibat dari kegiatan tersebut. Globalisasi sosial berkaitan dengan interaksi manusia dalam masyarakat budaya, meliputi topik seperti keluarga, agama, pekerjaan dan pendidikan.⁶⁵

Studi yang dilakukan oleh Scholte mengemukakan beberapa konsep dasar yang membentuk definisi Globalisasi sebagai internasionalisasi (Globalization as Internationalization). Dalam konteks ini terjadi hubungan timbal-balik dan ketergantungan antar negara yang termanifestasi dalam, investasi antar negara, serta lalu-lintas perdagangan internasional.

Dalam sebuah proses internasionalisasi terjadi hubungan timbal balik antara tiap aktor yang berperan. Hubungan timbal balik ini dapat berupa pertukaran budaya antar negara – negara, ataupun proses menduniannya suatu barang maupun jasa yang berasal dari suatu negara yang meyebar ke negara lainnya. Hasil dari menduniannya sesuatu tersebut mendatangkan keuntungan dari suatu negara dan memberikan dampak bagi proses politik global.

⁶⁴Winarno, Budi, 2004, *Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan*, Tajidu Press, hal, 39.

⁶⁵Alison Datko "What Is Social Globalization?". <http://peopleof.oureverydaylife.com/social-globalization-8749.html>. Di akses pada 22 Februari 2017. Pukul 10:20 WITA

Pada dasarnya, globalisasi akan menciptakan ketergantungan antara suatu negara dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat mengakibatkan adanya saling ketergantungan baik antara negara maju dengan negara berkembang, maupun negara maju dengan negara maju.⁶⁹

B. Diplomasi Budaya

Diplomasi bukan sebuah kosa kata baru dimana diplomasi merupakan kunci dalam membina suatu kerjasama antar Negara dengan cara negosiasi atau lebih bersifat Soft. Sedang kebudayaan sendiri ialah sesuatu yang bersifat kesenian ataupun ciri khas suatu bangsa. Jika digabung dalam satu artian Konsep diplomasi kebudayaan membawa makna selain kesenian juga mengandung makna ideology, kepentingan, sosial, politik, dan ekonomi. Diplomasi Kebudayaan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan bangsa dalam memahami, menginformasikan dan mempengaruhi (membangun citra) bangsa lain lewat kebudayaan. Dan secara konvensional, diplomasi berupa perundingan yang dilakukan oleh para pejabat resmi Negara sebagai pihak-pihak yang mewakili kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam perkembangannya kemudian, pelaku-pelaku diplomasi bukan hanya pejabat negara, melainkan juga kalangan swasta atau individu-individu yang mewakili kepentingan nasional negaranya dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah.⁶⁶

Milton Cummings (2003) :

“Diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu Negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideology, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lain dalam peraturan masyarakat internasional”⁶⁷

Milton Cummings berpendapat bahwa terdapat kesamaan dalam diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh setiap negara yakni mendapatkan citra yang baik dalam memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan negara mereka. Citra positif yang didapatkan oleh negara tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif di bidang yang lainnya, yang dimana menurut Wyzormisky diplomasi kebudayaan dapat memberikan citra positif bagi suatu negara sehingga negara tersebut dapat mengembangkan pasar dan membuka peluang perdagangan secara umum.⁶⁸ Dengan demikian diplomasi kebudayaan juga dapat memberikan pengaruh terhadap bidang ekonomi.

⁶⁶<http://hi.ums.ac.id/buku/diplomasi-kebudayaan/> Tanggal. 23 Februari 2017. Pukul 23:23 WITA.

⁶⁷Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 31

⁶⁸Margareth.J.Wyzormisky dan Christopher Burgess.2003.*International vutural elation : a multinational comparison : cultural diplomacy*.Ohio : Research Series. hal 12-13

C. Korean Wave

Korean Wave adalah sebuah istilah yang sekarang banyak digunakan untuk merujuk pada popularitas hiburan dan budaya Korea di Asia dan belahan dunia lainnya, Hallyu atau Korean Wave pertama kali muncul pada pertengahan 1990-an setelah Korea melakukan hubungan diplomatik dengan China pada tahun 1992 dan drama TV Korea. Dan musik pop mendapat popularitas besar dalam komunitas berbahasa China. Ketika salah satu drama TV pertama yang sukses, *What Is Love?*, Disiarkan oleh CCTV pada tahun 1997, memiliki rating penonton sebesar 4,2%, yang berarti bahwa lebih dari 150 juta pemirsa China menontonnya.⁶⁹

Kebangkitan Gelombang Korea sedang diantisipasi dengan pengembangan bentuk media digital, penggunaan Internet dan pemasaran online. Sementara kebangkitan siaran satelit memicu penyebaran Wave Korea pada 1990-an, layanan jejaring sosial dan situs berbagi video seperti YouTube, Facebook dan Twitter sekarang memainkan peran utama dalam memperluas "digital Hallyu" ke Asia, Amerika Serikat, Eropa dan tempat lain. Drama Korea sedang diupload ke Internet dan tersedia dengan sub judul dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris, Jepang, Cina dan Spanyol. Didorong oleh keinginan untuk "membantu" idola mereka, penggemar melakukan terjemahan real-time tentang pertunjukan idola di media sosial.⁷⁰

Korean Wave mencakup berbagai bentuk industri, baik musik, fashion, kuliner/makanan, film, drama, hingga wisata. Korean Wave ini dianggap memberikan dampak besar dalam perkembangan ekonomi-politik Korea. Hal yang perlu digarisbawahi dari proses ini ialah bahwa industri budaya tersebut menjadi hal yang mudah ditangkap dan persuasif bagi manusia. Ia merupakan industri yang menghasilkan produk dari citra suatu bangsa yang dapat menarik hati konsumen. Karena itu dalam pembahasan mengenai perkembangan industri budaya ini tidak dapat dilepaskan dari kepopuleran budaya populer yang berkaitan erat dengan kebudayaan. Korea Selatan yang telah berhasil menyebarkan budaya populer melalui Korean Wave ke dunia internasional merupakan salah satu negara yang dinilai berhasil memanfaatkan budayanya untuk menciptakan citra yang bisa diterima masyarakat internasional dan menjadi salah satu negara dengan perkembangan industri hiburan yang sangat pesat dan inovatif di dunia dewasa ini.⁷¹

Amerika dan Eropa baru menerima efek Korean Wave pada pertengahan tahun 2000-an baik melalui media drama televisi dan K-Pop serta media lain seperti animasi dan games. Animasi paling populer di Korea, "Pororo the Little Penguin" berhasil dijual ke lebih dari 120 negara termasuk Eropa, yakni Perancis dan Inggris. Menurut data dari statistik Korea, animasi tersebut berhasil meraih rating 57% pada penyiarnya di stasiun televisi Perancis TFI pada tahun 2004.⁷²

⁶⁹Hallyu (Korean Wave), dalam <http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu.html>. Di akses pada tanggal 11 Agustus 2017.

⁷⁰Zhou, yi. The Korean Wave (Hallyu). <http://seaa.americananthro.org/2014/07/the-korean-wave-hallyu/.html>. Di akses pada tanggal 11 Agustus 2017

⁷¹Anna Christy Swardi, Arief Muliawan, Korean Wave (Hallyu) dan Budaya Populer sebagai Soft Power Korea Selatan, dalam <http://www.haryoprasodjo.com/2014/05/c-korean-wave-hallyu-dan-budaya-populer.html>. Di akses pada tanggal 11 Agustus 2017.

Industri Film Korea pun memiliki tingkat populeritasan yang tinggi. Film Korea telah berhasil menduduki urutan ke-21 dunia dan ke-9 dunia dalam pangsa pasar film. Hampir sama dengan drama tv, perfilman Korea memiliki ciri-ciri dan sentimen yang kuat dalam mengendalikan isu sensitif antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sehingga, tidak sedikit film-film Korea yang mengandung unsur-unsur apolitis untuk menghindari persepsi negatif terkait konflik yang terjadi di kawasan Semenanjung Korea dan kebosanan di tengah-tengah masyarakat dunia akan permasalahan politik global.⁷³

Pemerintah Korea Selatan melalui Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT) menetapkan tahun 2010 sebagai starting point dalam mempromosikan diplomasi public dan mendirikan Korean Diplomacy Public Forum serta bekerjasama dengan Korean Foundation. Dalam rangka mempromosikan dan meningkatkan ekspor film Korea yang telah memperoleh pengakuan di seluruh dunia, MOFAT telah mendukung pemutaran film Korea di festival internasional besar seperti Berlin International Film Festival, The Festival de Cannes dan Venice Festival Film.⁷⁴ MOFAT juga telah mendukung festival film internasional yang diadakan di Korea seperti BIFF (Busan International Film Festival) yang mendorong film luar negeri, sutradara, dan profesional lain untuk berpartisipasi dalam festival tersebut. Upaya mempromosikan film Korea ke dunia internasional dijadikan tidak sekedar memperkenalkan film Korea saja tetapi juga dapat mempromosikan Negara Korea secara keseluruhan kepada Masyarakat Internasional.⁷⁵ Oleh karena itu, film menjadi salah satu sarana dalam melakukan hubungan diplomasi.

A. Faktor-faktor perkembangan drama Korea di Amerika Serikat

A.1. Kemajuan Media dan Informasi (Media Online)

Penyebaran budaya Korea tidak terlepas dari teknologi, seperti televisi dan internet. Melalui televisi, pemerintah Korea melakukan penyebaran melalui tiga saluran tv kabel yaitu Mnet, KBS World, dan Arirang TV. Mnet menyebarkan informasi mengenai drama mingguan, yang juga ditayangkan secara langsung di Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Melalui acara musik ini, Mnet membantu menyebarkan informasi mengenai K-Drama dan membantu meningkatkan popularitasnya. KBS World menyebarkan informasi hallyu melalui berbagai program seperti drama, dan acara yang memuat informasi mengenai dunia hiburan Korea, termasuk para artisnya. Sehingga masyarakat global dapat mengakses informasi tidak hanya mengenai drama televisi dan artis. Sedangkan Arirang TV membantu menyebarkan hallyu melalui program seperti Showbiz Korea, Pop in Seoul, dan Simply K-Pop, yang berisikan tentang informasi mengenai dunia hiburan Korea serta K-Pop dan drama Korea.⁷⁶

⁷³Korea in the world seen through statistic [2] Culture and Travel, 2011/11/17, <http://www.hancinema.net/korea-in-the-world-seen-through-2-culture-and-travel-35406.html>, di akses pada tanggal 11 Agustus 2017

⁷⁴Reza Lukmanda Yudhantara, Korean Wave (Hallyu) Sebagai Soft Diplomasi Korea Selatan. https://www.academia.edu/4323713/Korean_Wave. Di akses pada tanggal 14 Agustus 2017

⁷⁵Ministry of Foreign Affairs and Trade. 2012. Diplomatic White Paper 2011. Republic of Korea. Hal. 269.

⁷⁶Do Kyun Kim dan Se-jin Kim. 2011. Hallyu from its Origin to presents. Do Kyun Kim dan Min-Sun Kim (eds). Hallyu: Influence of Korean Popular Culture in Asia and Beyond. Seoul: Seoul National University Press. Hal. 25.

Kawasan Amerika juga menjadi wilayah ketiga dalam proses penyebaran kebudayaan Korea Selatan. Meskipun tergolong baru, Hallyu juga mendapat popularitas di beberapa negara di kawasan Amerika seperti; Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Peru dan sebagainya. Meksiko juga menjadi salah satu negara di kawasan Amerika yang menjadi sasaran penyebaran kebudayaan Korea Selatan. Hallyu mendapat respon positif dari masyarakat Meksiko melalui penayangan K-Drama dan K-Pop. Popularitas yang diterima Hallyu di Meksiko berdampak pada perubahan sosio-kultural serta peningkatan minat masyarakat Meksiko terhadap produk-produk Korea Selatan. Produk Korea Selatan lainnya yang juga mendapat popularitas di Meksiko adalah video game, games online, animasi dan kartun. Forum akademik juga melakukan kajian terhadap kesuksesan Hallyu melalui seminar *Korean Wave: Korean Popular Culture In East Asia and The World* yang diselenggarakan di Universitas Columbia, Amerika Serikat.⁷⁷

Sebagian besar penggemar drama Korea, 95,1 persen diantaranya, menggunakan layanan streaming online untuk menonton serial subjudul. DramaFever ternyata merupakan platform yang paling populer dengan 63,9 persen, diikuti oleh Viki dengan 19,1 persen dan Netflix dan YouTube masing-masing mencatat 2,8 persen. Lebih dari separuh responden - 59,8 persen - mengatakan bahwa mereka telah menonton drama Korea selama lebih dari tiga tahun, sementara 13,7 persen mengatakan bahwa hal itu baru dua sampai tiga tahun dan 13,65 persen satu sampai dua tahun. Studi ini mencerminkan popularitas drama Korea, mengumpulkan 87,1 persen penggemar setia yang telah menonton lebih dari satu tahun.⁷⁸

Drama yang paling digemari mencerminkan selera para peserta. Lima drama teratas di antara pemirsa A.S. adalah komedi romantis, dengan "Descendants of the Sun", di bagian atas, diikuti oleh "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo," "Cinderella dan Four Knights" dan "Oh My Venus". Sementara itu, aktor paling terkenal adalah, Lee Min-ho, Lee Joon-gi, Lee Jong-suk, Song Joong-ki dan Ji Chang-wook. Di antara aktris, Park Shin-hye mendapat suara terbanyak, dengan Kong Hyo-jin berada di peringkat kedua dan IU, Song Hye-gyo dan Hwang Jung-eum membulatkan lima besar. "Daya tarik terbesar drama Korea ada dalam alur ceritanya yang kreatif dan terstruktur," kata Kim Cheol-min, kepala kantor A.C. KOCCA. "Hasilnya membuktikan bahwa K-drama berkembang secara internasional, mencakup semua kelompok etnis."⁷⁹

Dalam konteks bisnis, platform online seperti Viki, Dramafever, dan Netflix telah menyediakan globalisasi k-drama yang lengkap. Amerika Serikat telah menjadi konsumen utama format ini. Data menunjukkan bahwa hanya platform Viki yang memiliki 35 juta pengguna tetap bulanan di dunia, Amerika Serikat dengan jumlah terbesar, dengan 1.312.500.

⁷⁶Universitas Gadjah Mada, 2012, Student Working Paper: Korean Studies series A, hlm 31. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/12728-ID-komunikasi-internasional-dalam-era-informasi-dan-perubahan-sosial-di-indonesia.pdf>. Pada tanggal 11 September 2017

⁷⁷López Rocha, Nayelli. 2011. Hallyu and its Impact on Mexican Society, Hanyang University, Graduate School of International Studies, Ph. D. Degree Thesis, 2011, hlm.83

⁷⁸Korea Creative Content Agency dalam <http://eng.kocca.kr/en/contents.do?menuNo=201433>. Diakses pada tanggal 11 September 2017

⁷⁹Korean dramas enjoy huge wave of popularity in U.S., <http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/03/0200000000AEN20170203007200315.html>. Di akses pada tanggal 18 Agustus 2017

Farid Sautama Hasyim

Dari jumlah tersebut, 25% berasal dari Amerika Latin, 15% dari Meksiko saja. Pembukaan pasar luar negeri telah memungkinkan kesuksesan global drama seperti *Goong*, *Coffee Prince*, *Full House*, *Boys Over Flowers*, *Playful Kiss*, *You're Beautiful*, *Secret Garden*, *Iris*, *Taste Pribadi*, *Bulan yang Merangkul Matahari*, *My Cinta Dari Bintang Lain* dan begitu banyak lainnya yang mudah kita temukan di daftar *dames*.⁸⁰

A.2. Konfusianisme dan Modernitas

Nilai-nilai konfusianisme dan modernitas yang disajikan melalui produk budaya seperti drama dan televisi dan film. Konfusianisme adalah tradisi yang secara historis dimiliki bersama oleh Negara-negara di Asia Timur yang membuat Negara-negara tersebut memiliki kedekatan kultural.⁸¹ Tema-tema drama televisi dan Korean Wave menggunakan nilai-nilai dalam konfusianisme seperti nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap tradisi sebagai bagian dari dramatisasi Korea Selatan akan “sensibilitas Asia”⁸² yang membuat drama-drama Korea dapat dinikmati lintas generasi, terutama di Negara-negara Asia Timur yang berbagi kesamaan nilai konfusianisme.

Namun, nilai tersebut tidak membatasi penerimaan Korean Wave hanya pada publik Negara-negara Asia Timur. Bagi publik Negara lain, nilai kekeluargaan yang ditonjolkan dalam drama televisi Korea Selatan diterima sebagai suatu kekuatan emosional tersendiri, publik Amerika mendapati drama Korea santai dan menyenangkan, alur drama Korea juga romantis dan tidak rumit, drama Korea pun mudah di terima karena dianggap lebih “aman” akan konten kekerasan dan seksualitas seperti yang banyak didapati dalam tayangan Hollywood, dan yang paling penting kebanyakan drama Korea memiliki kesetiaan pada penggunaan tradisi lokal.⁸³

Bagi public Amerika Serikat, gaya hidup dan trend yang diusung melalui penggambaran modernitas Korea Selatan dalam drama Korea ini dianggap sebagai daya tarik dan ingin mereka tiru, Korea Selatan juga menggambarkan modernitas dengan memadukan teknologi dan drama melalui penyertaan produk teknologi terkini dalam sebagian besar drama televisi (terkecuali drama yang bertemakan sejarah) baik itu alat-alat elektronik, gadget, kendaraan maupun teknologi informasi. Selain itu, drama Korea memuat pengalaman serta permasalahan social yang muncul terkait dengan modernisasi, sehingga dapat membuat publik Negara-negara yang mempunyai kategori kota modernisasi seperti Amerika Serikat merasakan kedekatan akan lingkungan yang di tunjukan dalam sebuah drama Korea.⁸⁴

⁸⁰THE GLOBALIZATION OF K-DRAMAS: The influence of k-dramas on Western daily life”, <http://www.gatindhaindelicada.com/globalization-k-dramas/.html>. Di akses pada tanggal 18 Agustus 2017

⁸¹Chua B.H. (2010), “Korean Pop Culture”, *Malaysian Journal of Media Studies*. Vol. 12, no. 1:15-24, hlm. 16.

⁸²<http://Korean-Culture-and-Information-service.com/Koreanwave/demam.kpop>. Diakses tanggal 21 Agustus 2017

⁸³Anna Christy Swardi, Arief Muliawan, Korean Wave (Hallyu) dan Budaya Populer sebagai Soft Power Korea Selatan, dalam <http://www.haryoprasodjo.com/2014/05/c-korean-wave-hallyu-dan-budaya-populer.html>. Di akses pada tanggal 11 Agustus 2017

⁸⁴The Economist, South Korea's pop-cultural exports: Hallyu, Yeah! A “Korean Wave” Washes warmly over Asia, 25 Januari 2010, (Seoul dan Phnom Penh) dalam <http://www.economist.com/node/15385735>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2017

A.3. Kebijakan Pemerintah Korea Selatan Terhadap Drama Korea

Keseriusan pemerintah Korea Selatan terhadap promosi kebudayaan ditindaklanjuti melalui upaya nya memasukkan aspek diplomasi budaya kedalam beberapa dokumen penting di antaranya :

1. White Paper 2006

Pada White Paper 2006, Pemerintahan Korea Selatan menjelaskan bahwa kebijakan luar negerinya pada tahun 2005 adalah meningkatkan citra Korea Selatan melalui Korean Wave. Hal ini berkaitan dengan upaya Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT) dalam melaksanakan diplomasi publik melalui peningkatan aktivitas dan promosi budaya dengan tujuan nasional yakni Peningkatan Citra Korea Selatan sebagai negara pelopor dalam bidang budaya. Dalam White Paper 2006, diplomasi kebudayaan dijabarkan sebagai berikut:

“The ministry has set up public relations offices overseas called “Korea Plaza” to strengthen the country’s image through the globalization of hallyu, the boom of Korean pop culture overseas. The Korea Plaza project is based on the “C-Korea Vision 2010” announced last year. In particular, the government will support exchanges of cultural contents with foreign countries away from unilateral or export-oriented activities.”⁸⁶

2. Principal Goals and Directions Of Korean Cultural Diplomacy

Merupakan kelanjutan dari White Paper 2006 perihal kebijakan luar negeri Korea Selatan pada tahun 2005, yang mana memasukkan aspek aspek diplomasi kebudayaan kedalam bagian diplomasi publik Korea Selatan dengan dua tujuan utama yakni⁸⁷

- a. Mendorong kerjasama dengan negara-negara lainnya dengan melakukan pertukaran budaya. Langkah awal untuk mendorong adanya kerjasama antar negara tersebut dapat dilakukan dengan mendukung berbagai program pertukaran budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun non-pemerintah.
- b. Memperkuat daya saing nasional melalui peningkatan citra nasional. Penegasan keseriusan pemerintah Korea Selatan dalam menggunakan kebudayaan sebagai prioritas ekonomi dan citra diri tercermin dalam pernyataan Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata pada 2006, yang menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap program pertukaran budaya.

⁸⁶MOFAT.Principals Goals and direction of Korean Cultural Diplomacy and related policies”http://www.mofat.go.kr/english/help/include/newopenmofat.jsp?MOFATNAME=English.&INDEXNAME=MOFAT_HOME&PK=298757KEY313 .Diakses pada 28 Juli 2017.

⁸⁷Yurena Kalshoven.2014.HallyuPowerA FocusOn SoftPowerInLeeMyunBak’s CulturalPolicy.Tesis.LeidenUniversity.Dalam <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/29533/MA%20THESIS%20-%20Hallyu%20Power%20%28Yurena%20Kalshoven%20s0802263%29%20FINAL.pdf?sequenc>. diakses pada tanggal 11 September 2017

*"The ministry has setup public relations offices overse as called "Korea Plaza" to strengthen the country's image through the globalization of hallyu, the boom of Korean pop cultural overseas. In particular, the government will support exchange of cultural content with foreign countries away from unilateral orexport-oriented activities."*⁸⁸

3. White Paper 2008

Pada Diplomatic Whitepaper Korea 2008 dijelaskan bahwa, budaya merupakan elemen penting dan alat yang berguna dalam menciptakan nilai tambah demi terwujudnya persaingan antar bangsa. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Korea (Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT) mencoba memanfaatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan diplomasi kebudayaan untuk mempromosikan kepentingan nasional Korea. Dalam Whitepaper ini dijelaskan bahwa film serta drama termasuk dalam salah satu elemen penting dalam memajukan diplomasi kebudayaan Korea Selatan.

Dampak Perkembangan Drama Korea di Amerika Serikat Terhadap Pembangunan Ekonomi Korea Selatan.

Memasuki abad ke-21, Hallyu memperlihatkan penyebaran yang luas dan menunjukkan signifikansi bagi ekonomi Korea. Sebagai contoh adalah ekspor drama televisi, yaitu pada tahun 1998 hanya bernilai sebesar US\$10 juta, namun kemudian dalam jangka waktu tujuh tahun dapat meningkat sepuluh kali lipat menjadi US\$100 juta.⁸⁹ Drama tv Winter Sonata yang ditayangkan oleh KBS TV pun turut memberikan keuntungan sebesar 2,3 triliun won pada tahun 2002 karena berhasil menjadi sebuah produk di tujuh belas negara, seperti pasar Arab dan Eropa. Hal tersebut menjadikan KBS sebagai jaringan televisi utama di dunia yang mengeksport konten-konten kebudayaan Hallyu ke 38 negara di dunia dengan nilai mencapai US\$43 juta.⁹⁰ Hal ini tidak terlepas dari penggunaan intensif para pengguna media. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Korea's National Internet Development (NIDA), mengungkapkan bahwa terdapat 90.8% netizen-sebutan untuk pengguna internet-menggunakan internet untuk membuka konten-konten hiburan seperti: musik, drama tv, film, dan program lain, yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah ekspor budaya.

B.1. Industri Otomotif

Drama Korea memberikan pencerahan pada bidang perekonomian Korea. Meningkatnya kegiatan ekspor Korea ke Amerika Serikat menjadi bukti naiknya perekonomian Korea. Pada tahun 2004 nilai ekspor budaya Korea di Pasar Amerika Serikat meningkat dari \$413 juta mencapai \$939⁹¹ juta dan masih mengalami peningkatan hingga sekarang.

⁸⁸ Myung Oak Kim dan Sam Jafee. 2010. *The New Korea: An Inside Look at South Korea's Economic Rise*. New York: American Management Association. Hal 166.

⁸⁹ Veluree Metaveenij. (tanpa tahun terbit). *Key Success Factors of Korean Tv Industry Structure that Leads to the Popularity of Korean TV Dramas in a Global Market*. *Journal of East Asian Studies*. Hal. 108

⁹⁰ Siprostit, Siriluk. 2012. *Globalization, Culture, And The Roles of The Media*. *Erasmus Mundus* 2012, pp.1-11, Hal. 5

⁹¹ Jonghoe, Yang. 2012. "The Korean Wave (Hallyu) in United States: A Comparison of United States Audiences Who Watch Korean TV Dramas", dikutip dalam *Korean Wave dan Peningkatan Perekonomian Korea Selatan*. Dalam <http://www.seniberpikir.com/korean-wave-dan-peningkatan-perekonomian-korea-selatan/>. Diakses 23 Agustus 2017.

Jurnalis Amerika menulis bahwa penjualan mobil Hyundai di Amerika Serikat meningkat karena efek Korean Wave sebagai “Inter-Asia advertising medium” atau medium promosi Internasional.⁹² Sejak Hyundai Research Institute menilai dampak ekonomi bintang Hallyu Bae Yong-joon sebesar 3 triliun won (2,9 miliar dolar AS) pada tahun 2004, dampak riak ekonomi Hallyu semakin menonjol. Teorinya, citra nasional yang membaik berkat Drama Korea mengarah pada peningkatan ekspor, dan oleh karena itu mengarah pada pertumbuhan industri manufaktur.

Saat ekspor produk budaya naik 1 persen, ekspor semua barang konsumsi naik 0,03 persen (elastisitas ekspor). Berdasarkan hal tersebut, telah disimpulkan bahwa dampak ekonomi dari bisnis terkait Drama Korea, termasuk produksi, nilai tambah, dan lapangan kerja, mencapai 5 triliun won (US \$ 4,87 miliar) per tahun. Porsi ekspor barang konsumsi Hallyu adalah 22,8 persen pada tahun 1998 dan 25,2 persen pada tahun 2001, awal Drama Korea. Ini turun drastis menjadi 11,7 persen di tahun 2007, dan menjadi 12,5 persen tahun lalu, berada di dekat area 10 persen lebih rendah dari grafik selama tujuh tahun terakhir. Dari sisi jumlah, ekspor produk Hallyu hanya meningkat menjadi US \$ 11,03 miliar pada 2013 dari US \$ 8,34 miliar pada tahun 1998. Pada periode yang sama, tingkat pertumbuhan produk Hallyu adalah 2,0 persen, sementara semua barang konsumsi tumbuh sebesar 6,1 persen. Khusus dengan pakaian dan aksesoris, yang diketahui banyak dipengaruhi oleh Hallyu, porsi ekspor di lima kelompok produk Hallyu turun menjadi 26,5 persen pada tahun 2005 dan 18,8 persen pada tahun 2012, dari 56,8 persen pada tahun 1998. Produk budaya yang terkena dampak langsung oleh Hallyu hanya 4,4 persen pada tahun 2012.⁹³

B.2. Industri Fashion

Bintang drama Korea telah memberi dampak besar pada budaya konsumen, termasuk makanan, fashion, tren make-up dan bahkan operasi plastik. Penggemar dari Amerika Serikat melakukan perjalanan ke Korea untuk membeli produk tersebut. Efek ekonomi dari Drama Korea diperkirakan mencapai \$ 11,6 miliar pada tahun 2014, sebuah analisis oleh Badan Promosi Investasi Perdagangan Korea dan Korea Foundation for International Culture Exchange. Dan industri kosmetik menikmati pertumbuhan terbesar, meningkat 57%, karena turis dari negara lain yang kembali ke Korea meningkatkan penjualan. Pariwisata juga memberi dampak positif pada lapangan kerja karena industri ini menciptakan 24.520 pekerjaan.

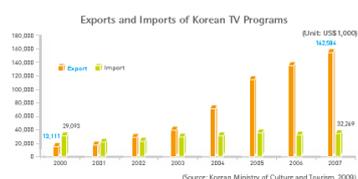
Tidak ada keraguan bahwa Hallyu sangat merangsang ekspor. Ekspor konten budaya dan barang konsumsi meningkat sebesar 8,4% di tahun 2014, yaitu \$ 6,16 miliar. Kenaikan 2,3% lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor negara tersebut pada tahun 2013, yang mengindikasikan bahwa Korean Wave memimpin pada ekspor secara keseluruhan.

⁹²Kumwilaisak, W. 2011. Hallyu Making A Good Korean Image in United States. http://webzine.kofice.or.kr/201102/eng/sub_01_01.htm. Diakses 23 Agustus 2017

⁹³Hallyu Splash, Economic Effects of Korean Wave Underwhelming for Past 15 Years dalam <http://www.businesskorea.co.kr/english/news/lifestyle/5623-hallyu-splash-economic-effects-korean-wave-underwhelming-past-15-years>. Di akses pada tanggal 23 Agustus 2017

B.3. Industri Televisi

Tabel 1. Exports and imports of Korean TV Programs



Dari tabel diatas. dapat dilihat bahwa ekspor Korea Selatan dalam produk program televisi mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2000 (yang termasuk dalam periode awal kemunculan Korean Wave) hingga tahun 2007 dengan hanya 13 juta US dolar pada tahun 2000 menjadi 162 juta US dolar pada tahun 2007. Bahkan jika sebelumnya pada tahun 2000 impor Korea lebih tinggi dari eksponnya, yakni 29 juta US dolar, pada tahun 2007 neraca berbalik ketika Korea Selatan mengekspor sekitar 130 juta US dolar lebih banyak dari jumlah impornya yang hanya sebesar 32 juta US dolar.⁹⁴

“Winter Sonata”, salah satu produk drama televisi terpopuler dari Korea Selatan memberikan efek ekonomi yang besar ketika berhasil meraup keuntungan sebesar 1,1 miliar US dolar di Jepang.⁹⁵ Kemudian keuntungan juga diperoleh melalui produk musik K-Pop dilihat dari jumlah kopi lagu yang terjual serta popularitas lagu tersebut di tangga lagu luar negeri. Grup musik H.O.T. berhasil menjual 100.000 kopi musiknya di Cina pada tahun 2001 dan lagu Korea selalu menempati 10 besar dalam tangga lagu di Cina pada saat itu. BoA, penyanyi solo wanita Korea juga meraup keuntungan dengan menjadi satu-satunya artis non-Jepang yang berhasil menjual tiga album dengan lebih dari 1 juta kopi di Jepang.⁹⁶ Di Perancis, SM Town World Tour, sebuah tur penampilan artis dan grup musik Korea Selatan di bawah naungan SM Town Management, menjual 7000 kursi dalam 15 menit untuk menyaksikan penampilan grup musik dari manajemen tersebut. Rain, salah satu bintang K-Pop juga muncul sebagai peraih kepopuleran Korean Wave di Asia dengan menjual lebih dari 130.000 kursi dalam konsernya di berbagai kota di Asia pada tahun 2005.⁹⁷

B.4. Industri Pariwisata

Tercatat di 2009 terdapat kurang lebih 7.8 juta pengunjung, atau meningkat 13.4% dari tahun sebelumnya. Kemudian dipaparkan juga proyeksi jumlah pengunjung dari luar negeri sampai dengan akhir 2015 yang ditargetkan mencapai lebih dari 10.8 juta. Bila target ini terwujud, maka dampaknya akan terlihat pada meningkatnya pendapatan nasional, khususnya dari sektor pariwisata.

⁹⁴Trista Zhang, Korean Wave Boots Economic Growth, dalam <https://tradepolicy.wordpress.com/2016/04/15/korean-wave-boots-economic-growth/>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2017

⁹⁵Kim, E.M. dan Ryoo, J.W. (2007), 'South Korean Culture Goes Global:K-Pop and the Korean Wave', Korean Social Science Journal, XXXIV No. 1: 117-152

⁹⁶Yi, J.H. (2001), 'Jungguk-e buneun hanguk yeolpung' (The Korean Wave in China).Dong-a Ilbo, July 12

⁹⁷Korean Culture and Information Service, (2011), Op. Cit.,hlm. 32

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa faktor yang membuat drama Korea berkembang di Amerika Serikat yaitu :

1. Adanya kemajuan di bidang media dan informasi drama Korea sukses menembus pasar Amerika, dengan memanfaatkan media online seperti Youtube, dan beberapa situs online streaming seperti Viki dan DramaFever.
2. Konfusinisme sangat kental dengan drama Korea namun itu menjadi keunikan tersendiri bagi penikmat drama Korea di Amerika Serikat dengan adanya unsur modernitas lebih membuat drama Korea menjadi sangat diminati di Amerika Serikat.
3. Pemerintah Korea Selatan sangat mendukung pengembangan produk budayanya salah satunya dengan memanfaatkan industri pertelevisian drama Korea dengan memasukkan aspek budaya dalam beberapa dokumen kenegaraannya seperti, White Paper 2006, Principal Goals and Directions of Korean Culture Diplomacy dan White Paper 2008.

Dampak pembangunan ekonomi Korea Selatan terkait perkembangan drama Korea di Amerika Serikat terjadi di empat industri besar yang ada di Korea Selatan, yaitu :

1. Industri Otomotif Korea Selatan mendapat kesuksesan dengan perkembangan drama Korea di Amerika Serikat. Salah satu brand mobil yang laku di pasar Amerika Serikat adalah Hyundai.
2. Industri Fashion Korea Selatan meningkat dengan suksesnya drama Korea menampilkan artis-artisnya dengan fashion yang unik dan natural. Namun, isu operasi plastik tidak mengurangi eksistensi drama Korea di Amerika Serikat
3. Industri televisi Korea mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun boomingnya drama Korea pada tahun 2000 permintaan akan drama Korea sangat tinggi di Amerika Serikat. Bahkan dua pertelevisian Korea Selatan yaitu SBS dan KBS telah membangun kantor cabang di Los Angeles.

Drama-drama Korea selalu menampilkan pariwisata dan budaya mempesona dari Korea Selatan. Hal ini yang membuat meningkat pesatnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Korea Selatan untuk melihat langsung pariwisata romantis yang ada di Korea Selatan.

B. Saran

1. Pelaksanaan diplomasi kebudayaan Korea Selatan adalah untuk memperkuat posisinya dan meningkatkan citra di dunia internasional, para pembuat kebijakan dalam lembaga Pemerintah terkait harus bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk membantu mempertahankan kontinuitas penyebaran drama Korea melalui Korean Wave dan mendorong proyek-proyek bersama aktor non-negara yang lebih konstruktif di Amerika. Dalam hal ini, juga penting untuk memperkuat daya saing drama Korea agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan eksistensinya di Amerika Serikat. Korea Selatan juga harus lebih menyiapkan strategi yang lebih unik dan menarik dalam pelaksanaan diplomasi kebudyaanya agar dapat menjaga eksistensinya dalam bersaing dengan budaya asing negara lain. Korea Selatan harus lebih aktif dalam memperkenalkan budayanya ke seluruh lapisan masyarakat di Amerika baik itu melalui media atau melalui people-to-people exchange.
2. Pemerintah Indonesia harus banyak belajar dari Korea Selatan agar mampu meng-internasionalisasikan kekayaan budayanya dengan membuat blueprint kebijakan terkait diplomasi budaya. Ini menjadi penting karena untuk menjaga budaya kita sendiri dari klaim negara luar dan untuk membangun citra yang baik di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Garaha Ilmu.

Cornelis Rintuh dan Miar, M.S. 2005. Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat, Yogyakarta: BPFE.

John Art Scholte. 2000. Globalization: A Critical Introduction, New York: Sin Martin's Press.

Korean Culture and Information Service, 2011, The Korean Wave: A New Pop Culture Phenomenon, Contemporary of Korea.

Kuisel, Richard, 1993, Seducing the French: the Dilemma of Americanization, Berkeley; University of California.

Milton C. Cummings, Jr. 2003. diplomasi kebudayaan dan Pemerintah Amerika Serikat: Survei, Washington, D.C: Pusat Seni dan Budaya.

Thomas D. Lairson and David Skidmore, International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth. Fort Worth: Harcourt Brace Publishers.

Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari. 2007. Diplomasi Kebudayaan Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia, Ombak, Yogyakarta.

Winarno, Budi, 2004, Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan, Tajidu Press.

Yulius P. Hermawan. 2007. Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional; Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Jurnal :

Bartelson, J, Three Concepts of Globalization, International Sociology, Vol 15 (2), June, 2000.

Cho H.J. (2005), "Reading the "Korean Wave" as a Sign of Global Shift", Korea Jurnal 45(4):147-182.

Chua B.H. (2010), "Korean Pop Culture", Malaysian Journal of Media Studies. Vol. 12, no. 1:15-24.

Farid Sautama Hasyim

Siprosit, Siriluk, 2012. Globalization, Culture And The Roles of The Media, Erasmus Mundus 2012, pp.1-11.

Smith, Steve & Baylis, John.2001.“Introduction” in Baylis, John & Smith, Steve (eds.), The Globalization of World Politics, 2nd edition, Oxford University Press.

Sue Jin Lee, “The Korean Wave: The Seoul of Asia” dalam the Elon journal of Undergraduate Research in Communication vol. 2 No. 1 2011.

Universitas Gadjah Mada, 2012, Student Working Paper: Korean Studies series A.

Veluree Metaveenij. (tanpa tahun terbit). Key Success Factors of Korean Tv Industry Structure that Leads to the Popularity of Korean TV Dramas in a Global Market. Journal of East Asian Studies.

Yi, J.H. (2001), 'Jungguk-e buneun hanguk yeolpung' (The Korean Wave in China).Dong-a Ilbo, July 12.

Internet :

Abby Norman, ""Engineering Success: The Story Of South Koreas K-Pop” Sumber : <http://all-that-is-interesting.com/k-pop.html>.

Alison Datko “What Is Social Globalization ?”.Sumber :<http://peopleof.oureverydaylife.com/social-globalization-8749.html>.

Anna Christy Swardi, Arief Muliawan, Korean Wave (Hallyu) dan Budaya Populer sebagai Soft Power Korea Selatan, Sumber :<http://www.haryoprasodjo.com/2014/05/c-korean-wave-hallyu-dan-budaya-populer.html>.

CNN. 2010. 'Korean Wave' of Pop Culture Sweeps Across Asia.Sumber : <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/12/31/korea.entertainment/index.html?iref=NS1>.

Dampak globalisasi terhadap pertumbuhan kemiskinan.Sumber :<http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/dampak-globalisasi-terhadap-pertumbuhan-kemiskinan-dan-ketimpangan/>.

Dampak Positif & Negatif Globalisasi di Berbagai Bidang.Sumber :<http://www.yuksinau.id/2016/03/dampak-positif-negatif-globalisasi.html>

Hallyu (Korean Wave).Sumber :<http://www.korea.net/AboutKorea/culture-and-the-arts/Hallyu>

Hallyu Splash, Economic Effects of Korean Wave Underwhelming for Past 15 Years
Sumber : <http://www.businesskorea.co.kr/english/news/lifestyle/5623-hallyu-splash-economic-effects-korean-wave-underwhelming-past-15-years..>

<http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu.html>.

Jonghoe, Yang. 2012. "The Korean Wave (Hallyu) in East Asia: A Comparison of Chinese, Japanese, and Taiwanese Audiences Who Watch Korean TV Dramas", dikutip dalam Korean Wave dan Peningkatan Perekonomian Korea Selatan. Sumber :<http://www.seniberpikir.com/korean-wave-dan-peningkatan-perekonomian-korea-selatan/>.

KBS adalah stasiun televisi pertama Korea Selatan yang berdiri sejak tahun 1961, berlokasi di 18, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 150-790 Korea. Sumber :https://www.linkedin.com/company/kbs_2

Korean Culture and Information service. Sumber : <http://Korean-Culture-and-Information-service.com/Koreanwave/demam.kpop>.

Korea in the world seen through statistic [2] Culture and Travel, 2011/11/17,
Sumber : <http://www.hancinema.net/korea-in-the-world-seen-through-2-culture-and-travel-35406.html>.

"Korea : Dulu & Sekarang", Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea, Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata. Isharyanto Ciptowiyono, "Pertumbuhan Industri Hiburan Korea Selatan". Sumber :http://www.kompasiana.com/isharyanto/pertumbuhan-industri-hiburan-korea-selatan_552883aaf17e61735a8b45c6.html.

K - pop, kiblat baru dalam dunia musik, Sumber :<https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20151103055444-327-89055/kpop-kiblat-baru-dalam-dunia-musik/.html>.

Korean Wave. Sumber :https://www.academia.edu/4323713/Korean_Wave

"Korean dramas enjoy huge wave of popularity in U.S.", Sumber :<http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/03/0200000000AEN20170203007200315.html>.

K T O , Foreign Press Analyzes Hallyu, Sumber :<http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=104997>.

Kumwilaisak, W. 2011. Hallyu Making A Good Korean Image in Thailand. http://webzine.kofice.or.kr/201102/eng/sub_01_01.htm.

Farid Sautama Hasyim

Ministry of Culture, Sports and Tourism .2006.Hallyu is new growth engine in cultureindustry. Sumber : <http://www.mct.go.kr/english/koreaInfo/news/newsView.jsp?pSeq=492.html>.

MOFAT.Principals Goals and direction of Korean Cultural Diplomacy and related policies”http://www.mofat.go.kr/english/help/include/newopenmofat.jsp?MOFATNAME=English&INDEXNAME=MOFAT_HOME&PK=298757KEY313.

Nurlaili Laksmi. 2011. Multi Track Diplomasi.Sumber :http://nurlaili-laksmi-w-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-71685-Semester%20III-MultiTrack%20Diplomacy.html.

“Promotion of Korean culture trough the “Korean wave”, dalam 2006 diplomaticwhite paper, Sumber <http://www.mofat.go.kr/English/political/whitepaper/index.jsp>.

Psy – Gangnam Style MV on YouTube, Sumber :<http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0>.

SBS adalah perusahaan televisi swasta Korea selatan yang berdiri pada tahun 1980. Sumber :<http://www.sbs.com.au/aboutus/faqs/index/id/130/h/our-story>

Shim sun-ah. 2012. “Korean Films Drew Record Audiences in First Half; Ministry”.<http://english.yonhapnews.co.kr/news/2012/07/03/020000000AEN201207030071003.html>.

Song Su-Hyun, K-Wave boosts economic growth dalam Sumber :<http://mengnews.joins.com/view.aspx?ald=3003773>.

Strategi Diplomasi Korsel Menjangkau Dunia. Sumber :<http://www.koran-jakarta.com/strategi-diplomasi-korsel-menjangkau-dunia/>

The Economist, South Korea's pop-cultural exports: Hallyu, Yeah! A “Korean Wave” Washes warmly over Asia, 25 Januari 2010, (Seoul dan Phnom Penh) Sumber : <http://www.economist.com/node/15385735>.

“THE GLOBALIZATION OF K-DRAMAS: The influence of k-dramas on Western daily life”, Sumber :<http://www.gatinhaindelicada.com/globalization-k-dramas/.html>.

The New York Times January 29, 2005 dalam Kim, E..M. dan Ryoo, J.W. (2007).Sumber :<http://www.jype.com>.

Trista Zhang, Korean Wave Boots Economic Growth, Sumber :<https://tradepolicy.wordpress.com/2016/04/15/korean-wave-boots-economic-growth/>.

Wilda Fizriyani, "Stasiun Televisi Amerika akan Remake Drama Thriller Korea ",
S u m b e r : t t p : / / s e n g g a n g . r e p u b l i k a . c o . i d
/berita/senggang/film/17/02/20/olnxqi359 stasiun-televisi-amerika-akan-
remake-drama-thriller-korea-ini.

Zhou, yi.The Korean Wave (Halyu).<http://seaa.americananthro.org/2014/07/the-korean-wave-hallyu/.html>.

UPAYA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM MENGEMBANGKAN E-DIPLOMASI SEBAGAI SARANA PROMOSI PARIWISATA

Irma Puiya

Zulhair Burhan, S.Ip.,MA
Rosnani, S.Ip.,MA

ABSTRAK

Tujuan pengembangan sistem informasi berbasis digital atau internet ini adalah untuk mempromosikan wisata Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sistem informasi berbasis Web atau Aplikasi adalah media yang memiliki unsur teks, gambar, video suara. Seperti media informasi lainnya, keberhasilan media ini juga ditentukan oleh keberhasilan penyampain pesan yang dibawanya. Dalam perancangan sistem informasi pariwisata berbasis web atau online di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar terdapat prosedur yang dilakukan untuk menggumpulkan data, yaitu dua jenis data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi langsung dalam pengembangan dan promosi pariwisata berbasis online di kota Makassar. selain obserfasi juga dilakukan wawancara tak terstruktur, dimana wawancara secara sistematis. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai pariwisata dan diplomasi dari buku, dan browsing di internet. Hasil rancangan sistem informasi pariwisata berbasis web atau online yang diharapkan mampu menjadi sebuah media yang dapat mempromosikan wisata kota makassar lebih dikenal oleh khalayak.

Kata Kunci: Kota Makassar, Sistem Informasi Elektronik, Dinas Pariwisata, Web, Makassar Tourism.

PENDAHULUAN

Pada saat ini sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Nasional yang perlu dikembangkan dan tingkatkan. Kondisi seperti ini akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Negara dengan event multiplayer. Oleh karena itu hal yang paling mendasar dan perlu diperhatikan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masing-masing Stake Holders Industri Pariwisata, baik pada tingkat Nasional, Wilayah maupun Kawasan yang dikembangkannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa bahwa, Pembangunan Pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan akan datang, karena memiliki fungsi ganda, disamping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu konsep atau rumusan perencanaan pengembangan kepariwisataan secara Nasional (RIPPNA), regional atau provinsi (RIPP-Provinsi), dan lokal kota serta kabupaten (RIPP-kota/kabupaten). Khusus di tingkat pemerintah kota makassar, maka penyusunan induk pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Makassar merupakan penjabaran dari RIPNAS dan RIPP Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kota Makassar menyatakan bahwa daerah yang mempunyai berbagai objek wisata yang potensial dan dilatar belakangi oleh kesadaran dan kemauan politik (Political Will). Agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata dan dapat diciptakan pembangunan yang serasi dan seimbang antara semua sektor dengan tetap mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, sehingga kedudukan RIPP kota Makassar menjadi acuan dalam perencanaan pariwisata yang lebih detail atau teknis.

Potensi pengembangan Sektor Pariwisata di kota Makassar mempunyai prospek yang cukup potensial karena mempunyai berbagai jenis obyek wisata seperti: wisata bahari, wisata kuliner, wisata sejarah serta seni budaya dan lain-lain. Agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan maka, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar perlu melakukan promosi wisata yang terdiri dari promosi dalam dan luar Negeri, seperti halnya menerbitkan booklet, membuat video atau audio, pemasangan berbagai iklan dan artikel majalah internasional, serta berpartisipasi didalam event-event regional, Nasional dan Internasional yang berkaitan dengan promosi Pariwisata Kota Makassar.

Untuk keberhasilan kepariwisataan Kota Makassar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di harapkan dapat melaksanakan fungsi sebagai produsen sekaligus sebagai koordinator dari beberapa kepariwisataan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di kota Makassar dengan jalan promosi. Demikian pula terhadap promosi Pariwisata yang diadakan adalah untuk memberitahukan, membujuk atau mengingatkan, konsumen atau wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke kota atau daerah yang telah di promosikan. Maka promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda.⁹⁸

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka tipe penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berusaha menggambarkan bagaimana aktivitas dan kondisi Kota Makassar yang menitik beratkan pada pemanfaatan e-diplomasi dalam Pengembangan Sektor Pariwisata. Namun, untuk menambah sumber data penulis juga menggunakan telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

⁹⁸Aktifitas promosi dinas kebudayaan dan pariwisata kota makassar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan"
<http://www.mysciencework.co/publication/download>

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah, bagaimana Kondisi Perkembangan Sektor Pariwisata berbasis E-diplomasi di Kota Makassar. dan; Strategi Pemerintah kota Makassar dalam Pengembangan Pariwisata berbasis E-diplomasi.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui, Observasi yaitu dengan melihat secara langsung bagaimana penerapan E-diplomasi di Kota Makassar dalam Sektor Pariwisata. Adapun data Primer yang di butuhkan adalah, Wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait Pengembangan promosi Pariwisata berbasis online atau internet di Kota Makassar. Adapun yang akan diwawancarai seperti Badan Instansi (dinas pariwisata), dan Masyarakat.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penulis menggunakan teknik ini karena bisa mewakili hal-hal yang akan di analisis oleh penulis sehingga dapat melahirkan teori yang cocok untuk membedah permasalahan yang ada. Oleh karena itu, menghasilkan hipotesa bahwa penggunaan E-diplomasi dalam kinerja Pemkot Makassar dalam mengembangkan pariwisata sangat bermanfaat terbukti dengan keterlibatan Perusahaan atau Instansi swasta maupun individu dalam hal mempromosikan Potensi dan Budaya kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Mengembangkan E-diplomasi sebagai sarana Promosi Pariwisata

Berdasarkan temuan Peneliti, Pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan E-diplomasi sebagai sarana promosi Pariwisata. Adapun Upaya yang dimaksud adalah:

A.1. Mengembangkan Kebijakan Terkait Pengembangan Wisata Berbasis E-diplomasi di Kota Makassar

Dalam Mengembangkan Kebijakan tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar membuat kebijakan yang berpatokan dengan Visi dan Misi Wali Kota Makassar yang terpilih. Dilihat dari visi, misi dan tujuan Dinas Pariwisata

Irma Puiya

Makassar, oleh sebab itu dibuatlah kebijakan dalam Mengembangkan pariwisata kota Makassar sebagai Destinasi Pariwisata Dunia adalah sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran pariwisata, Peningkatan kualitas event berbasis minat wisatawan, Pemanfaatan jaringan kerja sama lembaga dalam mengefektifkan promosi pariwisata, Mengembangkan sarana dan prasarana pada destinasi wisata, Mengembangkan usaha industri pariwisata. Penguatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Meningkatkan wawasan Kepariwisata Masyarakat, Mengelola data Informasi Ekonomi Kreatif berbasis IT, Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya, Menyelenggarakan Tata Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti melalui metode Wawancara peneliti dengan salah satu staf dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kota Makassar di bidang promosi Pariwisata, yang di jabat oleh Ibu Merita Ekawati Mustika. Penulis mencatat bahwa dalam mempromosikan Pariwisata;

“Dinas Pariwisata kota Makassar melakukan promosi eksebis di Nusantara maupun Mancanegara, baik melalui media dan lain-lain”⁹⁹.

Terbukti promosi Pariwisata melalui media, saat ini telah diterapkan, dengan dibuatkan website kota Makassar dan Dinas-dinas terkait khususnya Dinas Pariwisata. Mengingat Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sangat berkembang maka kota Makassar maka pihak yang terkait merekomendasikan Aplikasi berbasis online atau Elektronik saat ini telah dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kota Makassar, dengan tujuan lebih mempermudah mereka dalam mempromosikan destinasi yang ada di Kota Makassar. selain dinas terkait, Aplikasi ini (Makassar Tourism) juga mempermudah informan untuk mengakses informasi yang diperlukan.

Untuk mendukung jalannya Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Mengembangkan E-diplomasi sebagai sarana promosi Pariwisata, maka Pemerintah juga melakukan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan bertahap. Adapun tahapannya, sebagai berikut :

- ***Pengembangan Infrastruktur Wisata berbasis E-diplomasi di Kota Makassar***

Pengembangan Infrastruktur Pariwisata di Kota Makassar merupakan salah satu aktivitas yang sangat mendukung atau menunjang perkembangan Pariwisata setempat. Maka dari itu, Pemerintah Kota Makassar mengembangkan infrastruktur Pariwisata berbasis E-diplomasi ini sebagai sarana dan prasarana wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan itu Pemerintah kota Makassar menyediakan wifi dengan tujuan lebih meningkatkan aktifitas yang berkaitan

⁹⁹Wawancara Langsung dengan ibu Merita Ekawati Mustika “Selaku Badan Promosi Pariwisata Kota Makassar”. tanggal 7 juli 2017, pukul 10.30 wit

pengembangan wisata berbasis E-diplomasi. Contoh penyediaan wifi yang di tempatkan di tempat-tempat wisata seperti; di transportasi berupa mobil internet, Bus Pariwisata hotel dan lain-lain guna untuk menjangkau tempat-tempat yang kurang stabil akan jaringan internetnya, mempermudah pengunjung dalam mengakses informasi yang “dibutuhkan”. Adapun infrastruktur yang membantu mengembangkan wisata berbasis E-diplomasi, seperti, aplikasi Makassar Tourism. Dimana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang membantu pemerintah kota Makassar dalam mempromosikan wisata yang ada di kota Makassar.

- ***Mengoptimalisasi Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Digital atau Elektronik di Kota Makassar***

Sebagai salah satu destinasi wisata yang mendapat prioritas pengembangan dari berbagai sektor, maka sistem informasi pariwisata berbasis digital harus di optimalisasikan sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam mendorong pengembangan pariwisata.

Sistem informasi yang baik, mudah diakses dan up to date, menjadi salah satu langkah yang dijalankan. Ketersediaan sistem informasi pariwisata ini tidak terlepas dari peran pemerintah kota atau daerah, peran Dinas Pariwisata dan Perusahaan-perusahaan Swasta dan Individu. Dalam konteks penelitian ini, sistem informasi pariwisata berbasis digital dapat dilakukan secara online, dengan memanfaatkan teknologi internet misalnya website dan media sosial berupa facebook, instagram dan lain-lain.

- ***Mengoptimalisasi Aktifitas Pemerintah Dalam Mendukung Sistem Informasi Pariwisata berbasis Elektronik***

a. Website

Saat ini pemerintah kota Makassar yang telah memiliki website dengan fungsi utama memberikan informasi kepada publik khususnya pada calon wisatawan mengenai apa dan bagaimana potensi pariwisata kota makassar. websaite ini telah menawarkan informasi dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.¹⁰⁰

Website pemerintah kota yang berhubungan dengan kepariwisataan kota makassar dan memberikan informasi mengenai pariwisata dan aspek-aspek lain, misalnya akomodasi, sistem transportasi serta event dan jenis pariwisata yang dapat diikuti atau di nikmati oleh wisatawan.

¹⁰⁰<http://www.tourism-makassar.id>

Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram)

Media Sosial berupa Facebook, Twitter, Instagram dan lain merupakan salah satu media yang digunakan oleh Pemerintah kota Makassar dalam mempromosikan Pariwisata kota Makassar, karena diketahui Media Sosial ini memungkinkan orang lebih mudah untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, maupun orang lain.

Media sosial berupa Facebook, Twitter, Instagram, diketahui sangat bagus karena memiliki peran besar dalam mendatangkan wisatawan, media sosial juga menyediakan pilihan untuk mengelola dan mempromosi visibilitas resort atau destinasi, media sosial juga sangat bagus dalam menanggapi umpan balik dan kritik dari wisatawan.

Aplikasi Makassar Tourism

Aplikasi Makassar Tourism ini merupakan salah satu aplikasi yang berbasis online yang di publikasikan oleh pemerintah kota Makassar khususnya oleh Dinas Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif kota Makassar. dimana dalam aplikasi tersebut telah tercantum berbagai fitur-fitur atau menu-menu utama yang bisa mengenalkan kepada pengguna baik lokal maupun mancanegara dalam keperluannya seputar kota makassar, seperti tempat-tempat wisata, informasi transportasi, kalender event-event di kota makassar dan mengenalkan kebudayaan lokal.

B. Dampak Positif dari Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Mengembangkan E-diplomasi Sebagai Sarana Promosi Pariwisata

Pariwisata sering kali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spectrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (poverty alleviation), Pembangunan Berkesinambungan (sustainable development), Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia, Peningkatan Ekonomi dan Industri Kreatif; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan diberbagai daerah yang msikin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays. Pengelolaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi disuatu destinasi pariwisata.

Penggunaan bahan dan produk local dalam proses pelayanan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan kesempatan kepada Industri Lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut diatas adalah kemampuan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dengan menggunakan bahan dan produk local yang berkualitas.

Dengan semakin kompleksnya dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini. Maka pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

- Dampak positif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk Masyarakat setempat terbukti berhasil, salah satu contohnya yaitu dengan adanya penyelenggaraan ajang “Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8)” yang dibuka pada rabu 06 september 2017 terasa dampaknya dimana lokasi tersebut dipadati pengunjung dan hotel-hotel setempatpun banyak yang full booking. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan “Anggiat Sinaga” mengatakan 38 hotel anggota PHRI Sulsel memang sudah mengantisipasi penyelenggaraan F8. Bahkan seluruh hotel telah menyiapkan paket menarik yang ditawarkan pada wisatawan. Paket tersebut mulai dari paket menginap empat hari dan gartis satu malam. Promo tersebut sudah termasuk sarapan pagi serta fasilitas antar dan jemput ke lokasi ajang penyelenggaraan F8.

- Dampak positif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk Masyarakat setempat terbukti berhasil, salah satu contohnya yaitu dengan adanya penyelenggaraan ajang “Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8)” yang dibuka pada rabu 06 september 2017 terasa dampaknya dimana lokasi tersebut dipadati pengunjung dan hotel-hotel setempatpun banyak yang full booking. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan “Anggiat Sinaga” mengatakan 38 hotel anggota PHRI Sulsel memang sudah mengantisipasi penyelenggaraan F8. Bahkan seluruh hotel telah menyiapkan paket menarik yang ditawarkan pada wisatawan. Paket tersebut mulai dari paket menginap empat hari dan gartis satu malam. Promo tersebut sudah termasuk sarapan pagi serta fasilitas antar dan jemput ke lokasi ajang penyelenggaraan F8. Selain menjadi atraksi dan destinasi bagi Masyarakat serta wisatawan, ajang ini juga disambut baik oleh para penjaja makanan khas lokal di Makassar seperti pisang epe dan lain-lain. Para penjual makanan khas lokal tersebut bersyukur karena dagangannya terjual dengan cepat.¹⁰¹
- Selain itu dampak positif dari Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan E-diplomasi sabagai sarana promosi Pariwisata, berdampak juga pada peningkatan jumlah pengunjung Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dalam periode tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2014 jumlah wisatwan Nusantara yang berkunjung ke kota Makassar mencapai 3.636.017, dan dari wisatawan Mancanegara mencapai 52.488 wisatawan, dan pada tahun 2015 jumlah wisatawan Nusantara mencapai 3.771.067, dan untuk wisatawan Mancanegara mencapai 53.879 wisatawan, dan pada tahun 2016 jumlah wisatawan Nusantara mencapai 4.688.681, dan untuk wisatawan Mancanegara mencapai 85.644 wisatawan

Peningkatan ini merupakan usaha dan kerja keras dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mampu menarik jumlah kunjungan wisatawan untuk hadir mengikuti acara direct sale, pertunjukan seperti festival, pagelaran musik dan tari traditional dan modern serta berbagai kegiatan lainnya.

Berbagai program dan kegiatan dalam mempromosikan pariwisata kota Makassar terus digalakkan baik dengan mengikuti pasar wisata di dalam dan di luar negeri, juga melakukan event-event dalam rangka menarik wisatawan datang ke Kota Makassar.

¹⁰¹<http://m.detik.com/travel/advertorial-news-blok-travel/d-3638231/makassar-f8-bawa-dampak-positif-untuk-masyarakat>

PENUTUP

Teknologi Informasi menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi lembaga atau instansi yang tangguh sehingga mampu menghasilkan keunggulan yang kompetitif dan menjadi strategi unggulan ditengah persaingan yang semakin kuat saat ini.

Maka Dari pembahasan yang telah diuraikan maka penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem informasi berbasis Web ataupun Berbasis Aplikasi dapat membantu kelancaran kegiatan operasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar serta dapat memperluas jangkauan informasi pariwisata dibandingkan dengan menggunakan sistem manual.

Dengan adanya sistem Informasi Pariwisata berbasis Web di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar dapat mengaplikasikan penggunaan dalam melayani informasi. Sistem Informasi Pariwisata yang telah dirancang ini dapat memberikan informasi mengenai data dan tempat-tempat destinasi pariwisata Kota Makassar yang selalu di update

Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada suatu kegiatan tertentu yang ada di Dinas Pariwisata karena setiap lembaga atau organisasi memiliki strategi promosi pariwisata yang bervariasi. Diharapkan Sebaiknya Pihak Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Kota Makassar lebih mengenalkan atau mempromosikan aplikasi Makassar Tourism kepada khalayak, agar lebih banyak masyarakat lokal maupun manca negara yang mengetahui adanya aplikasi tersebut, sehingga lebih banyak lagi yang menggunakan atau mendownload aplikasinya, sehingga dengan mudah mereka mengetahui informasi, dan destinasi-destinasi pariwisata kota makassar agar bisa menarik minat calon pengunjung, karena aplikasi tersebut lebih mempermudah pengguna. dan dalam Aplikasi Makassar Tourism ini harus di cantumkan tentang petunjuk yang jelas ke arah atau tujuan selanjutnya dalam melakukan aktifitas pada fitur-fitur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aktifitas promosi dinas kebudayaan dan pariwisata kota makassar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan

Ali Hasan, S.E., M.M. "Tourism Marketing" CAPS(Center for Academic Publishing Service) hal 460

Dr. Mochtar Mas'oe'd "Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan" penerbit Pustaka Pelajar, hal 193.

Kuswana, Dadang. 2011 "Metode Penelitian Sosial" CAPS. Bandung.Hal.5.

Usman , Purnomo Setiady Akbar.2006, "Metode Penelitian Sosial" ,Bumi Aksara.

Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A Simmons "HandBook Hubungan Internasional", hal 436.

Internet :

Augie D. Manuputty & Andeka Rocky Tanaamah "Kepariwisataan Berbasis E-Tourism di Indonesia"

Gusti Idriasih "Diplomasi Indonesia melalui kampanye Wonderful Indonesia dalam meningkatkan Pariwisata Indonesia di Dunia Internasional"

Jefri Turu'Pabuntang "Definisi digital diplomasi, e-diplomasi, internet diplomasi dan batasan diplomasi"

Laode Muhamad Fathun: "Para Diplomasi Menuju Kota Dunia.

Pariwisata Kota Makassar". tanggal 7 juli 2017, pukul 10.30 wit.
<http://m.detik.com/travel/advertorial-news-blok-travel/d-3638231/makassar-f8-bawa-dampak-positif-untuk-masyarakat>

Putu Nopa Gunawan: "Makassar Smart City 2030"

[Sulawesi.bisnis.com/m/read/20140508/11/177808/gandeng telkom pemkot makassar kembangkan smart city](http://Sulawesi.bisnis.com/m/read/20140508/11/177808/gandeng_telkom_pemkot_makassar_kembangkan_smart_city)

Tonny Dian Effendi "e-diplomasi Pemerintah Daerah di Indonesia" di post pada agustus 11, 2008 <http://www.mysciencework.com/publication/download>.

Wawancara Langsung dengan ibu Merita Ekawati Mustika "Selaku Badan Promosi

Upaya Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengembangkan E-Diplomasi Sebagai Sarana Promosi Pariwisata

<http://internationalrelationsjefri.blogspot.co.id/2015/06/definisi>

<http://makassarkota.go.id/105-sejarahkotamakassar.html>

<http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>

<http://www.tourism-makassar.id/dokumen-renstra-dinas-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-kota-makassar-2014-2019.html>

<http://www.tourism-makassar.id/laporan-kinerja-dinas-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-kota-makassar-tahun-2016.html>